



BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

**DETERMINAN DAN EKVIVALEN TARIF IMPOR JASA FINANSIAL
DAN ASURANSI NEGARA RCEP**

Meidah Azhari, Widyastutik

**PERKIRAAN DAMPAK ASEAN DAN HONG KONG
FREE TRADE AREA (AHKFTA) TERHADAP KINERJA
PERDAGANGAN INDONESIA**

Dian Dwi Laksani, Aziza Rahmaniar Salam

**DETERMINANTS OF INDONESIA'S EXPORTS OF MANUFACTURED
PRODUCTS: A PANEL DATA ANALYSIS**

Ahmad Sohibil Kahfi

**DAMPAK KEBERADAAN PERWAKILAN PERDAGANGAN
LUAR NEGERI TERHADAP KINERJA EKSPOR
NON MIGAS INDONESIA**

Ayu Sinta Saputri, Septika Tri Ardiyanti

**ANALISIS INTEGRASI HARGA LADA DI PASAR DOMESTIK
DAN INTERNASIONAL**

Dewi Asrini Fazaria, Dedi Budiman Hakim, Sahara

**POSISI DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA
JASA PERGUDANGAN DI INDONESIA**

Bagus Wicaksana

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan diterbitkan sejak tahun 2007 secara periodik dua kali dalam satu tahun (Juli dan Desember), memuat hasil penelitian terkait dengan isu perdagangan.

EDITOR

Ketua:

Dr. Ir. Kasan, MM (*International Trade*, ABFI Perbanas Jakarta)

Anggota:

Ir. Ernawati Munadi, Msi, Ph.D (*Domestic Trade*, AIPEG)

Dr. Masyhuri, APU (*Economic History*, LIPI)

Zamroni Salim, Ph.D (*International Trade and Development*, LIPI)

Drs. M. Bashori Imron, Msi (*Media and Communication*, LIPI)

Dr. Maddaremmeng A. Panennungi, S.E (*International Trade*, UI)

MITRA BESTARI:

Prof. Dr. Abuzar Asra, M.Sc (*Trade and Poverty*, BPS)

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA (*Trade and Development*, LIPI)

Prof. Dr. Rina Oktaviani (*International Trade – CGE Modelling*, IPB)

Dr. Slamet Sutomo (*Domestic Trade*, STIS)

Dr. Wayan R. Susila, APU (*Trade and Agricultural Economics*, TCF)

Achmad Shauki, Ph.D (*International Trade*, AIPEG)

Dr. Ir. Hartoyo, MSc (*Consumers Protection and Trade*, IPB)

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS (*Agriculture Economics*, Kementan)

REDAKSI PELAKSANA:

Puspita Dewi, SH, MBA (Koordinator penyelenggaraan penyusunan Buletin)

Maulida Lestari, SE, ME (Penilai kesesuaian template dan standar naskah, pemeriksa dummy)

Reni K. Arianti, SP, MM (Penyelenggara administrasi dan pemeriksa dummy)

Suler Malau, SH (Pemeriksa Dummy)

Dewi Suparwati, S.Si (Penyelenggara administrasi, pencatatan dan korespondensi)

Hilda Cahyani, Ph.D (Editor Bahasa Inggris)

ALAMAT REDAKSI:

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Kementerian Perdagangan, RI

Gedung Utama Lantai 3 dan 4

JL.M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23528681

Fax. (021) 23528691

publikasi.bppkp@kemendag.go.id

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan dapat diakses melalui:

jurnal.kemendag.go.id

Terakreditasi

Berdasarkan SK. Kepala LIPI No.818/E/2015 tanggal 15 Juli 2015
(Sertifikat No.689/AU3/P2MI-LIPI/07/2015)

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (BILP) Volume 10 No.2 Tahun 2016. BILP merupakan sarana untuk menyebarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP), Kementerian Perdagangan kepada seluruh *stakeholders*. Dalam menerima naskah, BILP bersifat terbuka dengan menerima berbagai naskah dari penulis baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Perdagangan sepanjang naskah bertemakan sektor perdagangan maupun sektor terkait perdagangan.

Tulisan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan cukup beragam, namun tetap memperhatikan aspek perdagangan dalam berbagai dimensi dan pendekatan keilmuan. Dalam Volume 10 No. 2, Desember 2016, BILP mempublikasikan enam tulisan ilmiah yang mengkaji berbagai isu di bidang perdagangan. Dari enam naskah yang dipublikasikan, dua diantaranya merupakan naskah ilmiah yang tulis oleh penulis dari luar Kementerian Perdagangan.

Tulisan pertama dengan judul **“Determinan dan Ekuivalen Tarif Impor Jasa Finansial dan Asuransi Negara RCEP”** menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi impor jasa finansial dan asuransi serta melakukan estimasi ekuivalen tarif untuk melihat seberapa besar hambatan dalam perdagangan jasa pada masing-masing negara RCEP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB, jarak, bahasa, dan sejarah kolonial signifikan memengaruhi impor. Kesamaan bahasa dan sejarah kolonial merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perdagangan.

Tulisan kedua mengkaji seberapa besar dampak berlakunya perjanjian perdagangan barang ASEAN-Hong Kong FTA terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Dengan judul **“Perkiraan Dampak ASEAN dan Hong Kong Free Trade Area (AHKFTA) Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia”**, hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh manfaat dari liberalisasi penuh perdagangan FTA ASEAN-Hong Kong baik dari kesejahteraan maupun peningkatan GDP, sedangkan peningkatan *output* hanya terjadi di beberapa sektor yang merupakan komoditi unggulan.

Tulisan ketiga berjudul **“Determinant of Indonesia’s Export of Manufactured Products: A Panel Data Analysis”** bertujuan untuk menganalisis faktor penentu

ekspor manufaktur di Indonesia sejak 2005 sampai 2014. Perubahan relatif dari nilai tukar, *real GDP*, jarak dua negara, dan tarif secara signifikan memengaruhi ekspor manufaktur di Indonesia.

Tulisan keempat berjudul **“Dampak Keberadaan Perwakilan Perdagangan Luar Negeri Terhadap Kinerja Ekspor Non Migas Indonesia”** bertujuan menganalisis dampak pembentukan Atase Perdagangan (Atdag) dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) terhadap kinerja ekspor non migas Indonesia. Keberadaan Atdag dan ITPC memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Nilai ekspor dan pangsa ekspor non migas Indonesia di negara mitra dagang dimana terdapat Atdag dan ITPC lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara mitra yang belum terdapat Atdag dan ITPC.

Tulisan kelima **“Analisis Integrasi Harga Lada di Pasar Domestik dan Internasional”** bertujuan untuk menganalisis keterkaitan harga lada Indonesia dengan harga lada internasional. Dengan menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model*, hasil analisis menunjukkan bahwa harga lada hitam lokal dan lada hitam spot memiliki hubungan integrasi baik pada jangka panjang maupun pendek. Sementara, pengaruh timbal balik terjadi pada harga lada putih.

“Posisi dan Faktor yang Memengaruhi Kinerja Jasa Pergudangan di Indonesia”, merupakan tulisan keenam bermaksud untuk menganalisis posisi dan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja jasa pergudangan sehingga kebijakan yang efektif dapat dirumuskan, mengingat jasa pergudangan bersifat lintas sektoral. Ekspansi jasa pergudangan Indonesia melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi, dan klusterisasi daerah pergudangan perlu dilakukan, sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan perpajakan dan upah merupakan faktor yang paling signifikan dalam mendukung ekspansi jasa pergudangan.

Tulisan ilmiah yang diterbitkan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan baik dalam lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdagangan. Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan buletin ini.

Jakarta, Desember 2016
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
DETERMINAN DAN EKVIVALEN TARIF IMPOR JASA FINANSIAL DAN ASURANSI NEGARA RCEP Meidah Azhari, Widyastutik	147-166
PERKIRAAN DAMPAK ASEAN DAN HONG KONG FREE TRADE AREA (AHKFTA) TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN INDONESIA Dian Dwi Laksani, Aziza Rahmaniar Salam	167-186
<i>DETERMINANTS OF INDONESIA'S EXPORTS OF MANUFACTURED PRODUCTS: A PANEL DATA ANALYSIS</i> Ahmad Sohibil Kahfi	187-202
DAMPAK KEBERADAAN PERWAKILAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TERHADAP KINERJA EKSPOR NON MIGAS INDONESIA Ayu Sinta Saputri, Septika Tri Ardiyanti	203-224
ANALISIS INTEGRASI HARGA LADA DI PASAR DOMESTIK DAN INTERNASIONAL Dewi Asrini Fazaria, Dedi Budiman Hakim, Sahara	225-242
POSISI DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA JASA PERGUDANGAN DI INDONESIA Bagus Wicaksana	243-266

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

TERAKREDITASI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

DDC: 382.6 BAD t

Aulia Luthfianto, D.S. Priyarsono, Raul Barreto
Inspektorat Jenderal, Kementerian Perdagangan-RI, Jakarta, Indonesia; Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia; University of Adelaide, Australia

Fasilitasi Perdagangan dan Kinerja Ekspor Manufaktur Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.1 Juli 2016, Hal.1-20

Penelitian ini menganalisa dampak dari fasilitasi perdagangan pada kinerja ekspor manufaktur Indonesia. Data spesifik dari masing-masing negara baik Indonesia dan tiga puluh mitra dagang utama dari komoditi manufaktur selama periode 2010 hingga 2014 digunakan dalam membangun indikator fasilitasi perdagangan, termasuk langkah-langkah dalam lingkungan kepabeanan dan regulasi, efisiensi pelabuhan, dan infrastruktur di sektor jasa. Hubungan antara kinerja ekspor Indonesia dan indikator tersebut kemudian diestimasi menggunakan *gravity model* dengan data panel. Hasil analisa menunjukkan bahwa fasilitasi perdagangan dalam lingkungan kepabeanan dari Indonesia dan mitra dagang utamanya berpengaruh besar dan positif terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia, sementara lingkungan regulasi di Indonesia mengurangi arus perdagangan. Kerjasama perdagangan dengan negara-negara ASEAN berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia. Implikasi kebijakan yang dapat disarankan adalah dengan memprioritaskan upaya dalam lingkungan kepabeanan Indonesia dan mitra dagang, melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya yang diperlukan dalam melakukan perdagangan. Selain itu, meningkatkan

kerjasama perdagangan dalam kawasan ASEAN akan dapat meningkatkan kinerja ekspor.

Kata kunci : Fasilitasi perdagangan, ekspor manufaktur, *gravity model*.

DDC: 382.9 BAD d

Agus Syarif Hidayat
Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia

Dinamika Kerjasama Ekonomi Indonesia Dengan Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI): Potensi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.1 Juli 2016, Hal. 21-43

Sejak Organisasi Konferensi Islam (OKI) berdiri tahun 1969, kerjasama ekonomi antar anggotanya yang berjumlah 57 negara terbilang belum intensif. Salah satu indikasinya adalah rendahnya porsi *intra-trade* dan *intra-investment* OKI, serta pertumbuhan mereka yang juga relatif lambat. Penelitian ini membahas dinamika kerja sama ekonomi antara Indonesia dan anggota OKI serta prospek liberalisasi ekonomi OKI dan potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Model yang digunakan adalah standar *Global Trade Analysis Project* (GTAP). Analisis menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi OKI berpotensi memberikan dampak sektoral yang beragam bagi Indonesia, khususnya terlihat pada variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, output industri dan perdagangan. Indonesia dan anggota OKI lainnya dapat memperoleh manfaat optimal ketika diterapkan *full liberalization*. Oleh karena itu, Indonesia

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

TERAKREDITASI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

perlu mengambil peran untuk mendorong percepatan dan pendalaman liberalisasi perdagangan yang lebih komprehensif antar anggota OKI. Sebagai langkah awal, Indonesia perlu segera meratifikasi perjanjian *Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference* (TPS-OIC).

Kata kunci: OKI, Liberalisasi Ekonomi, Dampak Bagi Perekonomian Indonesia

DDC: 381.4 BAD h

Muhammad Fawaiq
Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI, Jakarta, Indonesia

Hubungan Antara *Consumption Abroad* (Moda 2) Dengan *Commercial Presence* (Moda 3) di Sektor Jasa Pariwisata Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.1 Juli 2016, Hal. 45-61

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Moda 2 dan Moda 3 dalam perdagangan internasional di sektor jasa pariwisata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Panel Vector Error Correction Model* (VECM) Granger. Data yang digunakan adalah data kedatangan wisatawan mancanegara dan *Foreign Direct Investment* (FDI) jasa hotel dan restoran tahun 1997-2014 di Bali, Jakarta, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Daerah-daerah ini berkontribusi sebesar 81,26% dari total kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia dan 68% terhadap total FDI di jasa hotel dan restoran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat

hubungan kausalitas jangka pendek antara kedua variabel tetapi terdapat hubungan jangka panjang satu arah yaitu variabel Moda 3 dipengaruhi oleh variabel Moda 2. Hasil pengujian pada gabungan antara jangka panjang dan jangka pendek menunjukkan bahwa variabel Moda 3 secara kuat dipengaruhi oleh variabel Moda 2. Dengan demikian diketahui bahwa semakin banyak jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia maka akan mendorong meningkatnya FDI di jasa hotel dan restoran, tetapi meningkatnya FDI di jasa tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap masuknya jumlah wisatawan mancanegara.

Kata Kunci: Perdagangan Jasa, Moda 2, Moda 3, Pariwisata, *VECM Granger*

DDC: 382 BAD p

Hasni, Fitria Faradila
Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI, Jakarta, Indonesia

Penentuan Negara Prioritas Pengembangan ATDAG dan ITPC Melalui Metode *Analitycal Hierarchy Process*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.1 Juli 2016, Hal. 63-85

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kriteria-kriteria penentuan negara prioritas untuk pengembangan Atase Perdagangan (*Atdag*)/*Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC), dan mengidentifikasi negara-negara prioritas untuk mengembangkan *Atdag*/ITPC yang sudah ada atau mendirikan *Atdag*/ITPC yang baru. Metode pengkajian yang digunakan

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

TERAKREDITASI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Data sekunder bersumber dari BPS, Fragile States Index, UN COMTRADE, World Bank dan CEPII. Sedangkan data primer diperoleh dari kegiatan FGD dengan para pelaku ekspor, akademisi dan pejabat Disperindag Jakarta dan Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan dalam pemilihan negara prioritas Atdag dan ITPC secara berturut-turut adalah *country risk; commercial infrastructure; market growth; trade complementary index; market intensity; trade openness; dan trade cooperation*. Keberadaan Atdag dan ITPC sebagai perwakilan perdagangan berperan penting dalam peningkatan ekspor, sehingga perlu penguatan dan pengembangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan Atdag dan ITPC di 16 negara prioritas serta pembentukan Atdag dan atau ITPC baru di tiga negara prioritas, yaitu Myanmar, Swedia dan Austria.

Kata kunci: Atdag, ITPC, AHP, Kriteria, Negara Prioritas

DDC: 382.60598 BAD p

Aditya P Alhayat, Aziz Muslim
Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri,
Badan Pengkajian dan Pengembangan
Perdagangan, Kementerian Perdagangan-
RI, Jakarta, Indonesia

Proyeksi Ekspor dan Impor Indonesia:
Suatu Pendekatan *Vector Autoregressive*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.1 Juli 2016, Hal. 87-102

Proyeksi ekspor dan impor Indonesia memiliki urgensi penting sebagai salah satu acuan untuk merumuskan target pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN). Penelitian ini bertujuan untuk menyusun proyeksi ekspor dan impor nasional periode 2015-2019 yang dilihat berdasarkan sektor migas dan non migas. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi eksternal, *Vector Autoregression* (VAR) digunakan untuk memberikan perkiraan besaran pertumbuhan ekspor dan impor di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa datang pertumbuhan ekspor Indonesia masih dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto negara-negara mitra utama sedangkan impor lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi domestik. Hasil proyeksi VAR menunjukkan bahwa ekspor nasional pada 2015 turun sebesar 10,65% dan meningkat sebesar 1,06% di tahun 2019, sedangkan impor nasional tahun 2015 turun sebesar 10,02% dan meningkat sebesar 12,11% di tahun 2019. Apabila pemerintah ingin menetapkan target ekspor lebih tinggi dari angka tersebut, maka usaha peningkatan ekspor harus ditopang dengan perbaikan sisi penawaran, dan target impor yang lebih rendah dapat dicapai dengan pengendalian konsumsi migas.

Kata kunci: Proyeksi, Ekspor, Impor, VAR

DDC: 635.2 BAD t

Januar Arifin Ruslan, Muhammad Firdaus,
Suharno
Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat,
Indonesia

Transmisi Harga Asimetri Dalam Rantai
Pasok Bawang Merah dan Hubungannya
Dengan Impor di Indonesia: Studi Kasus di
Brebes dan Jakarta

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.1 Juli 2016, Hal. 103-128

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

TERAKREDITASI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

Disparitas harga bawang merah di tingkat petani dan konsumen sangat besar. Penelitian ini menganalisis transmisi harga dalam rantai pasok bawang merah dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi transmisi harga serta menganalisis hubungan antara harga bawang merah impor terhadap harga produsen dan harga konsumen bawang merah. Penelitian ini menggunakan model *Houck dan Error Correction Mechanism* (ECM) serta uji kointegrasi dan kausalitas jangka panjang. Data yang digunakan merupakan data bulanan pada petani, pedagang grosir, pengecer di Kabupaten Brebes dan Kota Jakarta serta harga bawang merah impor selama Januari 2008 sampai Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan petani-grosir terjadi asimetris harga dalam jangka pendek karena terkait dengan biaya penyesuaian, sedangkan grosir-pengecer terjadi asimetris dalam jangka panjang karena terkait dengan penyalahgunaan kekuatan pasar. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran dari harga impor bawang merah dalam penentuan harga bawang merah di tingkat produsen dan konsumen. Kebijakan harga plafon (*ceiling price*) dan harga dasar (*floor price*) diharapkan dapat menghindari perilaku eksploitasi yang dilakukan pedagang perantara.

Kata Kunci: Bawang Merah, Transmisi Asimetris, Impor, Perilaku Pasar

DDC: 664.7 d

Ulpah Jakiyah, Lukman M Baga, Netti Tinaprilla
Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap

Usaha Tani Beras Organik di Provinsi Jawa Barat

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.1 Juli 2016, Hal. 129-146

Salah satu kebijakan Menteri Pertanian berkenaan dengan ekspor dan impor beras adalah peningkatan ekspor jenis beras khusus, seperti beras organik. Permintaan pasar global beras organik semakin meningkat, tetapi Indonesia menghadapi pesaing seperti Thailand dan Vietnam. Meskipun demikian, petani beras organik di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemampuan daya saingnya dengan keberhasilannya melakukan ekspor ke negara Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Singapura, Belanda, Italia, dan Dubai. Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing beras organik, dan mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tani beras organik. Metode analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas beras organik memiliki daya saing yang cukup untuk ekspor, terlihat pada keunggulan kompetitif (*Private Cost Ratio*) dan komparatif (*Domestic Resource Cost Ratio*). Penerimaan secara finansial maupun sosial dapat memenuhi biaya input domestik. Keunggulan kompetitif dan komparatif melemah akibat dari adanya pengaruh biaya sertifikasi lahan pada biaya domestik dan biaya kemasan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output menguntungkan petani. Kebijakan bersifat efektif namun belum efisien akibat belum adanya lembaga penyediaan input seperti pupuk dan benih organik.

Kata kunci: Keunggulan Kompetitif, Keunggulan Komparatif, Beras Organik, Kebijakan Pemerintah, *Policy Analysis Matrix*

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

TERAKREDITASI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

DDC: 382.7 BAD e

Meidah, Widyastutik
Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat,
Indonesia

Determinan dan Ekuivalen Tarif Impor Jasa
Finansial dan Asuransi Negara RCEP

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.2 Desember 2016, Hal. 147-166

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan bentuk kerjasama yang diinisiasi ASEAN pada tahun 2012. Jasa finansial dan asuransi merupakan salah satu sektor jasa yang memiliki peran penting terhadap stabilitas perekonomian dunia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi impor jasa finansial dan asuransi serta melakukan estimasi ekuivalen tarif untuk melihat seberapa besar hambatan dalam perdagangan jasa pada masing-masing negara RCEP. Penelitian ini menggunakan pendekatan *gravity model* dengan analisis regresi data panel. Data yang digunakan bersumber dari data dasar *Global Trade Analysis Projects* (GTAP) dan *Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales* (CEPII). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB, jarak, bahasa, dan sejarah kolonial signifikan memengaruhi impor. Estimasi ekuivalen tarif menunjukkan bahwa Selandia Baru, Filipina, RRT, India, dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki hambatan perdagangan paling tinggi. Kesamaan bahasa dan sejarah kolonial merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perdagangan. Untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa asing serta menjalin hubungan yang baik antara negara yang memiliki kesamaan sejarah kolonial.

Kata Kunci: Perdagangan Jasa, Finansial dan Asuransi, Hambatan Perdagangan, *Gravity Model*, RCEP.

DDC: 382.9 BAD p

Dian Dwi Laksani, Aziza Rahmaniar Salam
Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI, Jakarta, Indonesia

Perkiraan Dampak ASEAN dan Hong Kong *Free Trade Area* (AHKFTA) Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.2 Desember 2016, Hal. 167-186

ASEAN dan Hong Kong sepakat untuk membentuk kerjasama kawasan dalam bentuk ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA). Negosiasi perundingan direncanakan akan selesai pada akhir 2016. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN tentunya berpartisipasi dalam rencana pembentukan AHKFTA. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung seberapa besar dampak berlakunya perjanjian perdagangan barang ASEAN-Hong Kong FTA terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah model *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan menggunakan *Global Trade Analysis Project* (GTAP) versi 8. Kerjasama kawasan ini diharapkan akan menurunkan hambatan perdagangan di semua sektor, khususnya penurunan tarif sebagai representasi penurunan hambatan perdagangan baik di Indonesia maupun di Hong Kong. Penelitian ini melakukan dua simulasi yaitu pemotongan tarif sebesar 50% dan liberalisasi penuh. Hasil simulasi menunjukkan bahwa Indonesia

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

TERAKREDITASI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

memperoleh manfaat dari liberalisasi penuh perdagangan FTA ASEAN-Hong Kong baik dari kesejahteraan maupun peningkatan GDP, sedangkan peningkatan output hanya terjadi di beberapa sektor yang merupakan komoditi unggulan yaitu *vegetable oil, oil seeds, wearing apparel, textile* dan *electronic equipment* Penurunan tarif secara bertahap, pemberlakuan proteksi dan peningkatan daya saing bagi sektor yang berdaya saing rendah merupakan kebijakan yang sangat diperlukan.

Kata kunci: ASEAN-Hong Kong FTA, Perdagangan Indonesia, CGE Model

DDC: 382.6 BAD f

Ahmad Sohibil Kahfi
Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan-RI, Jakarta, Indonesia

Determinants of Indonesia's Exports of Manufactured Products: A Panel Data Analysis

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.2 Desember 2016, Hal. 187-202

Nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2012. Masalah ini menarik perhatian pemerintah Indonesia untuk segera meningkatkan performa ekspor, dimana salah satu sektor yang dapat ditingkatkan adalah sektor manufaktur. Studi ini menganalisis faktor penentu ekspor manufaktur di Indonesia sejak 2005 sampai 2014. Faktor utama yang dianalisis antara lain adalah nilai tukar rupiah, *foreign direct investment* (FDI), *gross domestic product* (GDP), dan kebijakan perdagangan. Faktor tersebut dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *random effect model*.

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa perubahan relatif dari nilai tukar, *real* GDP, jarak dua negara, dan tarif secara signifikan memengaruhi ekspor manufaktur di Indonesia. Beberapa rekomendasi terkait untuk pemerintah Indonesia antara lain adalah dengan menjaga ekspor Indonesia ke negara-negara yang memiliki GDP tinggi, memperluas pasar ekspor Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendukung industri lokal menggunakan teknologi maju, dan mendukung penyederhanaan proses impor.

Kata Kunci: Ekspor Produk Manufaktur, Nilai Tukar, Real GDP, Regresi Data Panel, *Random Effect Model*.

DDC: 382.6 BAD d

Ayu Sinta Saputri, Septika Tri Ardiyanti
Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI, Jakarta, Indonesia

Dampak Keberadaan Perwakilan Perdagangan Luar Negeri Terhadap Kinerja Ekspor Non Migas Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.2 Desember 2016, Hal. 203-224

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembentukan Atase Perdagangan (Atdag) dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) terhadap kinerja ekspor non migas Indonesia. Metode yang digunakan adalah *random effect model* fungsi permintaan dengan menggunakan nilai ekspor non migas Indonesia dan pangsa ekspor non migas Indonesia di negara mitra dagang sebagai indikator-indikator yang menggambarkan kinerja ekspor Indonesia.

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

TERAKREDITASI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

Kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan Atdag dan ITPC memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Nilai ekspor dan pangsa ekspor non migas Indonesia di negara mitra dagang dimana terdapat Atdag dan ITPC lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara mitra yang belum terdapat Atdag dan ITPC. Di samping itu, besaran anggaran yang diterima oleh para perwakilan perdagangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Dengan demikian, penguatan dan pengembangan Atdag dan ITPC penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan ekspor Indonesia baik melalui peningkatan besaran anggaran dan atau penambahan jumlah perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: Ekspor, Perwakilan Perdagangan, Fungsi Permintaan.

DDC: 633.8 BAD a

Dewi Asrini Fazaria, Dedi Budiman Hakim, Sahara
Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Analisis Integrasi Harga Lada di Pasar Domestik dan Internasional

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.2 Desember 2016, Hal. 225-242

Lada merupakan produk komoditas ekspor Indonesia, yang diekspor ke berbagai negara. Ketergantungan lada Indonesia pada pasar ekspor menjadikan harga lada domestik mengikuti fluktuasi harga lada di pasar dunia, meskipun harga lada di pasar domestik tidak selalu linier dengan harga lada dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan harga lada Indonesia dengan harga lada internasional.

Data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 1990-2014, dan dianalisis dengan menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil analisis menunjukkan bahwa harga lada hitam lokal dan lada hitam spot memiliki hubungan integrasi baik pada jangka panjang maupun pendek. Sementara, pengaruh timbal balik terjadi pada harga lada putih. Harga lada putih lokal terintegrasi dengan harga lada putih ekspor dan harga lada putih spot baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Penyaluran informasi harga yang lancar dan dapat diakses oleh setiap pelaku pemasaran sangat perlu untuk diupayakan. Diharapkan dengan adanya kelancaran informasi, pelaku pemasaran khususnya yang berada di tingkat lokal memiliki posisi tawar yang semakin kuat serta dapat terhindar dari praktek yang menyebabkan timbulnya *market power* dalam pemasaran lada.

Kata kunci: Integrasi Pasar, VECM, Lada Putih, Lada Hitam

DDC: 381.3 BAD a

Bagus Wicaksana
Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI, Jakarta, Indonesia

Posisi dan Faktor yang Memengaruhi Kinerja Jasa Pergudangan di Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.2 Desember 2016, Hal. 243-266

Jasa pergudangan merupakan sektor usaha yang diperlukan untuk merespon perubahan tren logistik, potensi pertumbuhan perdagangan, serta tuntutan efisiensi dalam menghadapi liberalisasi

sektor jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja jasa pergudangan sehingga kebijakan yang efektif dapat dirumuskan, mengingat jasa pergudangan bersifat lintas sektoral. Untuk mengetahui posisi jasa pergudangan, digunakan analisis SWOT, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja jasa pergudangan digunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Berdasarkan analisis SWOT, ekspansi jasa pergudangan Indonesia melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi, dan klasterisasi daerah pergudangan perlu dilakukan, sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hasil analisis SEM dengan *Partial Least Square* (PLS) menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan dan upah merupakan faktor yang paling signifikan dalam mendukung ekspansi jasa pergudangan. Untuk itu, kebijakan yang dapat menimbulkan pajak ganda, misalnya pembebanan pajak penghasilan pada setiap proses logistik untuk satu produk, harus dihindari. Penetapan upah minimum regional tidak perlu dinaikkan karena dapat menghambat ekspansi usaha.

Kata Kunci: Jasa Pergudangan, Logistik, SWOT, SEM dengan PLS.

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

TERAKREDITASI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

DDC: 382.6 BAD t

Aulia Luthfianto, D.S. Priyarsono, Raul Barreto
Inspectorat General, Ministry of Trade-RI, Jakarta, Indonesia; Bogor Agricultural University, West Java, Indonesia; University of Adelaide, Australia

Trade Facilitation And The Performance of Indonesian Manufacturing Export

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.1 July 2016, Page 1-20

This paper analyzes the impact of trade facilitation on Indonesian manufacturing export performance. Some specific data of Indonesia and thirty countries as Indonesian main trading partners of manufacture commodities over the period 2010 to 2014 were used to construct trade facilitation indicators, including measures in the customs and regulatory environment, port efficiency, and service sector infrastructure. The relationship between Indonesian export performance and these indicators were estimated using a gravity model with panel data. The findings provide some evidence that trade facilitation on customs environment of Indonesia and its trading partners largely and positively affects Indonesian manufacturing export performance, while the Indonesian regulatory environment deters the trade flows. Trade partnerships with ASEAN countries positively and significantly affect Indonesian manufacturing export performance. It is suggested for policy implication to prioritise efforts and development on Indonesian customs environment and its trading partners, through time and cost efficiency to trade. Moreover, Indonesia should generate more trade within ASEAN region which could stimulate a higher export performance.

Keywords: Trade facilitation, manufacturing export, gravity model

DDC: 382.9 BAD d

Agus Syarip Hidayat
Economic Research Centre, Indonesian Institute of Science, Jakarta, Indonesia

The Dynamic Economic Cooperation Between Indonesia and The Members of Organization of The Islamic Conference (OIC): Prospect and Impacts towards The Indonesian Economy

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.1 July 2016, Page 21-43

Since the establishment of Organization of the Islamic Conference (OIC) in 1969, the level of economic cooperation among its 57 member-countries has been limited, indicated by the low portion of intra-trade and intra-investment among the OIC members and their relatively slow growth. This study discusses the dynamic economic cooperation between Indonesia and the OIC members. Further, it analyzes the prospect of OIC economic liberalization and its potential impacts on the Indonesian economy. It uses secondary data and employs the standard of General Trade Analysis Project (GTAP) model. It shows that the OIC economic liberalization potentially had varying sectoral impacts on Indonesian economy, which was particularly shown by macroeconomic variables (such as economic growth and inflation), industrial output, and trade. Furthermore, Indonesia and other OIC members would obtain optimum benefits when full liberalization is applied.

Keywords: OIC, Economic Liberalization, Impacts on Indonesia Economy

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

DDC: 381.4 BAD h

Muhammad Fawaiq
The Center for International Trade
Cooperation Policy, Trade Analysis and
Development Agency, Ministry of Trade-RI,
Jakarta, Indonesia

*The Relationship Between Consumption
Abroad (Mode 2) and Commercial Presence
(Mode 3) in Indonesia's Tourism Sectors*

*Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.1 July 2016, Page 45-61*

This paper examines the relationship between Mode 2 and Mode 3 of international trade in tourism sector. The method used is the Panel Vector Error Correction Model (VECM) Granger. The data used in this study were the number of foreign tourist arrivals and the Foreign Direct Investment (FDI) in some hotels and restaurants during 1997-2014 in Bali, Jakarta, Riau Islands and Nort Sumatera. These regions contributed for 81.26% out of the total tourist arrivals in Indonesia and 68% of the total FDI in the services of hotels and restaurants Indonesia. The results using VECM Granger demonstrated that there was no short-term causality relationship between these two variables but they had a long-term causality relationship that the Moda 3 was affected by the variable mode 2. Test results on a combination of long-term and short-term showed that the variable mode 3 was strongly influenced by variable mode 2. Thus, it is known that the more foreign tourists coming to Indonesia, the more FDI we gained from the service of hotels and restaurants, but this increase does not significantly affect the number of foreign tourists.

Keywords: Trade in Services, Mode 2, Mode 3, Tourism, VECM Granger

DDC: 382 BAD p

Hasni, Fitria Faradila
The Center for Foreign Trade Policy, Trade
Analysis and Development Agency, Ministry
of Trade-RI, Jakarta, Indonesia

*Determining Priority Development Countries
of ATDAG and ITPC Using Analytical
Hierarchy Process*

*Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.1 July 2016, Page 63-85*

This study aims to develop the main criteria to determine priority countries for new Trade Attaché/ITPC Representatives and to identify priority countries for further development of the Trade Attaché/ITPC Representatives. This study employs an Analytical Hierarchy Process (AHP) methodology. The secondary data were collected from the BPS, Fragile States Index, UN COMTRADE, World Bank and CEPII. The primary data were collected from qualitative research using Focus Group Discussion (FGD) with the stakeholders in Jakarta and Yogyakarta. The results showed that the main criteria for choosing countries for establishing Atdag and ITPC in sequence were country risk, commercial infrastructure, market growth, trade complementary index, market intensity, trade openness, and trade cooperation. The presence of Trade Attaché/ITPC Representative in many countries has an important role in increasing Indonesia's export. However, further efforts are required to strengthen their roles, particularly in 16 countries. This study recommends to establish trade attaché and or ITPC in three potential countries: Myanmar, Sweden and Austria.

Keywords: Trade Attaché, ITPC, AHP, criteria, priority countries

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL.10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

DDC: 382.60598 BAD p

Aditya P Alhayat, Aziz Muslim
The Center for Foreign Trade Policy, Trade
Analysis and Development Agency, Ministry
of Trade-RI, Jakarta, Indonesia

*The Projection of The Indonesia's Export and
Import: A Vector Autoregressive Approach*

*Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.1 July 2016, Page 87-102*

Export and import projection is one of the important activities to determine the target of economic growth in the National Medium-Term Development Plan (NMTDP). This study aims to set out the projections of national exports and imports during 2015-2019 according to oil and non-oil sectors. By considering some external factors, Vector Autoregression (VAR) is utilized to forecast the future growth of export and import. The results showed that the future growth of Indonesia's export was determined by Gross Domestic Product of trading partners, while the Indonesia's import was influenced by domestic economic factors. The national export in 2015 was projected to decline by 10.65% and to increase by 1.06% in 2019, while the national import was projected to decline by 10.02% in 2015 and increase by 12.11% in 2019. If the government intends to set the export target higher than the projection, the improvement on the supply side must be considered. Moreover, the lower import target could be achieved by tightening the oil and gas consumption.

Keywords: Projection, Export, Import, VAR

DDC: 635.2 BAD t

**Januar Arifin Ruslan, Muhammad Firdaus,
Suharno**

*Bogor Agricultural University, West Java,
Indonesia*

*Asymmetric Price Transmission in Supply
Chain of Shallot and its Relationship With
Import in Indonesia: A Case Study in Brebes
and Jakarta*

*Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.1 July 2016, Page 103-128*

Shallot, as a potential commodity in Indonesia, has a large price disparity between the farmer and the consumer prices. The price disparity is also linked to the price of shallots import. This research analyzes the price transmission of shallots during its supply chain, discusses the factors influencing the price transmission, and also investigates the relationship between the price of import and the price of producer-and-consumer. This research uses the Houck Model, Error Correction Mechanism (ECM), cointegration test and longrun causality test. The data were monthly price data of farmers, wholesalers, and retailers in Brebes regency and Jakarta; and prices of shallot import during January 2008 to December 2014. The results showed that the relationship between farmer and wholesale was asymmetric in the short term of price transmission, even in the long term of transmission wholesalers and retailers was also having asymmetric relationship. The asymmetric price transmission in the short term was related to adjustment cost while the asymmetric price transmission in the long term indicated the abuse of market power. This study reveals the important role of price import in the farm and retailer prices. It is suggested to set up ceiling price and floor price in order to avoid the exploitative behavior of middlemen.

Keywords: Shallots, Asymmetric
Transmission, Import, Market Behaviour

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

DDC: 664.7 d

*Ulpah Jakiyah, Lukman M Baga, Netti Tinaprilla
Bogor Agricultural University, West Java, Indonesia*

The Impacts of Government Policy towards Organic Rice Farming in West Java

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.1 July 2016, Page 129-146

One of the agriculture minister policies related to rice exports and imports is the increased number of certain type of rice export such as organic rice. The global demand of organic rice market has been increasing but Indonesia is facing competitors, such as Thailand and Vietnam. Nevertheless, organic rice farmers in west java province are showing their competitive capability by exporting to a United States, Germany, Malaysia, Singapore, The netherlands, Italy, and Dubai. This study aims to analyze the competitiveness of organic rice, and identify the impacts in government policy for the organic rice farming. The result shows that some varieties of organic rice have adequate export competitiveness, seen from the competitive advantage (private cost ratio) and the comparative advantage (domestic cost ratio) which are positive. The analysis method used was Policy Analysis Matrix (PAM). The financial and social revenue could cover the input of domestic cost. The competitive and comparative advantages were weakened as a result of the influence of land certification in the domestic and packaging cost, whereas the impact of government policy to input and output is profitable for farmers. The policy is effective but has not been efficient due to lack of input providers such as fertilizer and organic seeds.

Keywords: Competitive Advantage, Comparative Advantage, Organic Rice, Government Policy, Policy Analysis Matrix

DDC: 382.7 BAD e

*Meidah, Widyastutik
Bogor Agricultural University, West Java, Indonesia*

Determinant and Tariff Equivalent of Import in Finance and Insurance Service in RCEP Countries

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.2 Desember 2016, Page 147-166

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a framework agreement which was initiated by ASEAN on 2012. Financial and insurance service is a service sector which has an important role in the world economic stability. The purpose of this study is to analyze the determinants of import in financial and insurance services, and to estimate tariff equivalent in each member of RCEP. This study employs Gravity model approach with regression analysis of panel data. The data were obtained from Global Trade Analysis Projects (GTAP) and Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII). The results indicate that GDP, distance, common language, and common colony have a significant effect on import. The estimation of tariff equivalent shows that New Zealand, Philippines, China, India, and South Korea are countries with the highest trade barriers. This study concludes that the similarities of language and historical background among countries are the factors that have the highest influence in trade. Therefore, increasing the use of foreign language and establishing better relationships between countries with the same colonial history are

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

crucial to be done.

Keywords: *Trade in Services, Finance and Insurance, Trade Barriers, Gravity Model, RCEP.*

DDC: 382.9 BAD p

*Dian Dwi Laksani, Aziza Rahmانيar
The Center for International Trade
Cooperation Policy, Trade Analysis and
Development Agency, Ministry of Trade-RI,
Jakarta, Indonesia*

*The Estimated Impact of ASEAN and
Hong Kong Free Trade Area (AHKFTA) on
Indonesia Trade Performance*

*Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.2 Desember 2016, Page 167-186*

ASEAN and Hong Kong have agreed to establish bilateral cooperation in the form of the ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA). The negotiation process is planned to be completed by the end of 2016. Indonesia as one of ASEAN countries will surely participate in AHKFTA. This study aims to investigate the impact of the bilateral trade agreement of the ASEAN-Hong Kong FTA on the Indonesian trade performance. The analytical method applied in this study is Computable General Equilibrium (CGE) using modeling approach, and Global Trade Analysis Project (GTAP) version 8. This cooperation is expected to reduce the trade barriers in all sectors, such as reducing tariff in order to decrease the trade barriers between Indonesia and Hong Kong. This study conducted two simulations- tariff cuts 50% and full liberalization. The results indicate that Indonesia gained some benefits from full liberalization of ASEAN-Hong Kong FTA in terms of its welfare and the increase of GDP. The increase of output only occurs

in few sectors which are categorized as a primary commodity such as vegetable oil, oil seeds, wearing apparel, textile and electronic equipment. In short, reducing tariff gradually, and reinforcing protection and improvement to a sector having low competitiveness are vital to support Indonesia's trade performance.

Keywords: *ASEAN-Hong Kong FTA, Indonesia Trade Performance, CGE Model*

DDC: 382.6 BAD f

*Ahmad Sohibil Kahfi
The Center of Data and Information System,
Secretariat General, Ministry of Trade-RI,
Jakarta, Indonesia*

*Determinants of Indonesia's Exports of
Manufactured Products: A Panel Data
Analysis*

*Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10
No.2 Desember 2016, Page 187-202*

Indonesia's export has been decreasing since 2012. This problem has raised government's attention to increase the export performance. One sector that can be improved is manufacturing. This study analyzes the determinants of Indonesia's manufacturing export from 2005 to 2014. The major factors examined in this study include real exchange rate, foreign direct investment (FDI), gross domestic product (GDP) and trade policies. Those factors are examined by using panel data regression with a random effect model. The results revealed that relative change of exchange rate, real GDP, distance between two countries and average tariffs significantly affected the Indonesia's manufacturing export. It is recommended that Indonesian

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 10 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2016

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

government maintains the exports to countries which have high GDP, expand the export market, stabilize Rupiahs exchange rate, encourage local industries to use advanced technologies, and facilitate the simplification of import procedures.

Keywords: Manufacturing Export, Real Exchange Rate, Real GDP, Panel Data Regression, Random Effects Model.

DDC: 382.6 BAD d

*Ayu Sinta Saputri, Septika Tri Ardiyanti
The Center for Foreign Trade Policy, Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade-RI, Jakarta, Indonesia*

The Impact of Indonesian Foreign Trade Representatives on Export Performance

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.2 Desember 2016, Page 203-224

This study analyzes the impact of establishing the Indonesia's Trade Attaché (Atdag) and The Indonesia's Trade Promotion Center (ITPC) on Indonesia's non-oil exports performance. The method used in this study is random effect model of demand functions using non-oil and gas export value, and non-oil and gas export share of Indonesia in trading partner countries as the indicators of Indonesia's export performance. The results indicate that the presence of Atdag and ITPC gave a positive and significant effect to improve exports. The value of Indonesia's non-oil and gas exports, and the share of Indonesia's non-oil exports with some partner countries of Atdag and ITPC are higher compared to countries without Atdag and ITPC. Moreover, the amount of budget received by the trade representative also has a positive and significant effect on the export performance. Therefore, the government should strengthen and develop

Atdag and ITPC in order to boost export by increasing the budget and the number of trade representatives abroad.

Keywords: Export, Trade Representative, Demand Function

DDC: 633.8 BAD a

*Dewi Asrini Fazaria, Dedi Budiman Hakim, Sahara
Bogor Agricultural University, West Java, Indonesia*

An Analysis of Pepper Price Integration at Domestic and International Markets

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.2 Desember 2016, Page 225-242

Pepper is one of the Indonesian commodities which has been exported to various countries. The dependence of Indonesia's exporting pepper has caused the domestic price of pepper to follow the fluctuations of the world's market price, even though the domestic price is not necessarily linked to the world market. This study aims to find out the relation between the domestic pepper price to the world's market price. The data were from 1990-2014 and were analyzed using Vector Error Correction Model (VECM) method. The results indicated that the price of local black pepper and spot black pepper had good integration relationship in long and short term. Besides, the mutual relation occurs in white pepper price. The price of local white pepper is related to the exported one, and is also related to the price of spot white pepper both in short term and long term. Good distribution of pepper and access to current pricing information is necessary to be done. By using a good access to information, marketing actors especially those at local marketing level will have a

stronger bargaining position and therefore it can avoid practices that might cause market power in pepper market.

Keyword: Market Integration, VECM, White Pepper, Black Pepper.

DDC: 381.3 BAD a

Bagus Wicaksana

The Center for Domestic Trade Policy, Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade-RI, Jakarta, Indonesia

Positions and Enabling Factors of Warehouse Services Performance in Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.10 No.2 Desember 2016, Page 243-266

Warehouse service is a business sector which plays a significant role in addressing some changes in logistic trend, potentials of trade growth, and the needs of efficiency as a result of services trade liberalization. This study aims at finding out positions and enabling factors which affect warehouse services performance. These are needed to formulate an effective policy since warehouse services operation is inter-sectoral. SWOT analysis is used to analyse the positions of warehouse services, and Structural Equation Modeling (SEM) is used to identify enabling factors of warehouse services. SWOT analysis shows that warehouse services in Indonesia needs to be expanded by human resource development, technology, and warehousing cluster policy in order to grab maximum opportunities. The results of Structural Equation Modeling with Partial Least Square finds tax shows that tax policy variable and regional wage appears to be the most significant variable that supports expansion of warehouse

services. Therefore, any policies that potentially cause double taxation, such as the imposition of income tax of one product in every logistic process must be eliminated. Besides, regional minimum wage should not be increased as it would hamper the business expansion.

Keywords: Warehouse Services, Logistic, SWOT, SEM with PLS.

Determinan dan Ekuivalen Tarif Impor Jasa Finansial dan Asuransi Negara RCEP

Determinants and Tarrif Equivalent of Import in Finance and Insurance Services in RCEP Countries

Meidah Azhari, Widyastutik

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia
e-mail: meidazhari@gmail.com

Naskah diterima: 02/08/2016 Naskah direvisi: 14/09/2016 Disetujui diterbitkan: 07/10/2016

Abstrak

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan bentuk kerjasama yang diinisiasi ASEAN pada tahun 2012. Jasa finansial dan asuransi merupakan salah satu sektor jasa yang memiliki peran penting terhadap stabilitas perekonomian dunia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi impor jasa finansial dan asuransi serta melakukan estimasi ekuivalen tarif untuk melihat seberapa besar hambatan dalam perdagangan jasa pada masing-masing negara RCEP. Penelitian ini menggunakan pendekatan *gravity model* dengan analisis regresi data panel. Data yang digunakan bersumber dari data dasar *Global Trade Analysis Projects (GTAP)* dan *Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB, jarak, bahasa, dan sejarah kolonial signifikan memengaruhi impor. Estimasi ekuivalen tarif menunjukkan bahwa Selandia Baru, Filipina, RRT, India, dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki hambatan perdagangan paling tinggi. Kesamaan bahasa dan sejarah kolonial merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perdagangan. Untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa asing serta menjalin hubungan yang baik antara negara yang memiliki kesamaan sejarah kolonial.

Kata kunci: Perdagangan Jasa, Finansial dan Asuransi, Hambatan Perdagangan, *Gravity Model*, RCEP

Abstract

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a framework agreement which was initiated by ASEAN on 2012. Financial and insurance service is a service sector which has an important role in the world economic stability. The purpose of this study is to analyze the determinants of import in financial and insurance services, and to estimate tariff equivalent in each member of RCEP. This study employs Gravity model approach with regression analysis of panel data. The data were obtained from *Global Trade Analysis Projects (GTAP)* and *Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII)*. The results indicate that GDP, distance, common language, and common colony have a significant effect on import. The estimation of tariff equivalent shows that New Zealand, Philippines, RRT, India, and South Korea are countries with the highest trade barriers. This study concludes that the similarities of language and historical background among countries are the factors that have the highest influence in trade. Therefore, increasing the use of foreign language and establishing better relationships between countries with the same colonial history are crucial to be done.

Keywords: Trade in Services, Finance and Insurance, Trade Barriers, Gravity Model, RCEP

JEL Classification: G20, G22, F10, F13, F14

PENDAHULUAN

Globalisasi dalam perdagangan internasional mengarah pada pembentukan kelompok dagang dalam suatu kawasan tertentu. Hal tersebut terlihat dalam pembentukan kerjasama *Free Trade Area* (FTA) antar negara dalam suatu kawasan yang bertujuan untuk memperluas akses pasar barang dan jasa serta meningkatkan integrasi perdagangan antar negara. Pada tahun 1992, ASEAN melalui AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) berupaya mewujudkan suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN.

Perkembangan selanjutnya muncul berbagai kerjasama antara ASEAN dengan negara partner dagang utama (ASEAN+1) seperti ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN-India FTA (AIFTA), ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP), dan ASEAN-Republic of Korea (AKFTA). Faktanya, kerjasama regional ASEAN+1 FTA hingga kini belum mencapai taraf liberalisasi perdagangan yang cukup signifikan sehingga dampak atau manfaat yang diperoleh dari ASEAN+1 FTA belum terlalu besar terhadap masing-masing negara (Fukunaga & Isono, 2013).

Dalam rangka mencapai liberalisasi perdagangan pada tahun 2012, ASEAN

menginisiasikan suatu kerjasama regional komprehensif yang memiliki komitmen tinggi dalam mencapai liberalisasi perdagangan. Kerangka kerjasama ini disebut *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang terdiri dari sepuluh negara ASEAN dan 6 mitra FTA ASEAN yaitu RRT, Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru. Negara RCEP memiliki potensi dan sumber daya yang melimpah, dengan total populasi penduduk mencapai 3 miliar (45% dari populasi dunia) serta total GDP yang berkisar pada USD 17,23 triliun (40% terhadap GDP dunia) maka kerangka kerjasama RCEP memberikan suatu kekuatan bagi ASEAN dan Asia Timur untuk menjadi suatu blok ekonomi yang dapat menguasai sebagian besar perdagangan dunia (Kemendag, 2014).

Salah satu fokus dalam ruang lingkup kerjasama RCEP ialah perdagangan jasa (*trade in services*). Sektor jasa merupakan bagian penting dalam perekonomian suatu negara dan dunia. Kontribusi sektor jasa tidak hanya meningkatkan perekonomian suatu negara, tetapi dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan usaha seperti ditunjukkan pada data World Bank yaitu rata-rata mencapai 30% serta memberikan nilai tambah yang tinggi yaitu sebesar 70,87% terhadap GDP dunia pada tahun 2011. Berdasarkan data *World Development Indicators*,

rasio perdagangan jasa di dunia pada tahun 2014 masih cukup rendah yaitu hanya mencapai 13,23% terhadap GDP dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perdagangan jasa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rasio perdagangan barang yang telah mencapai hampir separuh GDP dunia. Secara keseluruhan, pola perdagangan jasa negara RCEP mengalami defisit dalam neraca perdagangannya.

Sektor jasa finansial dan asuransi merupakan bagian dari sektor jasa yang memiliki peranan penting terhadap perekonomian. Berdasarkan data dari UNCTAD, rasio dari jasa finansial dan asuransi pada negara RCEP kurang dari 8% terhadap total perdagangan jasa. Meskipun demikian, sektor tersebut memiliki peranan dominan terhadap stabilnya perekonomian dunia, dimana berbagai aktivitas ekonomi saat ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor keuangan. Melalui fungsi intermediasi maupun manajemen resiko, sektor jasa finansial dan asuransi menjadi salah satu motor pembangunan perekonomian yang semakin global.

Perdagangan jasa yang dilakukan pada sektor jasa finansial dan asuransi mengikuti mode penawaran (*mode of supply*) dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS), yang meliputi: (1) *cross border supply* (mode 1): jasa disuplai dari satu wilayah negara

ke wilayah negara lainnya, seperti transaksi menggunakan *e-banking*; (2) *consumption abroad* (mode 2): jasa yang disuplai dalam suatu wilayah negara untuk dikonsumsi oleh konsumen dari luar negeri, contohnya konsumsi terhadap produk atau layanan jasa yang diperoleh di luar negeri; (3) *commercial presence* (mode 3): kehadiran perdagangan, atau investasi asing di bidang jasa, contohnya yaitu pendirian cabang-cabang bank atau perusahaan asuransi asing di dalam negeri; (4) *movement of natural person* (mode 4): perpindahan orang sebagai pemasok jasa dari satu negara ke negara lainnya, contohnya penggunaan tenaga kerja asing profesional di dalam negeri seperti halnya komisaris dan direksi, pejabat eksekutif, dan tenaga ahli seperti konsultan, akuntan, dan aktuaris.

Salah satu tujuan utama dalam kesepakatan kerjasama RCEP ialah untuk mencapai pasar yang liberal serta integrasi perdagangan yang tinggi antar negara anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui RCEP akan dirumuskan suatu kesepakatan atau negosiasi antar negara anggota dalam rangka menghapuskan berbagai hambatan perdagangan yang ada. Permasalahannya ialah adanya perbedaan setiap komitmen negara terhadap keterbukaan sektor jasanya dapat menjadi salah satu faktor yang

menghambat perdagangan jasa internasional, dimana setiap regulasi yang berlaku memberikan pembatasan ataupun diskriminasi terhadap pemasok jasa asing untuk memasuki atau beroperasi dalam pasar domestik. Selain itu, karena karakteristik perdagangan sektor jasa tidak seperti perdagangan barang, maka akan sangat sulit mengkuantifikasi dampak kebijakan terhadap perdagangan jasa. Hal ini disebabkan ukuran *ad valorem* yang transparan seperti tarif dalam barang sangat jarang ditemukan di sektor jasa (Shepherd & Marel, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka studi ini akan menganalisis: (1) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi impor jasa finansial dan asuransi pada negara RCEP? dan (2) seberapa besar hambatan perdagangan pada impor jasa finansial dan asuransi yang dikenakan oleh masing-masing negara RCEP? Studi ini menggunakan *gravity model* untuk menganalisis faktor yang memengaruhi nilai impor serta perhitungan ekuivalen tarif menggunakan *metode quantity based measure*.

METODE

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis regresi data panel dengan *gravity model* digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nilai impor jasa finansial dan asuransi pada negara RCEP. Pendekatan impor digunakan

untuk melihat seberapa besar hambatan perdagangan yang dikenakan oleh negara importir. Perhitungan ekuivalen tarif juga digunakan untuk melihat seberapa besar hambatan bukan tarif yang dikenakan oleh masing-masing negara RCEP terhadap partner dagangnya.

Gravity model digunakan untuk mengukur perdagangan berdasarkan jarak antar negara secara makroekonomi. Model ini pertama kali diterapkan oleh Tinbergen (1962) untuk meneliti aliran perdagangan internasional. Pada penelitian ini, digunakan model standar *gravity model* (GDP nominal, jarak geografis) dengan menambahkan *variabel dummy* yang dapat mencerminkan biaya transaksi dan informasi dalam perdagangan yaitu kesamaan bahasa (*common language ethno*) dan kesamaan sejarah kolonial (*common colony*).

Proksi ukuran ekonomi (*economy size*) yang digunakan dalam penelitian ini ialah PDB nominal. Semakin baik atau besar perekonomian suatu negara maka kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan akan permintaan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah semakin baik, begitu pula dengan kinerja perdagangannya dalam lingkup global dimana terdapat kecenderungan bahwa semakin kaya suatu negara maka akan melakukan perdagangan yang lebih besar dibandingkan

dengan negara miskin. Adapun kelemahan dalam penggunaan PDB nominal pada penelitian ini ialah tidak memperhitungkan adanya pengaruh inflasi.

Selain menggunakan ukuran ekonomi, komponen utama lainnya dalam analisis *gravity model* ialah jarak. Jarak merupakan faktor geografis yang memberikan pengaruh terhadap biaya transportasi (*transportation cost*) dalam perdagangan suatu negara. Jarak geografis merupakan satuan yang tetap atau konstan, dan diukur berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur dari aglomerasi kota-kota penting yang memiliki populasi penduduk tinggi. Krugman (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara variabel jarak dengan kinerja perdagangan. Semakin jauh jarak yang ditempuh dalam perdagangan antar negara maka akan meningkatkan biaya transportasi yang ditimbulkan sehingga ada kecenderungan akan menurunkan nilai perdagangan diantara kedua negara. Penelitian ini menggunakan variabel jarak geografis sehingga menunjukkan nilai atau ukuran yang konstan atau tetap.

Korelasi yang positif pada variabel PDB negara eksportir dan importir terhadap nilai perdagangan jasa ditemukan pada penelitian Park (2002), Walsh (2006), Callaghan & Uprasen (2008), dan Kaur (2011).

Hasil estimasi variabel jarak geografis pada penelitian Walsh (2006) tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap nilai perdagangan, namun pada penelitian Park (2002), Starck (2012) dan Trabelsi (2013) variabel jarak signifikan berpengaruh negatif, sedangkan korelasi yang positif juga ditemukan pada penelitian Callaghan & Uprasen (2008).

Bahasa merupakan salah satu variabel non-ekonomi yang secara tidak langsung dapat memengaruhi aliran perdagangan bilateral. Dua negara yang saling menggunakan bahasa yang sama akan melakukan perdagangan dua hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan negara lain yang tidak menggunakan bahasa yang sama (Helliwel, 2000). Variabel bahasa mencerminkan biaya transaksi dalam perdagangan, adapun beberapa penelitian yang menunjukkan adanya korelasi positif antara bahasa dan nilai perdagangan ialah; Park (2002), Walsh (2006), Lejour & Verheijden (2004), Rahman (2009), Sandberg (2011), Trabelsi (2013), De (2013) serta Theie (2014).

Selain bahasa, variabel non-ekonomi lainnya yang dapat mencerminkan biaya transaksi dan informasi dalam perdagangan ialah sejarah kolonial. Kesamaan dalam sejarah kolonial suatu negara diduga dapat mengurangi biaya transaksi

atau informasi yang disebabkan oleh hadirnya perbedaan budaya (*cultural differences*) (Suvankulov & Ali, 2012). Baier & Bergstrand (2004), Bexter & Kouparitsas (2006) menemukan bahwa faktor budaya dan politik tersebut signifikan berpengaruh terhadap volume perdagangan. Kesamaan sejarah kolonial antara Vietnam dan Uni Eropa memiliki korelasi yang positif terhadap perdagangan (Pham et al, 2014) dan Theie (2014).

Sedangkan dalam penelitian Kwentua (2006) sejarah kolonial dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap perdagangan. Korelasi positif ditemukan pada sejarah kolonial antara Kanada dan Inggris serta Karibia dan Uni Eropa. Namun, sejarah kolonial antara Inggris dan Afrika Selatan menunjukkan korelasi yang negatif, sehingga berimplikasi terhadap penurunan dalam perdagangan bilateral. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh politik apartheid antara kedua negara.

Penggunaan *gravity model* pada penelitian ini mengacu pada penelitian Callaghan & Uprasen (2008) dengan menambahkan variabel *dummy* yang mencerminkan biaya transaksi dan informasi pada perdagangan yaitu bahasa dan sejarah kolonial seperti yang dilakukan pada penelitian Park (2002), Walsh (2006), Suvankulov & Ali (2012), Trabelsi (2013), dan Theie

(2014). Persamaan *gravity model* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Model 1

$$\text{LNFINANSIAL}_{ijt} \dots\dots = \alpha_0 + \beta_1 \text{LNPDB}_{it} + \beta_2 \text{LNPDB}_{jt} + \beta_3 \text{LNJARAK}_{ij} + \text{BAHASA}_{ij} + \text{SEJARAH}_{ij} + \varepsilon_{ijt} \dots\dots\dots (1)$$

Model 2

$$\text{LNASURANSI}_{ijt} \dots\dots = \alpha_0 + \beta_1 \text{LNPDB}_{it} + \beta_2 \text{LNPDB}_{jt} + \beta_3 \text{LNJARAK}_{ij} + \text{BAHASA}_{ij} + \text{SEJARAH}_{ij} + \varepsilon_{ijt} \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

- α_0 = intersep
- $\beta_1 - \beta_3$ = koefisien variabel-variabel independen
- LNFINANSIAL_{ijt} = nilai impor jasa finansial negara i dari negara j (%)
- LNASURANSI_{ijt} = nilai impor jasa asuransi negara i dari negara j (%)
- LNPDB_{it} = PDB nominal negara importir (%)
- LNPDB_{jt} = PDB nominal negara eksportir (%)
- LNJARAK_{ij} = jarak geografis antarnegara (%)
- BAHASA_{ij} = kesamaan bahasa yang digunakan antarnegara (nilai "1" jika kedua negara menggunakan bahasa yang sama dan "0" jika kedua negara tidak menggunakan bahasa yang sama)

SEJARAH_{ij} = kesamaan sejarah kolonial antarnegara (nilai “1” jika kedua negara memiliki kesamaan sejarah kolonial dan nilai “0” jika kedua negara tidak memiliki kesamaan sejarah kolonial)

ε_{ijt} = error

t = time series

Estimasi perhitungan ekuivalen tarif

Perhitungan terhadap ekuivalen tarif pada penelitian ini menggunakan metode *quantity based measure*. Aliran perdagangan potensial dapat diperoleh sesudah parameter diestimasi dalam persamaan *gravity model* yang digunakan. *The fitted trade flow* dari *gravity model* dispesifikasikan sebagai aliran perdagangan potensial antar negara. Perbedaan aliran perdagangan potensial dan aktual menunjukkan indikasi adanya *tariff equivalent* NTBs Park (2002), Walsh (2006), Anggoro (2015), Karatri (2015), dan Sari & Widyastutik (2015). Secara umum rumus hambatan nontarif (Callaghan & Uprasen, 2008) yaitu :

$$(T_{ij} - 1) = \left(\frac{x_{aij} - x_{pij}}{x_{ab} - x_{pb}} \right)^{-1/e} - 1 \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

(T_{ij} -1) = Hambatan nontarif negara yang diberlakukan negara i kepada negara j

X_{aij} = Nilai impor aktual negara i dari negara j (USD)

X_{pij} = Nilai impor potensial negara i dari negara j (USD)

X_{ab} = Nilai impor aktual negara *benchmark* (USD)

X_{pb} = Nilai impor potensial negara *benchmark* (USD)

Negara yang dijadikan *benchmark* ialah negara dengan selisih nilai perdagangan aktual dan potensial yang terkecil. Gap antara nilai perdagangan actual dan potensial terkecil mengindikasikan rendahnya hambatan non tariff pada negara tersebut.

e = Elastisitas substitusi sektor jasa yang diperoleh hasil penelitian Park (2002) dan menunjukkan elastisitas substitusi bernilai sebesar 5.6.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari PDB nominal, jarak geografis, nilai impor jasa finansial dan asuransi, *dummy* bahasa (*common language etno*), dan *dummy* sejarah kolonial (*common colony*). Sumber data yang digunakan berasal dari data dasar GTAP dan *Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales* (CEPII). Penyajian data dalam bentuk data panel yang menggabungkan data *time series* pada empat periode waktu (2001, 2004, 2007, dan 2011) serta 132 *cross section* negara anggota RCEP, yang terdiri dari Australia, RRT, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dikarenakan keterbatasan data dasar yang tersedia maka analisis terhadap negara RCEP dilakukan tanpa mengikutsertakan negara Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Tabel 1. Jenis dan Sumber Data

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Nilai Impor Finansial	FINANSIAL	USD	GTAP
Nilai Impor Asuransi	ASURANSI	USD	GTAP
PDB nominal	PDB	USD	GTAP
Jarak	JARAK	Kilometer	CEPII
Bahasa	BAHASA	-	CEPII
Sejarah Kolonial	SEJARAH	-	CEPII

Definisi Variabel Operasional

Definisi atau batasan terhadap variabel yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Bruto (PDB) nominal adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa yang diukur berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada tahun tersebut.
2. Jarak adalah faktor geografis yang memberikan pengaruh terhadap biaya transportasi. Jarak geografis suatu negara merupakan satuan yang tetap atau konstan, dan diukur berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur dari aglomerasi kota-kota penting yang memiliki populasi penduduk tinggi
3. Bahasa atau *Common language etno* (*comlang_etno*) merupakan variabel *dummy* yang dideskripsikan sebagai kesamaan bahasa yang digunakan oleh kedua negara yang melakukan perdagangan, dimana setidaknya terdapat 9% dari

populasi penduduk di kedua negara menggunakan bahasa yang sama. Bahasa yang digunakan tersebut merupakan bahasa resmi suatu negara (*official language*), bahasa penduduk asli (*native language*), bahasa yang digunakan sehari-hari (*spoken language*), maupun bahasa yang digunakan dalam melakukan transaksi bisnis (*commercial language*). Nilai “1” jika kedua negara menggunakan Bahasa yang sama dan “0” jika kedua negara tidak menggunakan bahasa yang sama

4. Sejarah kolonial atau *Common colony* (*comcol*) merupakan variabel *dummy* yang menunjukkan hubungan antara negara yang merupakan sama-sama bekas jajahan atau berada dibawah kolonialisasi yang sama diatas tahun 1945. Warisan yang diberikan pada masa penjajahan dapat berupa bahasa, budaya maupun aspek-aspek sosial, politik, maupun ekonomi yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terbentuknya

kelembagaan yang ada saat ini. Nilai “1” jika kedua negara memiliki kesamaan sejarah kolonial dan nilai “0” jika kedua negara tidak memiliki kesamaan sejarah kolonial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Impor Jasa Finansial dan Asuransi Negara RCEP

Perkembangan impor jasa finansial dan asuransi antar negara RCEP ditunjukkan pada Tabel 2. Sumber data yang digunakan berasal dari data GTAP, hal ini dikarenakan data yang berasal dari GTAP secara lengkap menampilkan nilai impor setiap negara berdasarkan *trade flow* dengan mitra dagang suatu negara. Tabel 2 menunjukkan perkembangan impor yang hanya berasal dari negara

RCEP. Pada periode tahun 2001, 2004, 2007, dan 2011 secara garis besar pertumbuhan nilai impor baik pada jasa finansial maupun asuransi mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun terdapat penurunan pada periode waktu tertentu.

India merupakan negara dengan importir jasa finansial terbesar dari RCEP yang memiliki pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan yang tinggi ditunjukkan dengan nilai impor jasa finansial pada tahun 2001 sebesar USD 10.03 juta dan mencapai USD 802.5 juta di tahun 2011. Pada jasa asuransi, RRT merupakan negara yang memiliki pertumbuhan impor yang tinggi. Pada tahun 2001 nilainya sebesar USD 129.65 juta dan mencapai USD 2535.17 juta pada tahun 2011. Di sisi lain,

Tabel 2. Perkembangan Impor Jasa Finansial dan Asuransi Negara RCEP (juta USD)

Negara	Tahun							
	2001		2004		2007		2011	
	Finance	Insurance	Finance	Insurance	Finance	Insurance	Finance	Insurance
Indonesia	11.51	28.36	72.37	27.00	71.93	52.48	89.51	65.14
Malaysia	15.71	13.42	27.28	30.79	56.19	56.18	69.93	69.71
Singapura	18.37	46.03	88.54	92.33	347.41	539.3	474.93	1194.79
Vietnam	47.44	42.42	26.33	17.34	54.86	29.16	68.24	36.18
Thailand	12.37	59.94	19.08	69.71	55.91	118.94	69.58	147.56
Filipina	9.697	11.51	12.60	12.92	33.78	21.23	42.03	26.34
RRT	38.78	129.65	69.86	284.39	290	2071.57	427.26	2535.17
Jepang	139.98	219.99	359.40	322.87	625.29	340.22	656.94	480.56
Korea	34.58	20.77	76.59	139.11	285.22	291.84	428.45	350.13
India	10.03	43.97	161.06	62.18	477.21	702.46	802.57	643.22
Australia	34.32	38.71	86.15	76.91	150.69	182.88	170.11	230.58
Selandia Baru	7.38	9.29	40.37	56.74	70.06	73.73	62.11	108.55

Sumber: GTAP

Filipina menjadi negara dengan impor jasa finansial dan asuransi terkecil dengan nilai masing masing mencapai USD 42.03 juta dan USD 26.34 juta pada tahun 2011. Dalam lingkup negara ASEAN, Singapura merupakan negara ASEAN dengan nilai impor jasa finansial dan asuransi tertinggi, yaitu sebesar USD 474.93 juta dan USD 1194.79 juta pada tahun 2011 (Tabel 2).

PDB Negara RCEP

Perkembangan PDB nominal negara RCEP seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2001, 2004, 2007, dan 2011. Total PDB negara RCEP secara keseluruhan mencapai 40% terhadap PDB dunia. Adapun dua besar negara yang memiliki PDB tertinggi yaitu RRT dan Jepang dengan presentase masing masing sebesar 36% dan 29% terhadap total PDB negara RCEP di tahun 2011 (Tabel 3).

Tabel 3. PDB Nominal Negara RCEP (juta USD)

Negara	Tahun			
	2001	2004	2007	2011
Indonesia	145.30	254.70	432.21	845.92
Malaysia	88.04	114.89	193.55	289.25
Filiphina	71.43	84.47	149.36	224.09
Thailand	114.68	161.69	246.97	345.66
Singapura	84.85	106.81	179.98	274.06
RRT	1159.03	1674.12	3494.04	7321.87
Jepang	4177.57	4658.73	4356.34	5905.63
Korea	427.64	676.49	1122.67	1202.46
Vietnam	32.72	43.02	77.41	135.53
Australia	357.36	637.79	853.95	1387.01
India	477.34	641.25	1238.7	1880.10
Selandia Baru	50.56	96.44	135.29	163.84

Sumber : GTAP

Bahasa

Negara RCEP memiliki keragaman dalam bahasa yang digunakan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi (*official language*) pada beberapa negara seperti Australia, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru. Penggunaan bahasa Inggris juga mengalami peningkatan seperti pada negara Korea Selatan, Thailand maupun Vietnam. Hal ini dikarenakan bahwa bahasa Inggris menjadi bahan ajar utama pada sekolah maupun perguruan tinggi di Korea Selatan, dan menjadi bahasa kedua (*secondary language*) yang banyak digunakan oleh kaum elit di Thailand dan Vietnam. Untuk Indonesia sendiri, bahasa resmi yang digunakan ialah Bahasa Indonesia sedangkan untuk bahasa minoritas yang digunakan salah satunya ialah Bahasa Inggris, dan Belanda.

Sejarah Kolonial

Sebagian besar negara RCEP telah mengalami masa penjajahan, kecuali negara RRT, Jepang, dan Thailand. Tabel 5 menunjukkan hari kemerdekaan maupun sejarah kolonialisasi yang pernah dialami masing-masing negara RCEP. Adapun beberapa negara yang menjadi penjajah pada negara RCEP ialah negara Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Perancis, Portugis, Spanyol, dan lainnya.

Tabel 4. Penggunaan Bahasa pada Negara RCEP

Negara	Bahasa
Australia	Inggris (resmi), Mandarin, Italia, Arab, Yunani, Kantonis (Hong Kong), Vietnam.
RRT	Mandarin (resmi)
Filipina	Filipina (resmi), Inggris (resmi)
India	Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Punjabi, Assamese, Maithili.
Indonesia	Bahasa Indonesia (resmi, modifikasi dari bahasa melayu), Inggris, Belanda.
Jepang	Jepang (resmi)
Korea Selatan	Korea (resmi), Inggris (banyak diajarkan pada sekolah dan perguruan tinggi)
Malaysia	Melayu (resmi), Inggris, Mandarin, Tamil (India), Telugu, Malayalam, Punjabi, Thailand.
Selandia Baru	Inggris (resmi), Maori (resmi), Samoa (Amerika Serikat), Hindi (India), Perancis, Mandarin, Yue (Hong Kong)
Thailand	Thailand (resmi), Burma (Myanmar), Inggris (mulai banyak digunakan pada golongan elit)
Vietnam	Vietnam (resmi), Inggris (mulai digunakan sebagai <i>second language</i>), Perancis, Mandarin, Khmer (Kamboja)

Sumber : CIA World Factbook (2016)

Tabel 5. Hari Kemerdekaan dan Sejarah Kolonial Negara RCEP

Negara	Hari Kemerdekaan / Sejarah Kolonialisasi
Australia	1 Januari 1901 (dari federasi Inggris)
RRT	1 Oktober 1949 (pendirian RRC; sebelumnya dikenal dengan Dinasti Qin 221 SM)
Filipina	4 Juli 1946 (dari Amerika Serikat)
India	15 Agustus 1947 (dari federasi Inggris)
Indonesia	17 Agustus 1945 (deklarasi kemerdekaan)
Jepang	3 Mei 1947 (Konstitusi Meiji)
Korea Selatan	15 Agustus 1945 (dari Jepang)
Malaysia	31 Agustus 1957 (dari federasi Inggris)
Selandia Baru	26 September 1907 (dari federasi Inggris)
Singapura	9 Agustus 1965 (dari federasi Malaysia)
Thailand	1238 (tahun berdiri, tidak pernah dijajah)
Vietnam	2 September 1945 (dari Perancis)

Sumber : CIA World Factbook (2016)

Komitmen Sektor Jasa Finansial dan Asuransi dalam Kerangka RCEP

Berdasarkan dokumen GATS, sektor jasa keuangan terdiri dari *banking and other financial services dan insurance services*. Adapun ruang lingkup dalam kedua sektor jasa tersebut ialah *banking and other financial services* terdiri dari *corporate banking, derivatives, foreign exchange trading, pensions, investment fund management, advisory and consultancy services, securities trading, venture capital, wholesale and retail banking, financial leasing, dan money*. Sedangkan pada *insurance services* yang terdiri dari *direct insurance (life and non life insurance); reinsurance and retrocession; insurance intermediation atau broker insurance; service auxiliary to insurance (consultancy, actuarial, risk assessment)* dan *claim settlement services*.

Pilar utama dan ketentuan dalam persetujuan GATS berlaku terhadap semua sektor jasa termasuk pada jasa finansial dan asuransi. Adapun dalam persetujuan GATS terdapat beberapa aturan dan kewajiban khusus yang berlaku pada sektor jasa finansial dan asuransi dimana pemerintah harus mengimplementasikannya untuk membebaskan akses penyedia jasa asing di dalam negeri. Hal tersebut mencakup:

Kewajiban umum, dimana setiap negara harus mengimplementasikannya

meskipun belum meliberalisasikan sektor jasa (finansial dan asuransi) dibawah komitmen GATS: (1) perlakuan sama terhadap semua penyedia jasa (finansial dan asuransi) asing (*Most Favoured Nation / MFN*) (Pasal II); (2) transparansi, yaitu dengan mewajibkan semua negara anggota mempublikasikan semua peraturan perundangan, pedoman pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan umum yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Pasal III); (3) peningkatan partisipasi negara berkembang melalui peningkatan kapasitas jasa dalam negeri dan efisiensi serta daya saing sektor jasa dalam negeri antara lain melalui akses kepada teknologi secara komersial, serta mewajibkan negara maju untuk mendirikan "*contact point*" untuk membantu negara berkembang dalam mengakses informasi mengenai pasar masing-masing negara maju (Pasal IV).

Kewajiban khusus, diterapkan pada sektor jasa (finansial dan asuransi) yang telah diliberalisasikan atau yang telah dikomitmenkan dalam skedul GATS, antara lain : (1) ketentuan yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada penyediaan jasa (finansial dan asuransi) harus dilaksanakan dalam cara yang wajar, objektif, dan tidak memihak (Pasal VI ayat 1, 2, 3); (2) menjamin agar tindakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur, standar lisensi dan persyaratan perizinan

bukan digunakan sebagai hambatan perdagangan (Pasal VI ayat 4, 5); (3) suatu negara dilarang menerapkan pembatasan pada lalu lintas pembayaran untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perdagangan jasa (finansial dan asuransi) (Pasal XI), kecuali pada keadaan tertentu seperti terjadi permasalahan pada neraca pembayaran dan keuangan luar negeri (Pasal XII); (4) tidak ada aturan yang membatasi lingkup operasional atau kepemilikan dari sektor jasa (finansial dan asuransi) asing (Pasal XVI); (5) perlakuan yang sama terhadap jasa dan pemasok dari negara lain (Pasal XVII); (6) suatu negara diperbolehkan merubah atau menarik komitmen yang tercantum dalam *schedule of commitment* nya setelah tiga tahun berlakunya persetujuan (Pasal XXI).

Annex on Financial Services merupakan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai liberalisasi sektor

jasa keuangan yang tidak terpisahkan dari GATS, dimana di dalamnya terdapat aturan yang mengizinkan suatu negara untuk mengambil tindakan prudential dengan tujuan untuk melindungi investor, depositor, pemegang saham atau orang yang menyerahkan *fiduciary duty* kepada pemasok jasa keuangan untuk menjamin integritas dan stabilitas dari sistem keuangan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Impor Jasa Finansial dan Asuransi

Dalam penggunaan metode data panel, apabila terdapat variabel yang konstan setiap waktu seperti jarak, lokasi, dan *variabel dummy* maka model yang cocok digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil uji *Breusch Pagan-test* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Random Effects Model*.

Tabel 6. Hasil Output Gravity Model

Dependent Variable	LNFINSIAL	LNASURANSI
Independent Variable		
LNPDBi	0.6982*	0.7069*
LNPDBj	0.6287*	0.2609*
LNJARAK	-0.2509**	-0.2520***
BAHASA	0.5848*	0.4495**
SEJARAH	0.8809**	1.3654*
C	-11.602	-8.7393
R-squared	0.5228	0.3574
F-stat	114.421	58.0669
Prob (F-stat)	0.0000	0.0000

Keterangan: * signifikan pada taraf nyata 1 %

** signifikan pada taraf nyata 5 %

*** signifikan pada taraf nyata 10 %

Pada Tabel 6, hasil estimasi pada model 1 memiliki nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) sebesar 0.5228. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 52.28% keragaman nilai impor jasa finansial dari negara RCEP dapat dijelaskan oleh variabel independen di dalam model. Sedangkan nilai koefisien determinasi pada model 2 adalah sebesar 0.3574, artinya keragaman dalam nilai impor jasa asuransi negara RCEP dapat dijelaskan oleh variabel independen di dalam model sebesar 35.74%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Nilai probabilitas (*F-statistic*) pada kedua model adalah 0.0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata satu persen. Hal ini menunjukkan bahwa, pada taraf nyata 1%, sekurang-kurangnya ada satu dari variabel PDB nominal negara importir, PDB nominal negara eksportir, jarak geografis, bahasa, dan sejarah kolonial yang signifikan memengaruhi nilai impor jasa finansial dan asuransi pada negara RCEP. Sedangkan hasil uji-t menunjukkan bahwa pada taraf nyata 10%, variabel PDB nominal negara importir, PDB nominal negara eksportir, jarak geografis, bahasa dan sejarah kolonial secara parsial signifikan memengaruhi nilai impor jasa finansial dan asuransi pada negara RCEP. PDB negara RCEP menunjukkan hasil yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai impor jasa finansial dan

asuransi. Pada sisi *demand*, hasil estimasi Model 1 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB negara importir sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai impor jasa finansial sebesar 0.69%. Hal yang sama berlaku pada hasil estimasi Model 2 bahwa setiap kenaikan PDB negara importir sebesar 1% maka nilai impor asuransi akan mengalami peningkatan sebesar 0.70% (*ceteris paribus*). Korelasi positif antara PDB importir terhadap nilai impornya menunjukkan bahwa, semakin besar pendapatan negara, maka semakin tinggi kemampuan untuk mengimpor. Sedangkan pada sisi supply, hasil estimasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB negara eksportir sebesar 1% akan meningkatkan nilai impor jasa finansial dan asuransi pada negara importir masing masing sebesar 0.62% dan 0.26%.

Variabel jarak geografis secara signifikan berpengaruh negatif terhadap nilai impor jasa finansial dan asuransi negara RCEP (pada taraf nyata 5% dan 10% secara berturut-turut). Hal ini menunjukkan bahwa variabel jarak geografis berpengaruh nyata terhadap nilai impor jasa finansial dan asuransi pada negara RCEP. Setiap peningkatan 1% pada jarak geografis antara negara yang melakukan perdagangan, maka akan menurunkan nilai impor jasa finansial dan asuransi sebesar 0.25%, *ceteris paribus*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak

geografis antar negara yang melakukan perdagangan, maka nilai perdagangan akan menurun dikarenakan tingginya biaya transportasi yang diperlukan dalam menempuh jarak tersebut.

Variabel *Dummy* yang menunjukkan kesamaan bahasa menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap nilai impor jasa finansial dan asuransi. Pada sektor jasa finansial, negara yang memiliki kesamaan bahasa yang digunakan memiliki nilai impor jasa finansial 58,84% lebih besar dibandingkan negara lain yang tidak memiliki kesamaan bahasa. Sedangkan pada sektor jasa asuransi, pengaruh tersebut menghasilkan nilai impor jasa asuransi yang 44,95% lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan bahasa dapat menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*) antara dua negara yang melakukan perdagangan karena dengan menggunakan bahasa yang sama, dapat mendukung dan memudahkan proses negosiasi perdagangan. Seperti yang dikutip dalam Helliwel (2000) bahwa dua negara yang saling menggunakan bahasa yang sama akan melakukan perdagangan dua hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan negara lain yang tidak menggunakan bahasa yang sama.

Dummy sejarah kolonial menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap nilai impor jasa finansial

dan asuransi negara RCEP. Pada sektor jasa finansial, negara yang memiliki kesamaan dalam sejarah kolonial memiliki nilai impor jasa finansial 88,09% lebih besar dibandingkan negara yang tidak memiliki sejarah kolonial yang sama. Sedangkan pada sektor jasa asuransi, pengaruh tersebut menghasilkan nilai impor jasa asuransi 136,54% lebih besar pada negara yang memiliki kesamaan sejarah kolonial. Suatu negara yang memiliki sejarah kolonial yang sama memungkinkan untuk menjalin hubungan yang lebih baik sehingga dapat menurunkan *transaction cost* yang diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya (Suvankulov & Ali, 2012).

Estimasi Ekuivalen Tarif

Hasil perhitungan terhadap ekuivalen tarif pada masing-masing negara RCEP secara lengkap disajikan pada Tabel 7 dan 8. Negara yang dijadikan *benchmark* dalam perhitungan ekuivalen tarif ialah negara dengan selisih nilai perdagangan aktual dan potensial yang terkecil sehingga dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki hambatan perdagangan paling rendah (*low restriction*) yaitu negara Thailand terhadap Selandia Baru. Nilai ekuivalen tarif pada jasa finansial setiap negara cukup bervariasi yaitu berada pada kisaran 0.00 hingga 44.44% dan mencapai 51.63% pada jasa asuransi. Sedangkan nilai tarif yang

negatif menunjukkan bahwa adanya pengaruh subsidi atau *financial support* seperti insentif pajak atau asistansi untuk pendirian perusahaan atau biaya operasi (Findlay & Warren, 2000).

Berdasarkan hasil perhitungan, Selandia Baru merupakan negara

yang memiliki ekuivalen tarif terbesar pada impor jasa finansial dengan nilai mencapai 44,44%. Tarif tersebut dikenakan oleh Selandia Baru kepada Korea Selatan (Tabel 8). Selain Selandia Baru, beberapa negara RCEP lainnya yang memiliki nilai rata-rata tarif

Tabel 7. Hasil Perhitungan Ekuivalen Tarif Sektor Jasa Finansial

	IDN	MYS	PHL	THL	SGP	RRT	JPN	KOR	VNM	AUS	IND	NZL
IDN		20.03	13.93	16.93	3.25	13.54	0.79	2.61	-9.75	2.37	9.23	5.40
MYS	9.83		1.55	-5.59	6.22	3.82	-9.89	-14.58	-11.04	-12.80	12.55	-10.94
PHL	23.99	13.14		16.83	5.88	20.91	17.42	23.07	12.77	21.98	37.92	24.82
THL	18.55	12.44	24.70		-7.81	15.03	10.96	4.49	16.49	5.53	20.96	7.85
SGP	-18.46	0.24	-16.67	-22.42		-17.88	-35.92	-26.79	-38.79	-24.61	-25.51	-7.63
RRT	2.13	4.36	10.26	-4.71	-19.00		-3.68	-8.39	1.24	-7.92	16.93	-2.00
JPN	1.60	-6.49	1.17	10.36	-20.70	23.32		5.12	-23.59	10.99	-0.51	41.68
KOR	-10.57	-13.23	4.16	-8.55	-23.32	6.54	-12.92		-25.38	9.46	-1.34	44.44
VNM	4.07	-3.28	0.56	18.02	-21.57	14.89	-11.49	-0.10		-6.60	-5.84	-3.93
AUS	-8.31	-16.09	4.63	-13.16	-31.56	-17.99	-17.63	-14.74	-21.76		-2.26	-27.52
IND	1.92	19.26	22.87	13.46	-7.07	19.53	9.16	9.64	-8.90	15.03		39.32
NZL	7.67	-1.20	22.87	0.00	-9.39	9.05	2.80	8.94	-5.57	-18.33	17.88	

Tabel 8. Hasil Perhitungan Ekuivalen Tarif Sektor Jasa Asuransi

	IDN	MYS	PHL	THL	SGP	RRT	JPN	KOR	VNM	AUS	IND	NZL
IDN		44.90	44.95	18.37	17.25	21.84	30.76	31.38	22.99	28.34	33.76	29.60
MYS	4.52		-3.68	-19.45	3.46	-12.39	-12.21	-13.43	-17.04	-14.75	14.01	-14.35
PHL	45.73	34.86		23.86	17.13	31.25	41.58	50.96	32.72	44.88	51.63	46.21
THL	15.60	9.03	20.37		-12.77	4.00	10.07	7.17	8.74	3.56	14.92	4.71
SGP	-9.34	11.07	-11.95	-35.66		-36.79	-29.58	-21.66	-33.50	-28.62	-19.93	-26.58
RRT	0.61	0.94	6.58	-16.67	-35.37		-0.64	-0.60	-10.48	-3.86	-6.58	3.35
JPN	0.03	-12.40	5.04	-17.07	-26.91	-17.35		-10.62	-11.42	1.96	-3.49	7.12
KOR	3.72	-5.53	18.69	-12.16	-28.70	-7.68	-9.51		-4.21	17.88	15.71	40.74
VNM	11.28	3.61	15.18	-9.28	-20.95	-6.91	5.68	22.11		8.80	0.19	6.15
AUS	-7.64	-16.25	1.98	-25.84	-40.11	-26.71	-10.22	-9.63	-22.00		-5.35	-31.71
IND	-2.87	14.38	7.29	-22.24	-17.09	-30.18	13.74	2.98	-18.64	4.71		7.76
NZL	15.97	4.53	29.83	0.00	-8.20	0.13	6.51	12.87	6.08	-12.72	24.99	

yang cukup tinggi pada jasa finansial terhadap negara partner dagangnya seperti yang ditunjukkan pada tabel ialah Filipina, RRT, dan India.

Sedangkan, pada jasa asuransi nilai ekuivalen tarif tertinggi adalah

India terhadap Filipina dengan nilai mencapai 51,63%. Secara keseluruhan, Singapura merupakan salah satu negara yang paling terbuka dalam sektor jasa finansial dan asuransi. Adapun nilai hambatan terkecil yang dikenakan

oleh Singapura ialah sebesar 3,25% kepada Indonesia pada jasa finansial dan sebesar 3,461% kepada Malaysia pada jasa asuransi.

Posisi Indonesia dalam perdagangan jasa dengan RCEP menunjukkan bahwa keterbukaan dalam sektor jasa finansial dan asuransi masih rendah atau belum *full liberalized*. Hasil perhitungan ekuivalen tarif (Tabel 7 dan 8) menunjukkan bahwa tarif tertinggi dikenakan Indonesia kepada Filipina sebesar 23,99% pada jasa finansial, sedangkan pada jasa asuransi nilai ekuivalen tarif mencapai 45,73%. Namun, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya keterbukaan sektor jasa finansial di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan Filipina dengan nilai rata-rata ekuivalen tarif sebesar 2,95%, begitu halnya dengan jasa asuransi di Indonesia cenderung lebih terbuka dibandingkan Malaysia dan Filipina dengan nilai rata-rata sebesar 7,06%.

Adapun beberapa komitmen Indonesia dalam sektor jasa keuangan pada forum World Trade Organization antara lain badan hukum (*legal entity*) dalam pendirian perusahaan asuransi dan perbankan asing dalam bentuk *joint venture* dengan bank domestik dari Indonesia atau dalam bentuk Perseoran Terbatas (PT). Sementara itu, dalam kepemilikan asing terhadap bank lokal di Indonesia dibatasi

hingga 49%. Pada sektor tersebut, bank asing atau *joint venture bank* di Indonesia diperbolehkan membuka kantor perwakilan di kota-kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang (kini Makassar), Denpasar, Batam, Padang, Manado, dan Ambon.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil estimasi *gravity model*, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai impor jasa finansial dan asuransi pada negara RCEP ialah PDB negara eksportir, PDB negara importir, jarak geografis, kesamaan bahasa, dan sejarah kolonial. Variabel jarak berpengaruh secara signifikan negatif terhadap perdagangan jasa RCEP. Sedangkan variabel lainnya menjadi faktor yang mendorong tumbuhnya perdagangan jasa RCEP. Kesamaan bahasa dan sejarah kolonial merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perdagangan.

Hasil estimasi terhadap estimasi ekuivalen tarif menunjukkan bahwa negara seperti Selandia Baru, Filipina, India dan RRT menerapkan hambatan yang cukup tinggi pada sektor jasa finansial. Sedangkan, pada sektor jasa asuransi nilai ekuivalen tarif tertinggi ada pada negara India dan Korea Selatan. Adapun posisi Indonesia dalam

perdagangan jasa menunjukkan bahwa keterbukaan sektor jasa di Indonesia belum sepenuhnya terbuka atau *full liberalized*, namun Indonesia masih jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Filipina. Di lain pihak, Singapura merupakan salah satu negara RCEP yang paling liberal dalam sektor jasa, hal tersebut dapat dilihat dari nilai ekuivalen tarif yang rendah terhadap negara RCEP lainnya.

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan maka saran yang akan diberikan adalah sebagai berikut: (1) Harmonisasi komitmen setiap negara dalam lingkup RCEP dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengembangkan kinerja perdagangan jasa khususnya diantara negara anggota RCEP, selain itu PDB negara RCEP yang tinggi dan terus mengalami peningkatan dapat menjadi peluang pasar yang potensial bagi Indonesia; (2) Meningkatkan efisiensi dalam infrastruktur perdagangan jasa dengan tujuan untuk mengurangi biaya transportasi yang timbul dalam melakukan transaksi perdagangan jasa; (3) Melihat peranan bahasa yang cukup tinggi dalam memengaruhi perdagangan, maka perlu adanya peningkatan kemampuan dalam penggunaan bahasa asing baik melalui pembelajaran dalam kurikulum sekolah maupun kursus bahasa asing; (4) Menjalinkan hubungan yang baik antara

negara yang memiliki kesamaan sejarah kolonial (senasib sepenajahan) guna memudahkan kesepakatan dan negosiasi khususnya dalam kerjasama perdagangan jasa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para *reviewer* yang telah memberikan saran dalam penyempurnaan artikel ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, R. (2015). Hambatan Non Tarif dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Kakao Indonesia ke Pasar Eropa. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Baier, S.L. & J.H. Bergstrand. (2004). Economic Determinants of Free Trade Agreements. *Journal of International Economics*. 64, 29-63. Diunduh tanggal 8 Juli 2016 dari http://www3.nd.edu/Working_Papers/Economic_Determinants_of_FTAs.pdf
- Bexter, M. & M.A. Kouparitsas. (2006). What Determines Bilateral Trade Flows?. *NBER Working Paper*, 12188. Diunduh tanggal 8 Juli 2016 dari <http://www.nber.org/papers/w12188>
- Callaghan, B & U. Uprasen. (2008). *Impact of The 5th EU Enlargement on ASEAN*. Ireland: Euro-Asia Centre (EAC), Departement of Economics, Kemmy Business School, University of Limerick. Diunduh tanggal 29 April 2016 dari <http://www.ecomod.net/sites/default/files/document-conference/ecomod2008/692.pdf>

- De, P. (2013). Assessing Barriers to Trade in Services in India: an Empirical Investigation. *Journal of Economic Integration*. 28(1): 109-143. Diunduh tanggal 10 Agustus 2016 dari http://www.e-jei.org/upload/JEI_28_1_109_143_2013600006.pdf
- Findlay, C & F. Warren. (2000). Impediments to Trade in Services: Measurement and Policy Implications. London: Routledge. Diunduh tanggal 10 Agustus 2016 dari http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134550173_sample_827999.pdf
- Fukunaga, Y & I. Isono. (2013). Taking ASEAN+1 FTAs Toward the RCEP a Mapping Study. ERIA Discussion Paper. Diunduh tanggal 18 Mei 2016 dari <http://eria.org/ERIA-DP-2013-02>
- Helliwell, J. F. (2000). Language and Trade, Gravity Modelling of Trade Flows and the Role of Language. *Departement of Canadian Heritage*.
- Karatri, R.H. (2015). Estimasi Hambatan Non-Tarif dan Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Kaur, S. (2011). Determinants of Export Services of USA with its Asian Partners: a Panel Data Approach. *Eurasian Journal of Business and Economics*. 4(8): 101-107. Diunduh tanggal 10 Agustus 2016 dari <http://www.ejbe.org/EJBE2011Vol04No08p101KAUR.pdf>
- Kementrian Perdagangan. (2014). Analisis Jasa ICT dalam Kerjasama RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Jakarta: Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan.
- Kwentua, G.E. (2006). Trade Creation and Trade Diversion Effects in the EU-South Africa Free Trade Agreement. Nsukka: University of Nigeria. Diunduh tanggal 20 Mei 2016 dari http://etd.lsu.edu/unrestricted/Kwentua_thesis
- Lejour, A. & Verheijden, J. (2004). Services Trade within Canada and the European Union: What Do They Have In Common?. *CPB Discussion Paper*, No. 42. Diunduh tanggal 27 Mei 2016 dari <http://ideas.repec.org/cpb/discus>
- Park, S.C. (2002). Measuring Tariff Equivalents in Cross Border Trade in Services. *Korea Institute for International Economic Policy Working Paper* No. 02-15.
- Pham, V.N., N.T. Dao & Q.H. Doan. (2014). Analyzing the Determinants of Services Trade Flows Between Vietnam and European Union: A Gravity Model Approach. Hanoi: Hanoi National University. Diunduh tanggal 27 Mei 2016 dari <http://freit.org/TradePatterns/FREIT743.pdf>
- Rahman, M. M. (2009). Australia's Global Trade Potential: Evidence from the Gravity Model Analysis. Queensland: University of Southern Queensland. Diunduh tanggal 10 Mei 2016 dari http://eprints.usq.edu.au/Rahman_OBEC_09_PV.pdf
- Sandberg, O. (2011). Bridging the Atlantic: A Trade Effect Assessment of Services Inclusion in a Canada-EU Trade Agreement. Lund University: School of Economics and Management. Diunduh tanggal 20 Mei 2016 dari <http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/africa-brazil-bridging-final.pdf>
- Sari, KR & Widyastutik. (2015). Faktor yang Memengaruhi dan Estimasi Tarif Ekuivalen NTBs Ekspor Kayu Lapis Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. 9(1): 95-108
- Shepherd, B & E.V.D. Marrel. (2013). International Tradability Indices for Services. Policy Research Working Paper Series 6712, The World Bank. Diunduh tanggal 27 Mei 2016 dari <http://wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/>

2013/11/25/000158349_20131125144
330/Rendered/PDF/WPS6712.pdf

- Starck, S.C. (2012). The Theoretical Foundation of Gravity Modelin: What are the Development that have Brought Gravity Modeling into Mainstream Economics. *Thesis*. Copenhagen: Departement of Economics, Copenhagen Business School. Diunduh pada 10 Agustus 2016 dari http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3335/sarah_catherine_starck.pdf?sequence=1
- Suvankulov, F. & W. Ali. (2012). Recent Trends and Prospects of Bilateral Trade between Pakistan and Turkey: A Gravity Model Approach. *Journal of International and Global Economic Studies*. 5(1):57-72. Diunduh tanggal 9 Mei 2016 dari http://www2.southeastern.edu/index_files/jigesjune2012parktur120412.pdf
- Theie, M.M.G. (2014). Non-tariff Barriers, Trade Integration and The Gravity Model. Tesis. Oslo: Departement of Economics, University of Oslo. Diunduh tanggal 10 Agustus 2016 dari <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40976/Theie-Marcus-Gjems.pdf?sequence=1>
- Tinbergen, J. (1962). *Shaping the World Economy: Suggestion for an International Economic Policy*. New York: Twentieth Century Fund. Diunduh tanggal 10 Agustus 2016 dari <http://repub.eur.nl/pub/16826>
- Trabelsi, I. (2013). Agricultural Trade Face Non-tariff Barriers: a Gravity Model for the Euro-med Area. *Journal of Studies in Social Science*. 3(1) : 20-32. Diunduh tanggal 10 Agustus 2016 dari <http://infinitypress.info/index.php/jsss/article/viewFile/86/75>
- [UNCTAD] United Nations Conference on Trade and Development. Diunduh pada tanggal 29 Mei 2016 dari <http://unctadstat.unctad.org>
- Walsh, K. (2006). Trade in Services: Does Gravity Hold? A Gravity Model Approach to Estimating Barriers to Services Trade. *SSRN Journal IIIS Discussion Paper No. 183*. Diunduh tanggal 12 Mei 2016 dari <http://ideas.repec.org/disap/iiisdp183.pdf>
- World Development Indicator. Diunduh tanggal 16 Mei 2016 dari <http://data.worldbank.org>
- World Trade Organization. (2013). Trade Policy Review Indonesia. Diunduh tanggal 10 Mei 2016 dari <http://docs.wto.org>

PERKIRAAN DAMPAK ASEAN DAN HONG KONG *FREE TRADE AREA* (AHKFTA) TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN INDONESIA

The Estimated Impact of ASEAN and Hong Kong Free Trade Area (AHKFTA) on Indonesia Trade Performance

Dian Dwi Laksani, Aziza Rahmaniar Salam

Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, BPPP, Kementerian Perdagangan,
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, 10110, Indonesia.
e-mail: dian.laksani@kemendag.go.id

Naskah diterima: 13/08/2015 Naskah direvisi: 29/02/2016 Disetujui diterbitkan: 19/06/2016

Abstrak

ASEAN dan Hong Kong sepakat untuk membentuk kerjasama kawasan dalam bentuk ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA). Negosiasi perundingan direncanakan akan selesai pada akhir 2016. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN tentunya berpartisipasi dalam rencana pembentukan AHKFTA. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung seberapa besar dampak berlakunya perjanjian perdagangan barang ASEAN-Hong Kong FTA terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah model *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan menggunakan *Global Trade Analysis Project* (GTAP) versi 8. Kerjasama kawasan ini diharapkan akan menurunkan hambatan perdagangan di semua sektor, khususnya penurunan tarif sebagai representasi penurunan hambatan perdagangan baik di Indonesia maupun di Hong Kong. Penelitian ini melakukan dua simulasi yaitu pemotongan tarif sebesar 50% dan liberalisasi penuh. Hasil simulasi menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh manfaat dari liberalisasi penuh perdagangan FTA ASEAN-Hong Kong baik dari kesejahteraan maupun peningkatan GDP, sedangkan peningkatan *output* hanya terjadi di beberapa sektor yang merupakan komoditi unggulan yaitu *vegetable oil*, *oil seeds*, *wearing apparel*, *textile* dan *electronic equipment*. Penurunan tarif secara bertahap, pemberlakuan proteksi dan peningkatan daya saing bagi sektor yang berdaya saing rendah merupakan kebijakan yang sangat diperlukan.

Kata Kunci : ASEAN-Hong Kong FTA, Perdagangan Indonesia, CGE Model

Abstract

ASEAN and Hong Kong have agreed to establish bilateral cooperation in the form of the ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA). The negotiation process is planned to be completed by the end of 2016. Indonesia as one of ASEAN countries will surely participate in AHKFTA. This study aims to investigate the impact of the bilateral trade agreement of the ASEAN-Hong Kong FTA on the Indonesian trade performance. The analytical method applied in this study is *Computable General Equilibrium* (CGE) using modeling approach of *Global Trade Analysis Project* (GTAP) version 8. This cooperation is expected to reduce the trade barriers in all sectors, such as reducing tariff in order to decrease the trade barriers between Indonesia and Hong Kong. This study conducted two simulations of tariff cuts 50% and full liberalization. The results indicate that Indonesia gained some benefits from full liberalization of ASEAN-Hong Kong FTA in terms of its welfare and the increase of GDP. The increase of output only occurs in few sectors which are categorized as a primary commodity such as *vegetable oil*, *oil seeds*, *wearing apparel*, *textile* and *electronic equipment*. In short, reducing tariff gradually, and reinforcing protection and improvement to a sector having low competitiveness are vital to support Indonesia's trade performance.

Keywords: ASEAN-Hong Kong FTA, Indonesia Trade Performance, CGE Model

JEL Classification: F13, F15, F68

PENDAHULUAN

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. ASEAN diharapkan sebagai basis produksi dunia dan sekaligus pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura tahun 1992. Visi ASEAN 2020 menegaskan ASEAN yang berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN.

Salah satu upaya dalam mencapai visi ASEAN tersebut adalah membentuk kerjasama dengan Hong Kong yang direncanakan dapat diimplementasikan pada tahun 2017. Kerjasama ASEAN - Hong Kong ini dimulai dengan adanya keinginan Hong Kong untuk bekerja sama dengan ASEAN melalui aksesinya pada ASEAN-China FTA. Keinginan Hong Kong ini tidak disetujui oleh ASEAN, sehingga pada *ASEAN Economic Minister (AEM) Retreat* pada bulan Maret 2013 di Hanoi Vietnam, diputuskan untuk bernegosiasi secara bilateral dengan Hong Kong dalam bentuk FTA yaitu ASEAN - Hong Kong (AHKFTA) yang dimulai pada awal 2014. Salah satu komitmen dari pembentukan ASEAN - Hong Kong FTA adalah liberalisasi perdagangan barang minimal sebesar 85%, namun negara-negara anggota ASEAN menginginkan liberalisasi sebesar 50% - 65%.

Itakura (2014) menggunakan model CGE dinamis untuk melihat potensi efek perekonomian dari liberalisasi dan peningkatan fasilitasi dan konektivitas pada perdagangan barang dan jasa diantara anggota ASEAN. Hasil simulasi menunjukkan pengurangan hambatan perdagangan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi. Penelitian lainnya dari Itakura, Fukunaga dan Isono (2013) juga menggunakan simulasi CGE untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari aksesinya Hong Kong ke ASEAN-China FTA (HK-ACFTA), dengan skenario penghapusan tarif, logistik dan pengurangan hambatan perdagangan. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa semua negara yang tergabung dalam AC-FTA termasuk Hong Kong akan mendapatkan keuntungan dari aksesinya tersebut dan terjadi peningkatan PDB riil dan kesejahteraan ekonomi.

Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah manfaat apa yang diperoleh Indonesia dengan adanya ASEAN - Hong Kong FTA. Diharapkan dengan ASEAN - Hong Kong FTA dapat memperluas pasar produk-produk ASEAN khususnya Indonesia ke pasar Hong Kong. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengetahui manfaat dengan berlakunya perjanjian perdagangan barang ASEAN-Hong Kong FTA terhadap Indonesia, ASEAN dan Hong Kong.

METODE

Untuk melihat manfaat AHKFTA terhadap Indonesia, penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Data-data

yang digunakan diperoleh dari lembaga-lembaga nasional dan internasional, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan Biro Pusat Statistik, *World Bank*, *World Trade Organization* (WTO), *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan sumber data lainnya. Data utama yang diolah dalam penelitian ini menggunakan data GTAP (*Global Trade Analysis Project*) dari *Purdue University*.

Data GTAP adalah data yang melingkupi *Input-Output* Tabel masing-masing negara dan aliran perdagangan antar negara dengan banyak komoditas. Data GTAP yang digunakan dalam penelitian ini adalah GTAP *Database* versi 8 yang diterbitkan tahun 2012 dengan agregasi 129 negara dan 57 sektor. Untuk keperluan penelitian, agregasi negaranya adalah negara-negara ASEAN dan Hong Kong seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.

Model *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan menggunakan *Global Trade Analysis Project* (GTAP) versi 8 digunakan untuk menghitung seberapa besar manfaat dari berlakunya perjanjian perdagangan barang ASEAN-Hong Kong FTA terhadap kinerja perdagangan negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia, dengan melakukan dua simulasi yaitu simulasi dengan memotong tarif 50% dan simulasi liberalisasi penuh (*full liberalisation*) untuk seluruh produk baik negara-negara ASEAN, Indonesia maupun Hong Kong.

Pemilihan model CGE di dalam analisis ini dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung seberapa besar manfaat berlakunya perjanjian

perdagangan barang ASEAN-Hong Kong FTA terhadap kinerja perdagangan Indonesia, dimana analisis ini memproyeksikan dampak ekonomi ketika berlakunya AHKFTA atau dengan kata lain analisis *ex-ante* (Raihan, 2004). Penghitungan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penghitungan yang bersifat statis yaitu menghitung manfaat dari sebuah kerjasama perdagangan (FTA) ditinjau dari makro ekonomi yaitu kesejahteraan, GDP, neraca perdagangan dan dari sektoral ekonomi tanpa memperhitungkan perubahan yang terjadi dari *variable-variabel* ekonomi yang memengaruhi perdagangan.

Dalam perspektif makroekonomi, analisis prediktif sebagai konsekuensi adanya perubahan kebijakan perdagangan yaitu diberlakukannya ASEAN - Hong Kong FTA dapat diindikasikan oleh hubungan dan *magnitude* variabel-variabel kunci makroekonomi. *Output* di level nasional (menggunakan proksi GDP riil), kinerja perdagangan secara agregat yang ditunjukkan melalui variabel neraca perdagangan dan variabel ekspor-impor, tingkat kesejahteraan dalam ribu USD yang keseluruhan merupakan serangkaian variabel yang menjadi fokus pada tataran analisis di level makroekonomi.

Dari perspektif sektoral manfaat dari ASEAN - Hong Kong FTA dapat diindikasikan dengan adanya perubahan hubungan dan *magnitude* variabel-variabel kunci sektoral ekonomi seperti *output*, ekspor dan impor, serta penyerapan tenaga kerja. Secara detail, manfaat akan dilihat dari perubahan

dalam variabel makro dan sektoral apabila kebijakan FTA ASEAN - Hong Kong diberlakukan.

Hal ini dipertegas dengan penelitian Plummer, Cheong & Hamaka (2010) dalam Yuventus (2014) yang menyatakan bahwa evaluasi perjanjian perdagangan bebas dapat dilakukan sebelum dan setelah implementasi FTA, dimana *Computable General Equilibrium* (CGE) dapat digunakan sebagai analisis *ex-ante* implementasi FTA sedangkan untuk *ex post* dapat diukur dengan menggunakan model gravitasi.

Kelebihan lainnya dari model ini adalah mampu menerangkan permasalahan dalam cakupan yang luas, dapat menjelaskan dampak atau manfaat dari suatu perubahan atau kebijakan secara komprehensif. Hasil perhitungan dengan model ini dapat digunakan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dalam perekonomian sebagai dampak dari terjadinya perubahan atau kebijakan baru. Tetapi model ini juga memiliki kekurangan salah satunya yaitu persamaan model biasanya diturunkan dari teori maksimisasi utiliti dan keuntungan yang digabungkan dengan asumsi spesifik tentang bentuk preferensi dan teknologi. Ini berarti bahwa hasil model membawa implikasi tentang efisiensi sistem pasar yang tidak sepenuhnya benar. Model ini tidak sesuai untuk menganalisis fenomena yang melibatkan ketidakpastian dan perubahan dalam teknologi dan gaya hidup (Hayati, 2013).

Model lainnya untuk melihat dampak liberalisasi ketika berlakunya suatu kerjasama perdagangan yaitu dengan model gravitasi. Okabe dan Urata

(2014) melakukan penelitian mengenai dampak liberalisasi *Asean Free Trade Area* (AFTA) dalam intra-ASEAN dengan menggunakan model gravitasi. Model gravitasi dapat melihat dampak dari adanya suatu perdagangan yang baru ketika terjadi penurunan tarif, hasilnya yaitu perdagangan baru yang terjadi pada anggota ASEAN yang baru bergabung lebih kecil apabila dibandingkan dengan anggota ASEAN yang sudah lama bergabung.

Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Thu Anh, Trung Van dan Xuan Thanh (2015) menggunakan model gravitasi dengan memasukkan tiga variabel dummy untuk menganalisis dampak dari ASEAN+3 FTA pada kinerja perdagangan ASEAN. Hasil study menunjukkan bahwa terjadi perubahan impor ASEAN dari dunia dan perubahan ekspor ASEAN ke dunia. Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa GDP, GDP perkapita, perbedaan pendapatan dan jarak memengaruhi perdagangan diantara anggota ASEAN. AFTA juga memberikan dampak positif dan signifikan terhadap efek terciptanya perdagangan karena adanya penurunan tarif. Sedangkan ACFTA dan AJCEP berpengaruh negatif terhadap perdagangan diantara anggota ASEAN, ekspor ASEAN ke dunia dan impor ASEAN dari dunia.

Terdapat beberapa penelitian empiris yang menghitung dampak (FTA) dan anggotanya dari segi makro ekonomi dan sektoral. Zhou et.al (2010) memakai alat analisis GTAP untuk melihat dampak FTA ASEAN-China FTA (ACFTA) pada perdagangan, ekspor dan impor, serta GDP. Hasil yang

didapat yaitu implementasi dari ACFTA akan membawa dampak yang signifikan terhadap perdagangan, produksi dan GDP dari anggota ACFTA baik itu secara bilateral dan dengan negara anggota lainnya. Penelitian lainnya yaitu Caliendo, Lorenzo dan Parro, Fernando (2014) dalam tulisannya mengenai dampak penurunan tarif dalam NAFTA terhadap perdagangan dan kesejahteraan anggotanya, menyampaikan bahwa dampak dari penurunan tarif akan meningkatkan kesejahteraan di Meksiko sebesar 1,31%, USA sebesar 0,08% dan Kanada menurun sebesar 0,06%.

Untuk penelitian ini, agregasi negara dilakukan menjadi 11 kelompok dan sektor berdasarkan 57 sektor dalam GTAP versi 8, sebagaimana tersaji pada Tabel 1 dan 2.

Model GTAP adalah model ekonomi keseimbangan umum (*Computable General Equilibrium* (CGE)) dengan banyak negara dan banyak komoditas. Seperti model CGE lainnya, di dalam model GTAP dijelaskan keterkaitan antar agen-agen ekonomi dan komponen-komponen permintaan akhir di suatu negara dan antar negara. Penekanan GTAP terletak pada keterkaitan perekonomian secara keseluruhan, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan suatu negara terhadap perekonomian sektoral maupun makro di negara tersebut dan negara lainnya.

Pada model GTAP secara eksplisit dilakukan permodelan dalam margin transportasi internasional. Suatu global bank juga dibentuk dalam model sebagai intermediasi dari investasi dan tabungan

Tabel 1. Agregasi Negara FTA ASEAN-Hong Kong

No	Kode Negara	Deskripsi	Keterangan Negara
1	Idn	Indonesia	Idn
2	Mys	Malaysia	Mys
3	Phi	Philipina	Phl
4	Sgp	Singapura	Sgp
5	Tha	Thailand	Tha
6	Vnm	Vietnam	Vnm
7	Khm	Kamboja	Khm
8	Lao	Laos	Lao
9	Hkg	Hong Kong	Hkg
10	SEAsia	Asia Tenggara	Xse
11	ROW	Negara lainnya	Aus nzl xoc chn jpn kor mng twn xea bgd ind npl pak lka xsa can usa mex xna arg bol bra chl col ecu pry per ury ven xsm cri gtm hnd nic pan slv xca xcb aut bel cyp cze dnk est fin fra deu grc hun irl ita lva ltu lux mlt nid pol prt svk svn esp swe gbr che nor xef alb bgr blr hrv rou rus ukr xee xer kaz kgz xsu arm aze geo bhr irn isr kwt omn qat sau tur are xws egy mar tun xnf cmr civ gha nga sen xwf xcf xac eth ken mdg mwi mus moz tza uga zmb zwe xec bwa nam zaf xsc xtw

Sumber : GTAP Versi 8

Tabel 2. Agregation Sector for ASEAN – Hong Kong FTA

No	Kode	Deskripsi	No	Kode	Deskripsi
1	pdr	Paddy rice	30	Lum	Wood products
2	wht	Wheat	31	Ppp	Paper products, publishing
3	gro	Cereal grains nec	32	P_c	Petroleum, coal, products
4	V_f	Vegetables, fruits, nuts	33	Crp	Chemical, rubber, plastic prods
5	Osd	Oil sedds	34	Nmm	Mineral products nec
6	C_b	Sugar cane, sugar beet	35	i-s	Ferrous metals
7	pfb	Plant-based fibers	36	Nfm	Metal products
8	Ocr	Crops nec	37	Fmp	Motor vehicles and parts
9	Ctl	Cattle, sheep, goats, horses	38	Mvh	Transport equipment
10	Oap	Animal products nec	39	Otn	Transport equipment nec
11	Rmk	Raw milk	40	Ele	Electronic equipment
12	Wol	Wool, silk worm cocoons	41	Ome	Machinery and equipment nec
13	Frs	Forestry	42	Omf	Manufactures nec
14	Fsh	Fishing	43	Ely	Electricity
15	Coa	Coal	44	Gdt	Gas manufacture, distribution
16	Oil	Oil	45	Wtr	Water
17	Gas	Gas	46	Cns	Construction
18	Omn	Minerals nec	47	Trd	Trade
19	Cmt	Meat:cattle, goats, sheep, horse	48	Otp	Transport nec
20	Omt	Meat products nec	49	Wtp	Sea transport
21	Vol	Vegetables oils and fats	50	Atp	Air transport
22	Mil	Dairy productsofi	51	cmn	Communication
23	Pcr	Processed rice	52	Ofi	Financial services nec
24	Sgr	Sugar	53	Isr	Insurance
25	Ofd	Food products nec	54	Obs	Buss=iness service nec
26	B_t	Beverages and tobacco products	55	Ros	Recreation and other services
27	Tex	Textiles	56	Osg	pubAdmin/Defence/Health/educat
28	Wap	Wearing apparel	57	Dwe	Dwellings
29	Lea	Leather product			

Sumber : GTAP versi 8

dunia. Sistem permintaan konsumen diduga dengan menggunakan *Constant Difference of elasticities* (CDE) untuk menangkap kepekaan terhadap perbedaan harga dan pendapatan antar negara (Hertel, 1994).

Selain itu, aliran barang dalam perdagangan internasional mengikuti model Armington (1969) dimana setiap produk dibedakan berdasarkan asal negara. Setiap komoditas impor diasumsikan bersubstitusi tidak sempurna satu sama lainnya dengan komoditas yang diproduksi di dalam

negeri. Dengan asumsi ini, model dapat menangkap aliran perdagangan antar dua negara. Kelemahan model ini adalah mengasumsikan sistem pasar persaingan sempurna dan skala usaha yang konstan pada aktivitas produksi. Hertel (1994) mengakui bahwa pada konteks negara kecil dan terbuka, asumsi pasar persaingan sempurna mengakibatkan simulasi dampak penurunan tarif menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya.

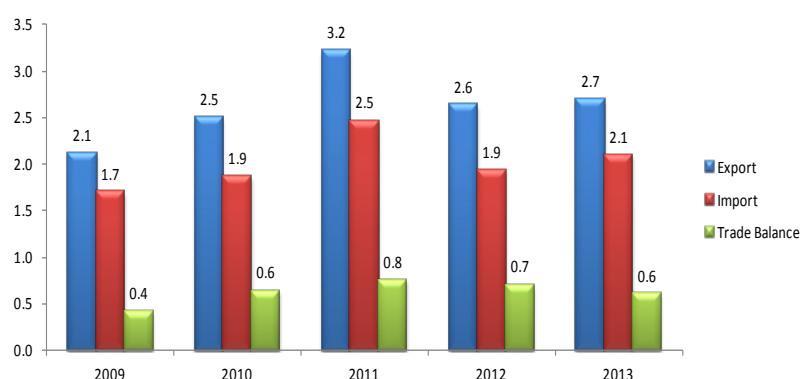
Model GTAP standar diolah dengan menggunakan *software* RunGTAP.

Proses agregasi sektor dan negara/wilayah dilakukan dengan menggunakan GTAPAgg. Proses pengolahan data dengan RunGTAP akan dilakukan dengan melakukan penyesuaian *closure* dan *shock* sesuai dengan tujuan penelitian. Olahan data ini akan dihasilkan keluaran (*out*) seperti *solution*, *volume changes*, dan *decomposition*. Penyelesaian bagian ini meliputi file solusi (*solution file*), perubahan volume (*volume changes*) dan dekomposisi (*decomposition*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perdagangan Indonesia dan Hong Kong

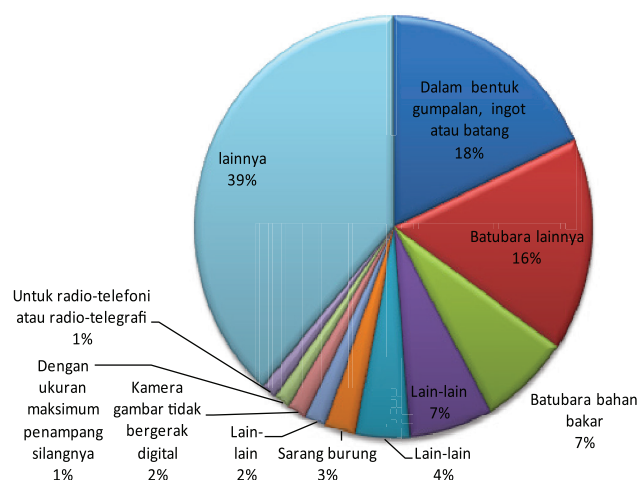
Neraca perdagangan Indonesia dengan Hong Kong dalam periode 2009-2013 selalu menunjukkan surplus. Surplus perdagangan ini disumbangkan oleh ekspor non migas yaitu emas dalam bentuk gumpalan, ingot atau batangan yang pada tahun 2013 menyumbang 18% dari total ekspor non migas. Sementara itu untuk neraca migas Indonesia-Hong Kong mengalami defisit sebesar USD 116.4 juta.



Gambar 1. Kinerja Neraca Perdagangan Migas - Non Migas Indonesia-Hong Kong Tahun 2009-2013

Sumber : TradeMap (2015), diolah

Dari sisi ekspor, tahun 2013 Komoditas ekspor utama Indonesia ke Hong Kong selain emas dalam bentuk gumpalan, ingot atau batangan, adalah batubara lainnya sebesar 18% dan 16% dari total ekspor Indonesia ke Hong Kong.

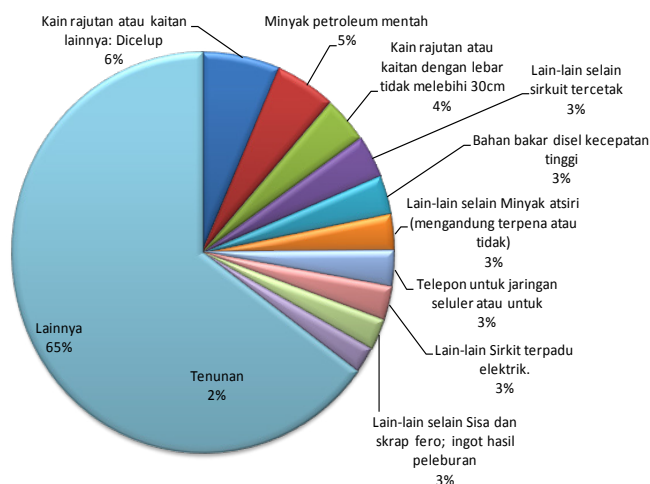


Gambar 2. Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Hong Kong Tahun 2013

Sumber : TradeMap (2015), diolah

Sedangkan impor Indonesia dari Hong Kong pada tahun 2013 didominasi olahan rajutan, minyak petroleum mentah, benang rajut, circuit dan bahan bakar diesel. Beberapa komoditi impor

utama Indonesia dari Hong Kong tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Komoditas Impor Utama Indonesia dari Hong Kong Tahun 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik (2015), diolah

Posisi Indonesia di pasar Hong Kong masih sangat kecil dan belum signifikan. Pangsa pasar Indonesia di Hong Kong masih kurang dari 1% pada tahun 2012. Indonesia menduduki peringkat ke-22 di pasar Hong Kong jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Filipina yang menduduki peringkat 14, Thailand yang menduduki peringkat ke-9, Malaysia dengan peringkat ke-8, dan Singapura dengan peringkat ke-3. Sedangkan pangsa pasar Hong Kong di pasar Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan pangsa pasar Indonesia di Hong Kong. Pangsa pasar Hong Kong di Indonesia mencapai 1,01% dengan peringkat 18 (*TradeMap*, 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dari *Trade Map*, pada tahun 2014 Hong Kong mengimpor

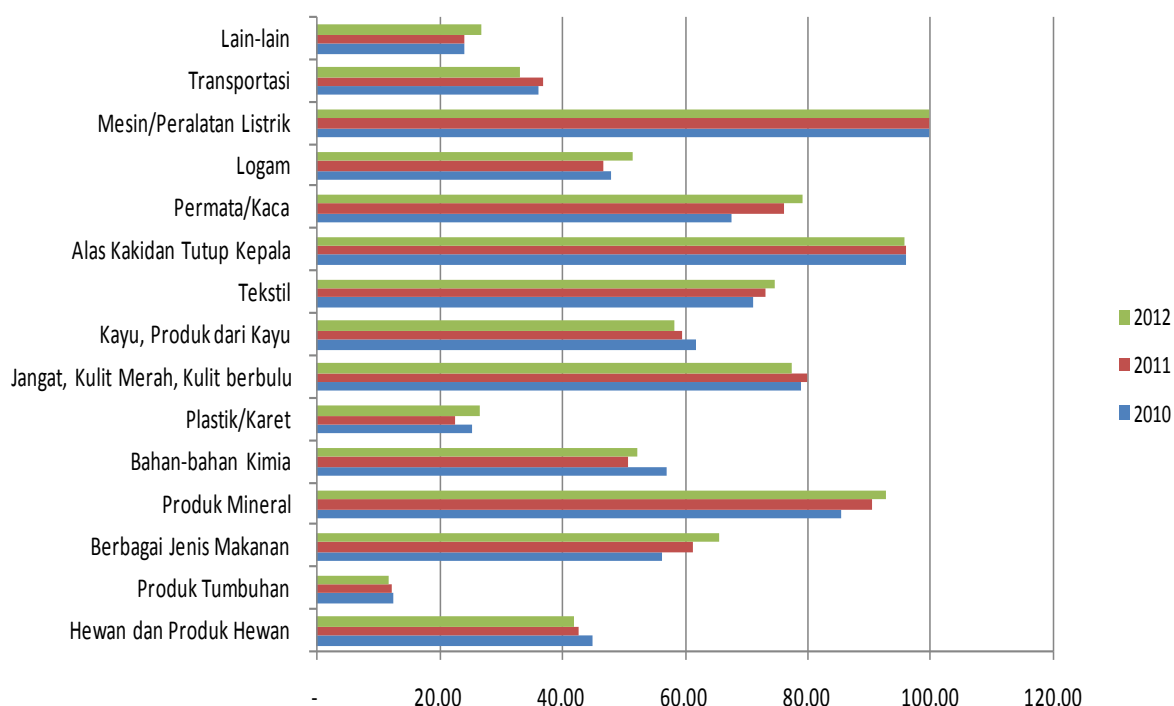
4.705 produk dari dunia. Indonesia mengekspor 4.733 produk ke dunia dan Hong Kong mengimpor dari Indonesia 1.487 produk. Sisanya 3.246 produk Indonesia potensial untuk dapat masuk ke pasar Hong Kong. Di sisi lain Indonesia mengimpor dari dunia 4.733 produk, Hong Kong mengekspor ke dunia 4.348 produk, Indonesia impor dari Hong Kong sebanyak 2.223 produk, sehingga terdapat 2.386 produk potensial Hong Kong yang dapat masuk ke pasar Indonesia. Kompetitor utama Indonesia terhadap produk potensial yang sejenis dalam memasuki pasar Hong Kong adalah negara-negara anggota ASEAN dan negara lain seperti RRT, Jepang dan Amerika Serikat.

Berdasarkan analisis *Trade Complementarity Index* (TCI), struktur ekspor Indonesia ke dunia yaitu Mesin/peralatan Listrik, Alas Kaki dan Tutup Kepala, Kayu, Produk dari Kayu, Jangat, Kulit Merah, Kulit berbulu dan produk mineral memiliki kecocokan dengan struktur impor Hong Kong dari dunia. Tingkat integrasi produksi yang tinggi ini menambah komplementaritas Indonesia dengan Hong Kong.

Analisis Dampak ASEAN Hong Kong FTA

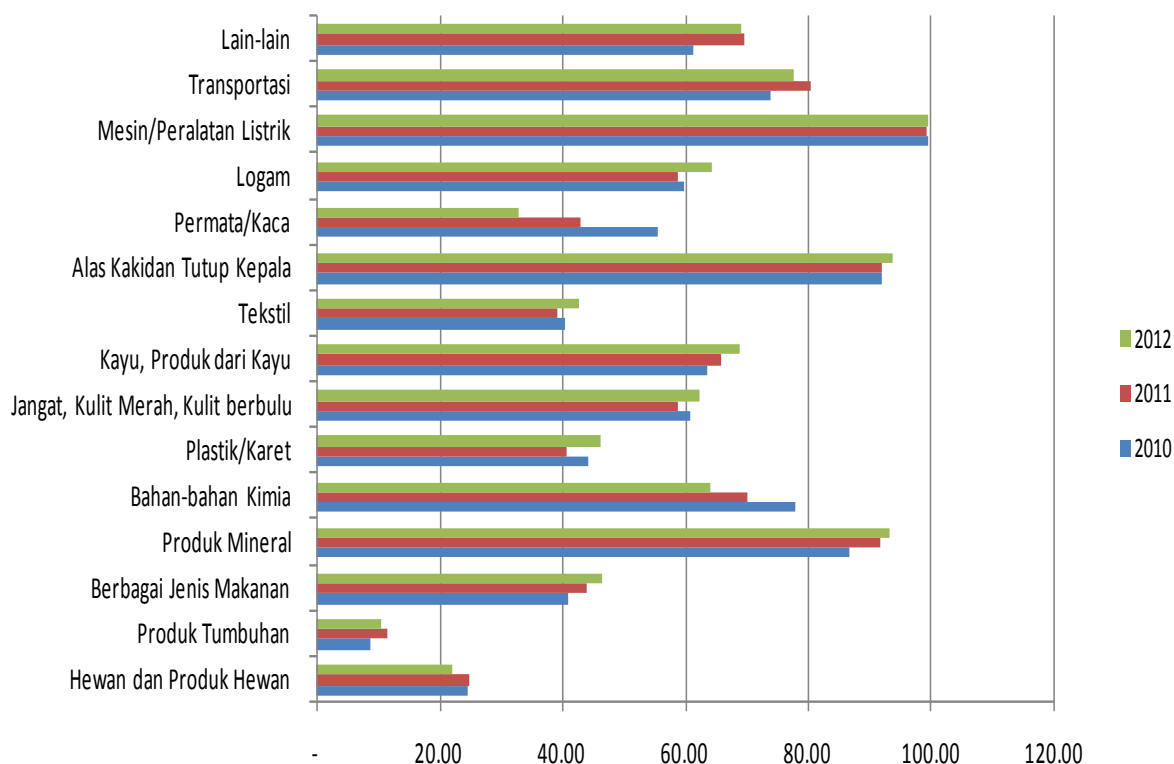
Analisis Dampak Ditinjau dari Makro Ekonomi

Merujuk pada penjelasan dalam metode analisis, simulasi yang digunakan dalam penelitian adalah penurunan tarif sebesar 50% dan 100% atau liberalisasi penuh. Penurunan tarif 50% dalam ASEAN - Hong Kong berdampak pada penurunan



Gambar 4. Trade Complementarity Index (TCI) Indonesia di Pasar Hong Kong

Sumber : TradeMap (2015), diolah



Gambar 5. Trade Complementarity Index (TCI) Hong Kong di Pasar Indonesia

Sumber : TradeMap (2015), diolah

kesejahteraan di seluruh negara kecuali Laos. Negara Laos memperlihatkan kesejahteraan yang positif dikarenakan adanya alokasi sumber daya yang efektif dan nilai tukar dagang yang positif. Produk-produk dengan tarif yang masih diproteksi yang tidak efisien di dalam proses produksinya menjadi lebih efisien karena adanya penurunan tarif 50%. Terjadi diversifikasi dari proses produksi yang tidak efisien menjadi lebih efisien. Sedangkan nilai tukar dagang yang positif memperlihatkan bahwa dengan penurunan tarif 50% AHKFTA menyebabkan harga ekspor Laos lebih tinggi dibandingkan harga impor. Ini dikarenakan harga sebagian produk Laos yang di ekspor ke ASEAN dan Hong Kong naik.

Hasil ini serupa dengan penelitian Sikdar, Chandrima and Nag, Biswajit (2011) yang menganalisis tentang India-ASEAN FTA dengan memakai metode CGE. Analisis ini menggunakan skenario eliminasi tarif 100% (liberalisasi penuh) yang hasilnya memperlihatkan bahwa kesejahteraan negara-negara ASEAN menjadi positif dikarenakan adanya alokasi sumber daya yang efektif dan nilai tukar dagang yang positif. Hal ini senada dengan penelitian Francis (2011) dimana dalam ASEAN-India FTA, semua anggota ASEAN akan mengalami peningkatan akses pasar di India khususnya untuk produk pertanian yang membawa dampak negatif pada produk pertanian sejenis yang dimiliki oleh India. Tetapi liberalisasi pada barang-barang setengah jadi (*intermediate goods*) akan mendorong rasionalisasi produksi

untuk peralatan transportasi, mesin, bahan kimia, besi dan baja serta mengakibatkan integrasi India lebih dalam jaringan produksi di sektor-sektor tersebut. Tidak ada manfaat akses pasar langsung yang besar bagi produsen India lainnya, mengingat rata-rata tarif di Indonesia, Malaysia dan Thailand sudah rendah. Respon kesejahteraan negatif merupakan suatu "alarm" bahwa eliminasi tarif 50% bagi negara-negara ASEAN kecuali Laos dalam level makroekonomi tidak sepenuhnya dapat ditransmisikan kepada kesejahteraan masyarakat.

Skenario penurunan tarif sebesar 50% dan 100% juga pernah dilakukan oleh Doganay, Meyveci Seda, et.al (2014) dalam menghitung dampak adanya kerjasama perdagangan di kawasan Asia dengan *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP). Dimana pemotongan tarif sebesar 50% disimulasikan untuk produk pertanian dan liberalisasi penuh untuk produk perindustrian, dimana hasilnya adalah memberikan dampak positif terhadap negara-negara di Asia.

Jika dilakukan liberalisasi penuh seluruh negara akan meningkat kesejahteraannya, peningkatan kesejahteraan tertinggi adalah Indonesia, disusul Thailand dan Malaysia. Selain dari sisi produksi, peningkatan kesejahteraan dimungkinkan terjadi dari sisi konsumsi karena konsumen memperoleh barang dengan harga yang relatif murah sebagai dampak adanya penciptaan perdagangan yang baru. Dampak liberalisasi penuh ini lebih tinggi

dibandingkan dengan liberalisasi 50% karena tarif yang dikenakan Hong Kong sudah sedemikian rendahnya. Penelitian Shino (2013) mengenai *How Far Will Hong Kong's Accession to ACFTA Impact its Trade in Goods?* menyatakan bahwa akses Hong Kong dalam AC-FTA hanya mempunyai pengaruh minimal terhadap perdagangan barang dan akses Hong Kong dalam AC-FTA semakin memperkuat fungsi Hong Kong sebagai pusat distribusi ekspor ASEAN ke RRT.

Hong Kong menerapkan kebijakan bebas pajak impor (*duty free*), tetapi tidak semuanya dikomitmenkan di WTO sehingga beberapa tarif bea masuk Hong Kong (*applied tariff*) masih dimungkinkan untuk naik dan Hong Kong juga menerapkan kebijakan hambatan non tarif yang perlu diwaspadai, yaitu manakala hambatan tarif diturunkan terdapat insentif untuk menerapkan hambatan non-tarif. Salvatore (1997) menjelaskan tepatnya sejak berakhirnya perang dunia kedua, khususnya di sektor manufaktur, pemerintah dari berbagai negara melindungi industri-industri domestik dengan memberlakukan berbagai macam hambatan non-tarif. Terkait dengan kebijakan hambatan non tarif, diperlukan fasilitasi perdagangan antara Indonesia-Hong Kong seperti misalnya fasilitasi skema sertifikasi bagi semua perusahaan Indonesia yang terlibat dalam perdagangan dengan Hong Kong, fasilitasi prosedur kepabeanan (fasilitasi perdagangan elektronik seperti ijin jalan kargo pada batas tanah dengan RRT), fasilitasi

persyaratan mengenai pelabelan kandungan gizi dan lain sebagainya. Pengalaman empiris perdagangan RRT dan Hong Kong menunjukkan walaupun Hong Kong dan RRT adalah yurisdiksi bebas tarif, Hong Kong dan RRT tetap menerapkan hambatan non tarif berupa larangan impor dan perizinan untuk alasan kesehatan, keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan dan sesuai dengan kewajiban internasional (BPPKP Puska KPI Kementerian Perdagangan, 2013).

Liberalisasi perdagangan menjadi salah satu upaya peningkatan akses pasar Indonesia ke pasar Hong Kong mengingat masih terdapat beberapa tarif bea masuk Hong Kong yang tidak di *binding* (dikomitmenkan) di WTO sehingga masih dapat dinaikkan, apabila didukung daya saing produk yang tinggi dan memiliki keterkaitan dengan industri nasional. Hal ini sejalan dengan saran Ariawan (2012), dimana untuk mengoptimalkan manfaat perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China FTA dengan cara meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui perbaikan infrastruktur. Disamping itu, Indonesia juga perlu memperhatikan struktur produksi dan ekspor yang berbeda dengan mitra FTA, sehingga mempunyai produk ekspor andalan ke negara mitra tersebut. Selain itu patut menjadi catatan bahwa liberalisasi tidak hanya diartikan sebatas pada penurunan hambatan tarif bea masuk impor namun diikuti dengan cakupan yang lebih luas dari reformasi kebijakan, termasuk non tarif, infrastruktur fisik maupun infrastruktur mutu, dan

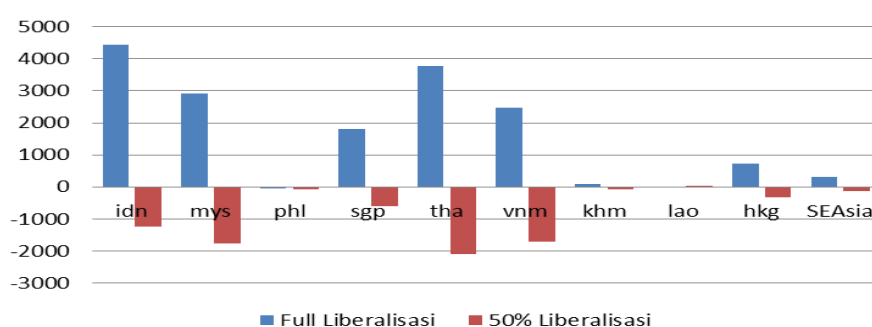
inappropriate regulation. Dengan demikian maka liberalisasi perdagangan akan memberikan *benefit* berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dampak FTA ASEAN Hong Kong terhadap kesejahteraan negara ASEAN dan Hong Kong secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 5.

Konsisten dengan kesejahteraan, penurunan tarif 50% ASEAN - Hong Kong berdampak pada penurunan GDP riil di seluruh negara ASEAN kecuali Hong Kong (meningkat kurang dari 1%). Namun jika liberalisasi penuh diberlakukan untuk ASEAN - Hong Kong, GDP riil seluruh negara ASEAN diprediksi mengalami peningkatan, dua tertinggi Vietnam dan Thailand. Hong Kong sendiri mengalami penurunan GDP riil kurang dari 1% (0.0015%).

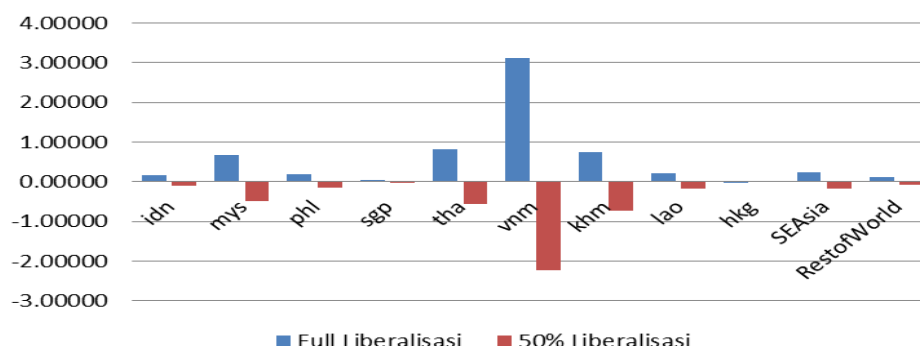
Peningkatan GDP yang relatif kecil di Indonesia dimungkinkan karena insentif liberalisasi perdagangan hanya terjadi pada beberapa sektor yang merupakan komoditi unggulan ekspor seperti *vegetable oil (vol)*, *oil seeds(osd)*, *wearing apparel (wap)*, *textile (tex)* dan *electronic equipment (ele)*. Dampak kerjasama perdagangan ASEAN Hong kong terhadap GDP Riil secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 6.

Penelitian Sikdar & Nag (2011) menunjukkan bahwa dengan skenario liberalisasi penuh, India akan mengalami penurunan GDP sebesar 1,07% dan kenaikan GDP tertinggi diperoleh Myanmar sebesar 3,18% dan Indonesia sebesar 1,08%. Untuk skenario berdasarkan tarif komitmen



Gambar 5. Dampak FTA ASEAN Hong Kong Terhadap Kesejahteraan (USD juta)

Sumber : GTAP versi 8 (2015), diolah



Gambar 6. Dampak FTA ASEAN Hong Kong Terhadap GDP Riil (persen)

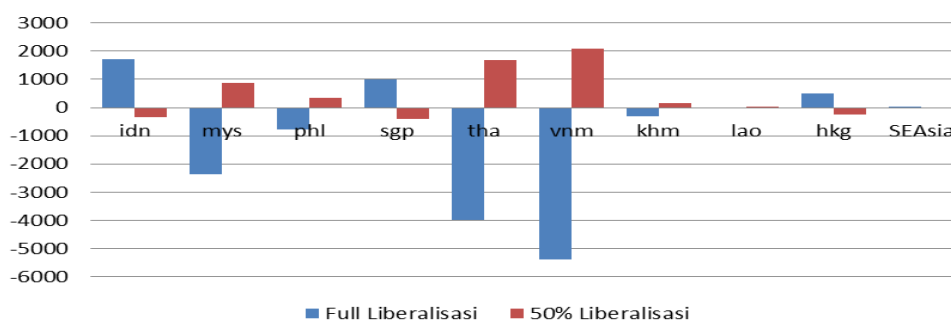
Sumber : GTAP versi 8 (2015), diolah

masing-masing negara ASEAN dan India diperoleh peningkatan GDP tertinggi adalah Singapura dan Malaysia, dan India mendapatkan keuntungan terkecil.

Penurunan tarif 50% pada perdagangan ASEAN - Hong Kong mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia, Singapura, Hong Kong dan negara yang tergabung dalam SEAsia/ negara-negara di bagian selatan Asia negatif. Artinya, nilai impor Indonesia jauh lebih besar daripada nilai eksportnya (lihat Gambar 7.)

Untuk kasus Indonesia, isu sentral yang harus dicermati mengenai kinerja perdagangan adalah sejauh mana kekuatan penawaran ekspor Indonesia dapat merespon peluang liberalisasi perdagangan. Kondisi ini akan semakin buruk jika kerjasama perdagangan ASEAN - Hong Kong tidak memberikan insentif dan strategi jangka panjang bagi industri untuk meningkatkan produktivitas melalui efisiensi produksi maupun adopsi teknologi.

Apabila komitmen dibuka selebarnya, maka Indonesia



Gambar 7. Dampak FTA ASEAN Hong Kong Terhadap Neraca Perdagangan (USD juta)

Sumber : GTAP versi 8 (2015), diolah

memperoleh manfaat dengan neraca perdagangan yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa sektor masih dapat memanfaatkan kerjasama perdagangan ASEAN - Hong Kong dengan melakukan ekspor. Tetapi pembukaan pasar ASEAN - Hong Kong harus penuh kehati-hatian mengingat keuntungan yang didapat hanya terjadi pada sektor-sektor yang telah memiliki daya saing.

Sampai saat ini kebijakan liberalisasi perdagangan masih

menjadi perdebatan yang intensif terutama berkenaan dengan kemiskinan dan ketimpangan serta distribusi pendapatan. Argumentasi pro menyatakan liberalisasi perdagangan akan mempercepat pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan di negara berkembang (*World Bank*, IMF, WTO).

Secara empiris, perdagangan internasional dan investasi terbukti mampu mendorong terjadinya industrialisasi yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang telah terjadi dalam

sejarah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat bagi Japan (1960-an), Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Korea Selatan (70-an dan 1980-an), Malaysia, Indonesia dan Thailand (1980-an) dan RRT (1990-an). Secara teoritis, liberalisasi perdagangan internasional akan meningkatkan arus perdagangan antar negara juga akan memberikan manfaat kepada negara-negara yang terlibat dalam perjanjian liberalisasi perdagangan ini.

Penelitian Dee (2011) dalam Setiawan (2012) menyatakan bahwa peningkatan keterbukaan suatu pasar akibat liberalisasi perdagangan (antara lain *free trade agreement/ FTA*, *preferential trade agreement/ PTA*, *custom union*, *common market*) dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan produktivitas. Manfaat dalam jangka pendek yang diperoleh adalah menurunnya tingkat pengangguran dan manfaat dalam jangka panjang adalah makin mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan produktivitas.

Argumen kontra liberalisasi perdagangan menyatakan integrasi negara berkembang ke dalam perekonomian dunia akan mengakibatkan “yang miskin menjadi miskin” dan “yang kaya menjadi kaya” (Ravallion dan Walle, 1991). Secara teori perdagangan internasional memberikan manfaat (*gain from trade*). Pertanyaan kritisnya ialah apakah manfaat itu terdistribusikan secara

adil/merata ke seluruh negara atau tidak, hal ini masih menjadi pertanyaan besar yang harus dicari jawabannya. Tidak semata karena potensi basis (*endowment*) setiap negara yang berbeda, akan tetapi banyak faktor yang menambah kompleksitasnya. Kemampuan menegosiasikan kepentingan nasional di dalam fora internasional menjadi salah satu faktor penting yang akan mendukung kebijakan perdagangan internasional suatu negara dapat secara optimal mendukung pertumbuhan ekonominya. Tingkat produktivitas suatu negara yang biasanya diukur dengan level kualitas sumber daya manusia dan teknologi juga berperan dalam meningkatkan kemampuan untuk mengambil porsi manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara. Maka dalam teori dasar perdagangan internasional berkembang dari adanya keunggulan mutlak (*absolute advantage*) ke keunggulan komparatif (*comparative advantage*) bahkan ke argumentasi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Kepentingan Hong Kong dalam wacana pembentukan FTA dengan ASEAN lebih ditekankan pada investasi dan perdagangan jasa khususnya jasa keuangan dan logistik, ini ditunjukkan pada Database GTAP versi 8 bahwa ekspor Hong Kong pada sektor-sektor ini sangat dominan, berturut-turut untuk sektor jasa distribusi sebesar 53493, jasa transportasi darat sebesar 7405.1, jasa transportasi laut sebesar 3824.4, dan jasa keuangan sebesar 8128.1. Meningkatnya perdagangan barang

di ASEAN memberikan insentif bagi Hong Kong untuk meningkatkan kinerja perdagangan di sektor jasa khususnya jasa keuangan dan logistik. Hong Kong memahami bahwa sektor logistik dan distribusi mempunyai korelasi yang kuat dengan perdagangan di sektor barang (Arvis *et al*, 2010). Negara yang memiliki kinerja logistik dan distribusi yang kuat memiliki kecenderungan lebih terbuka dan memiliki pertumbuhan ekonomi (Shepherd *et al*, 2010). Demikian juga sektor keuangan, meningkatnya perdagangan antar negara membutuhkan peran penting sektor jasa keuangan.

Hal ini harus dipandang sebagai peluang bagi Indonesia. Hong Kong yang merupakan hub Asia akan menjadi penghubung perdagangan barang Indonesia dengan negara lain. Peningkatan perdagangan jasa Indonesia-Hong Kong baik di jasa keuangan dan logistik akan meningkatkan *performance* perdagangan barang Indonesia yang berupa produk pertanian, agrifood, dan manufaktur ke semua negara Asia. Pentingnya biaya transportasi sejalan dengan penelitian Limau dan Venables (2001) yang menyatakan peningkatan biaya transportasi >10% akan mengurangi volume perdagangan >20%. Turunnya biaya transportasi akan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Oleh karena itu, dampak liberalisasi sangat tergantung pada bagaimana keterbukaan didefinisikan. Ketika didefinisikan hanya terbatas pada penurunan hambatan tarif bea masuk impor maka pertumbuhan

tampaknya tidak terpengaruh oleh keterbukaan yang besar. Sebaliknya ketika keterbukaan diukur dengan cakupan yang lebih luas dari reformasi kebijakan, termasuk tarif, non tarif, infrastruktur yang efektif (SDM dan modal), dan regulasi yang tepat maka keterbukaan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Jadi secara garis besar, hasil simulasi tersebut mengindikasikan perlunya Indonesia tetap selektif di dalam melakukan liberalisasi tarif perdagangan internasionalnya. Dengan membuka liberalisasi seluas-luasnya untuk komoditas yang Indonesia memiliki keunggulan nilai tukar dagang dengan Hong Kong dan tetap protektif terhadap komoditas yang kurang unggul, atau komoditas yang sangat dibutuhkan dalam pasar domestik tetapi memiliki daya saing yang relatif rendah dibanding dengan komoditas yang sama yang diproduksi oleh Hong Kong.

Analisis Dampak Ditinjau dari Sektoral Ekonomi

Manfaat ASEAN - Hong Kong FTA apabila ditinjau dari sisi ekonomi sektoral terdiri dari output, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Indonesia memperoleh manfaat dari full liberalisasi perdagangan ASEAN - Hong Kong FTA karena adanya peningkatan *output* di beberapa sektor yang merupakan komoditi unggulan terhadap *output* nasional yaitu *vegetable oil* (vol), *oil seeds* (osd), *wearing apparel* (wap), *textile* (tex) dan *electronic equipment* (ele), namun impor nasional mengalami peningkatan di seluruh sektor.

Hasil ini sejalan dengan penelitian kerjasama perdagangan internasional untuk kasus Indonesia dengan negara LDC (Lubis, 2013) serta Park et al, (2008) untuk kasus FTA ASEAN-China. Ketika liberalisasi diberlakukan akan meningkatkan impor yang mengakibatkan penurunan neraca perdagangan pada negara yang memiliki kesiapan dan daya saing produk yang rendah. Eliminasi tarif di seluruh negara ASEAN dan Hong Kong meningkatkan impor Indonesia pada komoditas pertanian yang tidak memiliki keunggulan komparatif seperti padi. Hal menarik adalah ketika terjadi penurunan tarif 50% ASEAN-Hong Kong, Indonesia memperoleh manfaat kenaikan output dan ekspor hampir di semua sektor. Impor pun mengalami penurunan, karena tarif yang ada mengurangi insentif konsumen untuk membeli. Hal ini menunjukkan proteksi dengan tetap memberlakukan tarif 50% dari baseline lebih memberikan insentif bagi sektor-sektor untuk meningkatkan outputnya dibandingkan apabila diberlakukan liberalisasi perdagangan secara penuh.

Tarif bea masuk merupakan salah satu bentuk proteksi terhadap sektor domestik sehingga menyebabkan produk impor tidak memiliki daya saing relatif terhadap produk domestik. Hal ini mengimplikasikan kebijakan untuk menghadapi kerjasama perdagangan ASEAN - Hong Kong perlu dilakukan secara hati-hati, penurunan bea masuk harus dilakukan secara bertahap agar industri dalam negeri lebih mempersiapkan diri menghadapi

liberalisasi melalui peningkatan produktivitas industri dalam negeri.

Secara sektoral, pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk akan meningkatkan kinerja ekspor nasional. Hal ini juga konsisten dengan dampak terhadap output, sektor yang mengalami peningkatan *output* pada simulasi liberalisasi penuh juga meningkat eksportnya seperti *vegetable oil* (vol), *oil seeds* (osd), *wearing apparel* (wap), *textile* (tex) dan *electronic equipment* (ele). Selain komoditi tersebut, beberapa komoditi lain yang mengalami penurunan *output* tapi masih meningkat eksportnya adalah *vegetable fruit and nuts*, *forrest*, *fish*, *oil*, *dairy product*, *beverage and tobacco*. Penurunan output relatif kecil (penurunan tertinggi sebesar 3%) sehingga tidak memberikan dampak terhadap penurunan ekspor. Dampak peningkatan ekspor secara sektoral khususnya yang bersumber pada sumber daya alam juga terjadi pada perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China.

Marks (2015) dalam penelitiannya mengenai *The ASEAN – China Free Trade Agreement: Political Economy in Indonesia* dengan menggunakan model parsial ekuilibrium, menyampaikan bahwa ASEAN-China FTA memberikan sedikit kontribusi terhadap surplus perdagangan Indonesia, walau secara umum menyebabkan defisit perdagangan Indonesia terhadap RRT. Selain itu, pergeseran ke arah surplus perdagangan bagi Indonesia sebagian besar terjadi pada sektor-sektor berbasis sumber daya, sementara

pergeseran ke arah defisit terjadi pada banyak sektor industri pengolahan, yang justru ingin dikembangkan oleh pemerintah. Dampak negatif ini menjadi pendorong munculnya hambatan non tarif di Indonesia.

Secara teori peningkatan *output* yang selanjutnya mendorong ekspor akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja baik terdidik maupun tidak terdidik. Sebaliknya *output* yang mengalami penurunan berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan *output* yang dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor *vegetable oil* (vol), *oil seeds* (osd), *wearing apparel* (wap), *textile* (tex) dan *electronic equipment* (ele).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penurunan tarif 50% dalam ASEAN - Hong Kong berdampak pada penurunan kesejahteraan di seluruh negara kecuali Laos. Jika dilakukan *full liberalisasi*, seluruh negara meningkat kesejahteraannya, keuntungan peningkatan kesejahteraan tertinggi adalah Indonesia, disusul Thailand dan Malaysia. Selain dampak terhadap kesejahteraan, penurunan tarif 50% berdampak pada penurunan GDP riil di seluruh negara ASEAN kecuali Hong Kong (meningkat kurang dari 1%). Jika *full liberalisasi*, manfaat ASEAN Hong Kong FTA diprediksi akan meningkatkan GDP riil di seluruh negara ASEAN, dua tertinggi Vietnam dan Thailand. Hong Kong mengalami penurunan GDP

riil kurang dari 1%. Indonesia sendiri memperoleh manfaat peningkatan GDP yang relatif kecil. Hal ini dimungkinkan karena insentif liberalisasi perdagangan hanya terjadi pada beberapa sektor yang merupakan komoditi unggulan ekspor seperti *vegetable oil* (vol), *oil seeds* (osd), *wearing apparel* (wap), *textile* (tex) dan *electronic equipment* (ele). Penurunan tarif 50% ASEAN-Hong Kong mengakibatkan *trade balance* Indonesia, Singapura, Hong Kong dan negara yang tergabung dalam SEAsia negatif.

Indonesia sebaiknya melakukan penurunan tarif secara bertahap yaitu pemotongan tarif 50% pada kerjasama ASEAN-Hong Kong FTA. Hal ini dikarenakan Indonesia akan memperoleh manfaat berupa kenaikan ekspor hampir di seluruh sektor. Disamping itu, proteksi dengan tetap memberlakukan tarif 50% dari *baseline* lebih memberikan insentif bagi sektor-sektor untuk meningkatkan outputnya dibandingkan apabila diberlakukan liberalisasi perdagangan secara penuh. Indonesia perlu melakukan suatu upaya peningkatan daya saing bagi sektor yang berdaya saing rendah agar manfaat dari kerjasama dapat terjadi di seluruh sektor.

Diperlukan kajian lebih lanjut pada investasi, perdagangan jasa khususnya jasa keuangan dan logistik (yang mencakup biaya transportasi, administrasi dan penanganan barang) untuk melihat apakah kerjasama investasi dan perdagangan di sektor jasa keuangan dan logistik akan memberikan manfaat dan berdampak

pada peningkatan daya saing dan volume perdagangan barang Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional atas semua masukannya, Ibu Widyastutik selaku tenaga ahli dan Tim Sub Bidang Regional atas semua bimbingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan. (2012). *Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi Mengenai ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Yang Diikuti Oleh Indonesia*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Armington, P.S. (1969). *A theory of demand for products distinguished by place of production*. IMF Staff Papers, 16, pp. 159-178.
- Arvis, et.al. (2010). *Connecting to Compete : Trade Logistics in the Global Economy*. Washington, DC: The World Bank.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Komoditas Impor Utama Indonesia dari Hong Kong Tahun 2013*. BPS: Jakarta
- BPPKP Puska KPI Kementerian Perdagangan. (2013). *Analisis Cost and Benefit Terkait Rencana Akses Hong Kong Dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Jakarta.
- Caliendo, Lorenzo and Parro, Fernando. (2014). *Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA*. The Review of Economic Studies Advance Access published November 14, 2014. Oxford University Press.
- Dee. (2011). *The Impact of Trade Liberalization on job and growth : technical Note OECD Trade Policy*. Working Paper 107. OECD. Paris.
- Doganay, Meyveci Seda, et.al. (2014). *The Impact of a Free Trade Agreement (FTA) Between Major Asian Economies: A Policy Response to TTIP*. GTAP Conference Paper. Purdue University.
- Francis, S. (2011). *The ASEAN-India Free Trade Agreement: A sectoral impact analysis of increased trade integration in goods*. The Economic and Political Weekly, Vol. 46 No. 02, January 08 - January 14, 2011.
- Global Trade Analysis Project (GTAP) Versi 8. Purdue University.
- Hayati, M. (2013). *Pemahaman Dasar Analisis Model Computable General Equilibrium (CGE)*. Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- Hertel, T.W. (1994). *Taking IMPACT Abroad: The Global Trade Analysis Project*. Paper presented at the IFAC Workshop on Computing in Economics and Finance, Amsterdam, June 8-10.
- Itakura, K. (2014). *Impact of Liberalization and Improved Connectivity and Facilitation in ASEAN*. Journal of Asian Economics. Volume 35, pages 1-106 (December 2014).
- Itakura, K., Fukunaga, Y., and Ishono, I. (2013). *A CGE Study of Economic Impact of Accession of Hong Kong to ASEAN-China Free Trade Agreement*. ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-06.
- Limau, N. & Venables, A.J. (2001). *Infrastructure, Geographical Disadvantage, Transport Costs, and Trade*. The World Bank Economic Review. 15: 3, 451-479.
- Lubis, A., D. (2013). *Fasilitas Bea Masuk Bagi Least Developed Countries dan Manfaatnya Bagi Indonesia*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol.7 No.2 Desember 2013. pp. 213-230.
- Marks, S.V. (2015). *The ASEAN-China Free Trade Agreement : Political Economy in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 51. Issues 2.

- Okabe, M. and S. Urata (2014). *The Impact of AFTA on Intra-AFTA Trade*. Journal of Asian Economics, 35, pp.12–31.
- Park, D., Park, I., Estrada, G., E.,B. (2008). *Prospects of An ASEAN-People's Republic of China Free Trade Area: A Qualitative and Quantitative Analysis*. Economics Working Paper Series No.30, ADB.
- Plummer, M.G., D. Cheong and S. Hamanaka. (2010). *Methodology For Impact Assessment of Free Trade Agreement*. Manila: Asian Development Bank.
- Raihan, S. (2004). *Assessing the Implications from Trade Liberalisation : Use of Different Methods and their Limitations*. Economic Affairs Division of the Commonwealth Secretariat, London.
- Ravallion, M. & D. Walle. (1991). *Quantifying Absolute Poverty in The Developing World*. Review of Income and Wealth, Series 37 Number 4. World Bank.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Haris M, penerjemah. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari: International Economics.
- Setiawan, S. (2012). *Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA (AKFTA) Terhadap Indonesia dan Korea Selatan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vo. 16 No. 1 Tahun 2012.
- Shepherd, et al. (2010). *Connecting to Compete 2010 Trade Logistics in the Global Economy*. The World Bank. Washington, DC 20433.
- Shino, K. (2013). *How Far Will Hong Kong's Accession to ACFTA Impact its Trade in Goods?*. ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-04.
- Sikdar, C. & Nag, Biswajit. (2011). *Impact of India-ASEAN Free Trade Agreement: A cross-country analysis using applied general equilibrium modeling*. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No 107, November 2011.
- Thu Anh, N., V. Trung Van & L.T.Xuan Thanh. (2015). *Assesing the impact of ASEAN+3 Free Trade Agreements on ASEAN's Trade Flows: A Gravity Model Approach*. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 6 No 6.
- TradeMap. (2015). Diunduh tanggal 11 Agustus 2015 dari <http://www.trademap.com>.
- Yuventus, E. (2014). *Implementasi ASEAN Free Trade Agreement Terkait Kinerja Perdagangan Indonesia : Pendekatan Model Gravitasi*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 8 No 1 Juli 2014.
- Zhou, S. et al. (2010). *Study on the Impacts of China–ASEAN Free Trade Area Based on the Simulation of GTAP Model*. GTAP Conference Paper. Purdue University.

DETERMINANTS OF INDONESIA'S EXPORTS OF MANUFACTURED PRODUCTS: A PANEL DATA ANALYSIS

Faktor Penentu Ekspor Produk Manufaktur Indonesia: Analisis Data Panel

Ahmad Sohibil Kahfi

Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan,
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, 10110, Indonesia.
e-mail: kahfi@kemendag.go.id

Naskah diterima: 22/01/2016 Naskah direvisi: 22/03/2016 Disetujui diterbitkan: 11/07/2016

Abstrak

Nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2012. Masalah ini menarik perhatian pemerintah Indonesia untuk segera meningkatkan performa ekspor, dimana salah satu sektor yang dapat ditingkatkan adalah sektor manufaktur. Studi ini menganalisis faktor penentu ekspor manufaktur di Indonesia sejak 2005 sampai 2014. Faktor utama yang dianalisis antara lain adalah nilai tukar rupiah, *foreign direct investment* (FDI), *gross domestic product* (GDP), dan kebijakan perdagangan. Faktor tersebut dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *random effect model*. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa perubahan relatif dari nilai tukar, *real GDP*, jarak dua negara, dan tarif secara signifikan memengaruhi ekspor manufaktur di Indonesia. Beberapa rekomendasi terkait untuk pemerintah Indonesia antara lain adalah dengan menjaga ekspor Indonesia ke negara-negara yang memiliki GDP tinggi, memperluas pasar ekspor Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendukung industri lokal menggunakan teknologi maju, dan mendukung penyederhanaan proses impor.

Kata kunci: Ekspor Produk Manufaktur, Nilai Tukar, Real GDP, Regresi Data Panel, *Random Effect Model*.

Abstract

Indonesia's export has been decreasing since 2012. This problem has raised government's attention to increase the export performance. One sector that can be improved is manufacturing. This study analyzes the determinants of Indonesia's manufacturing export from 2005 to 2014. The major factors examined in this study include real exchange rate, foreign direct investment (FDI), gross domestic product (GDP) and trade policies. Those factors are examined by using panel data regression with a random effect model. The results revealed that relative change of exchange rate, real GDP, distance between two countries and average tariffs significantly affected the Indonesia's manufacturing export. It is recommended that Indonesian government maintains the exports to countries which have high GDP, expand the export market, stabilize Rupiahs exchange rate, encourage local industries to use advanced technologies, and facilitate the simplification of import procedures.

Keywords: *Manufacturing Export, Real Exchange Rate, Real GDP, Panel Data Regression, Random Effects Model.*

JEL Classification: F14, F31, F41

INTRODUCTION

Indonesia's export value has been shrinking since 2012. This is shocking because it was experienced after Indonesia made history by doubling its export value over a period of five years in 2011. This fall was mainly due to the financial crisis in 2011 caused export demand from Indonesia's trading partner countries to decline; consequently Indonesia's export value fell to USD 190 billion (Sukarno, 2012). Another reason for the decline in export value was the drop in export mining commodities' prices, as shown by data of Statistics Indonesia (Syafputri, 2013). The export value, then, dropped consistently in the following years to approximately USD 176 billion in 2014 (Figure 1) (Ministry of Trade, 2015).

To address the decline in export trade, Indonesia's government, through the Ministry of Trade, established a target which was to increase Indonesia's export value by three folds in a period of five years starting from 2014. However, the Indonesian government has also introduced a policy prohibiting export of raw materials in order to guarantee natural resource sustainability and develop local industries (Gunawan, 2014). Therefore, in order to meet the target, the government aims to focus on increasing export performance in the manufacturing sector rather than resource-based export.

In the case of manufacturing export performance in Indonesia, it gradually increased from 2004 to 2011 except for a small drop in 2009 (Figure 2). This

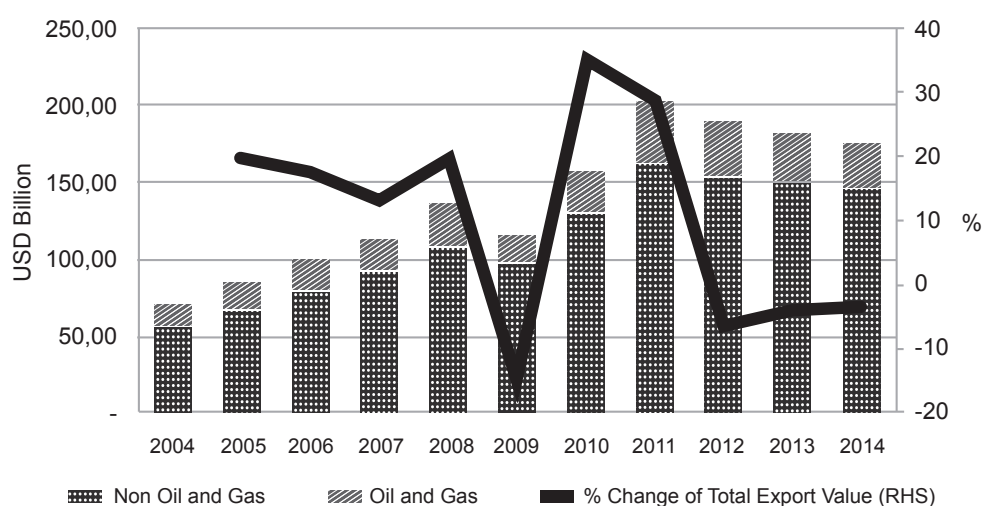


Figure 1. Indonesia's Total Export Value and its Change From 2004 to 2014

Source: Ministry of Trade (2015)

trend was almost similar to trends in Indonesia's total export. In 2004, the manufacturing export value was about

USD 36 billion, then it rose consistently to slightly above USD 50 billion in 2008. Although it dropped to about USD

47 billion in 2009, it recovered in the following year and remained stable at around USD 70 billion from 2011 to 2014. In contrast, total export value suffered decline after the 2011 economic crisis, but the manufacturing sector seemed to be robust enough to stand up with this economic shock (Soderbom & Teal, 2003).

Moreover, from 2004 to 2014, the manufacturing sector contributed

between 35 and 50 percent of Indonesia's total export. The highest percentage was in 2004 which was just over 50%. In 2014, the manufacturing sector contributed to the aggregate export by about 40%. However, the former Minister of Trade, Rachmat Gobel wanted to increase this contribution to 65% to fulfill the international demand of manufacturing products (Pusat Hubungan Masyarakat, 2015).

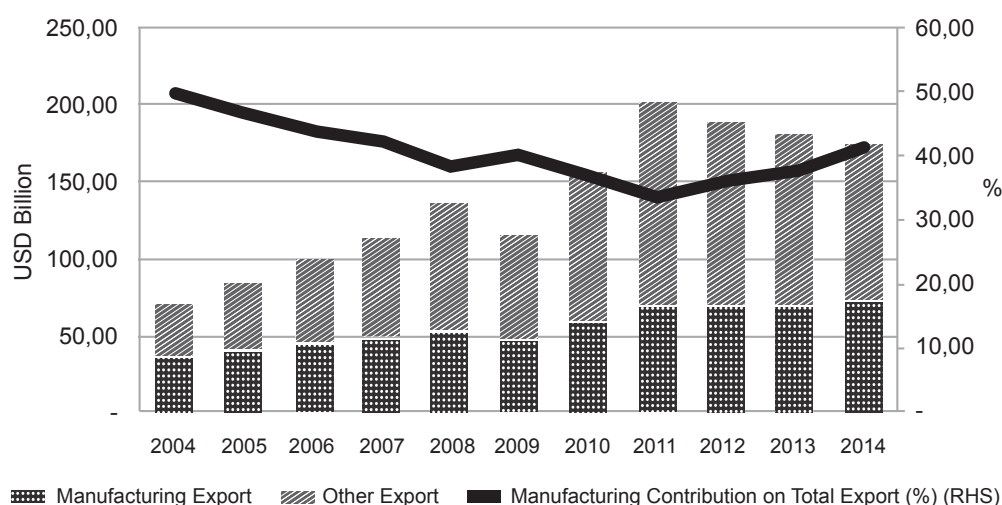


Figure 2. Manufacturing Export Value and Total Export Value in Indonesia from 2004 to 2014

Source: Ministry of Trade (2015)

This study aims to find determinants of manufacturing export performance in Indonesia. Deliarnov (1995) stated that countries do export if they have an excess of domestic supply of goods and services. On the other hand, Goldstein & Khan (1985) stated that export performance of a country is also determined by export demand from other countries. Therefore, to analyze export performance, it is better to consider factors from both

supply and demand sides to avoid bias which commonly occurs when estimating export performance of developing countries based on only one side and disregard another side (Riedel, 1998). Hence, manufacturing export determinants examined in this study come from supply and demand side. Based on the availability of data, supply factors examined consist of foreign direct investment (FDI) and other factors

covered in time dummies. The demand factors analyzed include real exchange rate, real gross domestic product (GDP), and trade policies (FTA, tariffs and importing days).

In Indonesia, there was a similar research from Rahmaddi and Ichihashi (2013) examining export performance of 11 manufacturing industries from 1990 to 2008. They found that the export performance of manufacturing products, as those in SITC 5 to SITC 8, is determined by foreign direct investment (FDI), GDP growth and exchange rate. However, this finding only covered some particulars industries which cannot explain Indonesia's manufactures as a whole. Therefore, it is needed to study further what factors significantly affect the whole Indonesia's manufacturing export performance, hence it can provide recommendations to improve Indonesia's export value.

This paper consists of four sections commencing with brief background of this study. The second section briefly describes the methodology and data for this study, followed by a discussion of the results in section three. The final section draws conclusions and offer some recommendations for the future (for MoT leaders in making policies to increase Indonesian manufacturing export performance).

RESEARCH METHOD

Method of Analysis

Manufacturing export determinants examined in this paper consist of FDI, real exchange rate, real GDP, and trade policies. To analyze the impact of each determinants on manufacturing export value, this paper uses panel data regression with gravity model. This is because, the gravity model captures bilateral factors that affect trade such as geographical distance, which is also considered in this study, and other economical factors (Yang & Zarzoso, 2014).

Gravity model applied in this paper is adopted from Sheldon, Mishra, & Thompson (2013) formulating trade flows among two countries by the following specification:

$$V^{jk} = \beta_0 (Y^j)^{\beta_1} (Y^k)^{\beta_2} (D^{jk})^{\beta_3} (A^{jk})^{\beta_4} u^{jk} \quad (1)$$

Where V^{jk} is trade value from country j to k , Y^j and Y^k are nominal GDP of country j and k , D^{jk} is distance between country j and k , and A^{jk} represents other factors that may affect trade between country j and k .

In this study, specification by Sheldon, Mishra, & Thompson (2013) with is modified by disaggregating variable A^{jk} to some more variables which will be explained later.¹ After

¹ The equation excludes a factor of Indonesia's GDP, because this study only focuses on Indonesia. The use of time dummies takes up the effect of Indonesia's GDP changes.

applying a logarithm transformation, the specification becomes:

$$\begin{aligned} \ln(X_{jt}) = & \alpha_0 + \beta_1 \ln(GDP_{jt}) + \beta_2 \ln(RER_{jt}) + \\ & \beta_3 \frac{RER_t}{RER_{t-1}} + \beta_4 \ln(Dist_j) \\ & + \beta_5 \ln(Investment_{jt-1}) + \\ & \beta_6 \ln(Disinvestment_{jt-1}) \\ & + \beta_7 \ln(Population_{jt}) + \\ & \beta_8 \ln(Importtime_{jt}) + \beta_9 Tariff_{jt} + \\ & \beta_{10} FTA_{jt} \\ & + \beta_{11} Dum06 + \beta_{12} Dum07 + \beta_{13} Dum08 \\ & + \beta_{14} Dum09 + \beta_{15} Dum10 \\ & + \beta_{16} Dum11 + \beta_{17} Dum12 + \beta_{18} Dum13 \\ & + \beta_{19} Dum14 + u_{it} \dots\dots\dots(2) \end{aligned}$$

Where $\ln(X_{jt})$ is the logarithm of Indonesia's real manufacturing export value to country j in year t , which is ranging from 2005 to 2014. $\ln(GDP_{jt})$ is the logarithm of real GDP of country j in year t . $\ln(RER_{jt})$ is the logarithm of real exchange rate against country j in year t . $\frac{RER_t}{RER_{t-1}}$ is the ratio of real exchange rate of year t and the prior year representing a relative change of exchange rate in year t . $\ln(Dist_j)$ is the logarithm of bilateral distance between Indonesia and country j . $\ln(Investment_{jt-1})$ and $\ln(Disinvestment_{jt-1})$ are the logarithms of the amount of positive total FDI inflows (investment) and the amount of negative total FDI inflows (disinvestment) to Indonesia from

country j in year $t - 1$. $\ln(Population_{jt})$ is the logarithm of the population of country j in year t . $\ln(Importtime_{jt})$ is the logarithm of number of importing days in country j in year t . $Tariff_{jt}$ is the average tariff applied by country j in year t . FTA_{jt} is a dummy variable of FTA implementation between Indonesia and country j in year t . $Dum06$ to $Dum14$ are time dummies to capture particular effects in each year affecting Indonesia's manufacturing export value.

This gravity model, then, is analyzed by panel data regression which has two approaches, Fixed Effect Model (FEM) and Random Effect Model (REM). The fixed effect model (FEM) considers the individuality of each cross-section unit and let the intercepts differ for each individual (β_{1i}). Yet, this model still assumes that the slope coefficients are constant across individuals. Gujarati (2003) formulated the model as:

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it} \dots\dots\dots(3)$$

The intercept β_{1i} has subscript i to show that the intercepts of individuals may be different because of particular characteristics of each individual. However, it has no subscript t to suggest that each individual is time invariant.

Although the random effect model (REM) has the same basic model as

FEM, $Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$, this model does not treat β_{1i} as fixed, but assumes that β_{1i} is a random variable having mean value of β_1 , hence the intercept value for each individual is:

$$\beta_{1i} = \beta_1 + \varepsilon_i \quad i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots(4)$$

Where ε_i is a random error term with a zero mean value and variance of σ_ε^2 .

By combining equation (4) and (5), the equation becomes (Gujarati, 2003):

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_i + u_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + w_{it} \dots\dots\dots(5)$$

$$w_{it} = \varepsilon_i + u_{it} \dots\dots\dots(6)$$

The composite error term w_{it} consists of error from the cross-section (ε_i) and the combination between time series and cross-section error component (u_{it}).

To choose the more appropriate approach between FEM and REM, a

test is required. One of test that can be considered is the Hausman's test (Gujarati, 2003). Hausman (1978), as cited in Baltagi (2008), stated that coefficient of REM ($\hat{\beta}_{REM}$) is consistent with coefficient of FEM ($\tilde{\beta}_{FEM}$) under

the null hypothesis $H_0: E\left(\frac{u_{it}}{X_{it}}\right) = 0$.

Hausman argued that $\tilde{\beta}_{FEM}$ is consistent without considering whether H_0 is true or not. However, $\hat{\beta}_{REM}$ is only consistent and asymptotically efficient under H_0 . Gujarati (2003) concluded that if the null hypothesis is rejected, the REM approach is not appropriate; consequently, it is better to use the FEM approach.

This study utilises yearly panel data, dating from 2005 to 2014, which consists of 28 countries resulting in a total of 280 observations. Countries, chosen in this study, are the top 28 importing countries in 2014, which contribute approximately 90 percent of the total of Indonesia's manufacturing exports (Table 1).

Table 1. Indonesia's Manufacturing Export Destination Countries in 2014

No.	Country	2014		
		Value (USD)	Share (%)	Cum. Share (%)
	Total Manufacture	72,836,149,044	100.00	
1	United States	11,037,499,911	15.15	15.15
2	Japan	7,204,640,131	9.89	25.05
3	Singapore	6,419,132,836	8.81	33.86
4	RRT	5,065,533,823	6.95	40.81
5	Malaysia	3,245,642,954	4.46	45.27
6	Australia	3,046,110,879	4.18	49.45
7	Thailand	3,033,981,111	4.17	53.62
8	Korea, Republic of	2,279,452,239	3.13	56.75
9	Germany	2,103,851,051	2.89	59.64
10	Philippines	2,090,799,442	2.87	62.51
11	United Arab Emirates	2,024,392,466	2.78	65.28
12	Netherlands	1,809,358,565	2.48	67.77
13	Saudi Arabia	1,687,168,369	2.32	70.09
14	India	1,608,247,079	2.21	72.29
15	Taiwan, Province Of China	1,565,818,799	2.15	74.44
16	Viet nam	1,395,978,527	1.92	76.36
17	United Kingdom	1,289,415,547	1.77	78.13
18	Hong kong	1,226,205,453	1.68	79.81
19	Belgium	948,706,329	1.30	81.12
20	South Africa	924,937,782	1.27	82.39
21	Brazil	922,355,837	1.27	83.65
22	Turkey	909,072,558	1.25	84.90
23	France	821,568,900	1.13	86.03
24	Italy	707,362,030	0.97	87.00
25	Mexico	653,830,834	0.90	87.90
26	Spain	607,913,279	0.83	88.73
27	Canada	524,273,176	0.72	89.45
28	Egypt	452,885,580	0.62	90.07

Source: Ministry of Trade (2015)

Indonesia's nominal manufacturing export data are obtained from the Ministry of Trade, Republic of Indonesia. The nominal export data are, then, adjusted to real value by using the export price index with a year base of 2005 obtained from Bank Indonesia's Producer Prices Indices (2015). Real GDP data in constant USD at 2005 prices, the nominal exchange rate data, population

data and data of the import days of each country are sourced from the World Bank's World Development Indicator (2015). To obtain the real exchange rate, nominal exchange rate data are multiplied by the relative price between two countries represented by the ratio of consumer price index (CPI) of each trading partner and Indonesia (Siregar & Rajan, 2004). The consumer price index

is also obtained from the World Bank's World Development Indicator (2015).

Data of nominal FDI inflows to Indonesia are acquired from UNCTAD. According to UNCTAD (2013), these data are on a net basis, therefore, their value each year might be positive representing investment or negative representing disinvestment. There is a problem when these data are transformed to logarithm value. Hence, to address this problem, these data are divided into two variables: investment, consisting of positive value of FDI inflows, and disinvestment, consisting of the absolute value of the negative value of FDI inflows. According to Cavallari & d'Addona (2013), nominal FDI data are scaled by the GDP deflator of each partner country from the World Bank's World Development Indicator (2015) to obtain real values. Data of distances between each country and Indonesia are from CEPII (2015) and the average tariff data from the World Bank's WITS (2015).

RESULTS AND DISCUSSION

Finding the best approach

According to Gujarati (2003), one formal test to find the more appropriate

model between FEM and REM is a Hausman's test. The result of Hausman's test is presented in Table 2.

The null hypothesis of the Hausman's test is difference in coefficients of FEM and REM is systematic. Based on Table 2, p-value for the Chi-square statistic is 0.919 which is greater than , therefore the null hypothesis cannot be rejected. This means that coefficients between FEM and REM are not significantly different. Consequently, the more appropriate approach for this study is REM.

The Impacts of Each Determinant

Table 3 shows the result of the panel data regression with random effects estimation of Indonesia's manufacturing export value. The estimation confirms that real GDP, ratio of real exchange rate, distance, import time and average tariff have a statistically significant effect on Indonesia's manufacturing export performance. However, results indicate that the coefficients of real exchange rate level, FDI inflows, population and the implementation of FTA are not statistically significant. Hence, those factors cannot be assumed to affect Indonesia's manufacturing export performance.

Gross domestic product (GDP) is the total production and expenditure of goods and services in a country (Mankiw, 2010). According to Table 3, the estimated coefficient of real GDP capturing market size in Indonesia's

Table 2. Hausman's Test between FEM and REM

	Hausman Test		
	Statistic	d.f	Prob.
Chi-square	10.37	18	0.919

trading partner countries is positive (0.299) and significant at the level of 1%. This means that a one percent addition of GDP in one of Indonesia's trading partners contributes to an almost 0.30% increase in Indonesia's manufacturing exports to that country. This is in line with finding from Shao et al (2012) explaining that exporters prefer to export to countries having higher GDP because they have bigger market, more number of buyers, and more stable demand. However, Shao et al (2012) also suggested to diversify export markets because concentrating export to some specific markets causes more risk.

Another major factor of export discussed in this study is real exchange rate, which is the rate or ratio between two currencies used by people to trade across countries. Depreciation or a decrease in the value of the money of a particular country causes its local products to be cheaper for other countries, which experience an appreciation under these conditions (Mankiw, 2010). However, in this study, coefficient of real exchange rate is not statistically significant, but the coefficient of the ratio of the exchange rate, representing a relative change in the exchange rate, is significant at the level of 1%. This indicates that

Table 3. Impact of Each Determinant on the Indonesia's Manufacturing Export (Random Effects)

Variable	Random Effect Model		
	Coef.	Std. Err.	P-value
Constanta	11.297**	1.556	0.000
Ln (Real GDP)	0.299**	0.064	0.000
Ln (Real Exchange Rate)	0.045	0.040	0.252
Ratio Real Exchange Rate	-0.665**	0.172	0.000
Ln (Distance)	-0.813**	0.142	0.000
Ln (Investment)t-1	-0.002	0.002	0.398
Ln (Disinvestment)t-1	-0.001	0.003	0.771
Ln (Population)	0.107	0.074	0.150
Ln (import days)	-0.275**	0.066	0.000
Average Tariff	-0.019*	0.009	0.038
FTA Implementation	0.042	0.038	0.266
Year 06	0.028	0.052	0.583
Year 07	0.133**	0.045	0.003
Year 08	-0.028	0.047	0.543
Year 09	-0.182**	0.047	0.000
Year 10	-0.086	0.056	0.125
Year 11	0.032	0.053	0.537
Year 12	-0.019	0.054	0.721
Year 13	-0.090	0.054	0.096
Year 14	-0.082	0.055	0.139

* and ** are statistically significant at level of five and one per cent, respectively.

factor affecting manufacturing export in Indonesia is not the level of real exchange rate, but the change of real exchange rate. Coefficient of the ratio of the exchange rate is (-0.655), which means that one percent increase in this ratio causes export value decreases by about 0.65%. This indicates that a depreciation of the rupiah will reduce Indonesia's manufacturing exports.

There are, at least, two possible reasons supporting this argument. Firstly, the nominal effect of the rupiah depreciation causes Indonesian products to be cheaper for international buyers using other currencies. Therefore, buyers spend less money than before depreciation although they buy the same amount of Indonesian products. As a consequence, the total value of Indonesia's export significantly decreases. The second reason is that Indonesia's manufactures rely much on the imported raw material. Rupiah depreciation causes imported raw materials to become more expensive resulting in a reduction of import of raw material for manufacturing. Consequently, manufacturing production falls and its export value decreases.

Moving on to trading time, which is one significant source of trade cost, therefore more time to trade is associated with weaker trade performance (Hummels & Schaur, 2013). The effect of the number of days for the importing process is negative

(-0.275) and significant at the level of 1%. This means that a one percent reduction on importing days causes an increase in manufacturing exports by 0.27%. A practical example of this finding is if Malaysia reduces its average importing days from 10 days to 9 days, Indonesia's manufacturing export to Malaysia is expected to increase by about 2.7 percent under a condition of no changes in other factors. Regarding to this finding, Shepherd (2013) explained that more trading time causes exporters tend to export by outsourcing their products to a specialized firm that can manage the products more rapidly, therefore it will reduce direct exports.

Next factor is tariffs which are the most popular policies used to restrict trade. The impact of the average import tariff applied by each partner can be seen in the coefficient of the average tariff which is -0.019 and significant at the level of 5%. This means that if the tariff is one percent lower; the export value increases by about 0.02%. This suggests that lower tariffs lead to higher export value. For instance, if the average import tariffs applied in Malaysia decline from around 6% to about 5%, it is expected that Indonesia's manufacturing export to Malaysia will rise by 0.02% if all other factors do not change. In other word, tariff cuts will encourage exporters to start exporting (Baldwin & Yan, 2012). Moreover, Akinkugbe (2009) stated that the practices of tariff barriers may

hinder export improvement even though upgrading of infrastructure and effective governance can expand export activities.

Moving to Free Trade Agreements (FTAs), which are a major instrument for countries seeking to expand their market access and raise export value. Yang & Zarzoso (2014) investigated the impact of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) on agricultural and manufacturing trade creation and trade diversion dating from 1995 to 2010. They found that the coefficients of FTA in their model were positive and significant. This means that FTA encourages manufacturing export performance of FTA member countries. On the other hand, according to Table 3, FTAs implementation in this study does not have significant effect on Indonesia's manufacturing exports. Although the coefficient of the FTA dummy is positive, this value is not significant at the level of 5%. This indicates that effects of implementation of the FTAs have been captured by tariffs, which significantly affect manufacturing export, therefore FTAs does not have effect on manufacturing export beyond the effect of tariffs.

Moving to FDI inflows, neither investment (the positive value of FDI inflows) nor divestment (the negative value of FDI inflows) significantly affects manufacturing exports because both coefficients are not significant at the level of 10%. There are possible reasons explaining this finding. Firstly, FDI inflows

in Indonesia from each country may be concentrated on particular sectors. Therefore, its effect of manufacturers as a whole is considerably weak. This explains difference between this finding and findings from Rahmaddi & Ichihashi (2013) arguing that FDI significantly encourage export of specific manufactures defined in SITC 5 to SITC 8. Another reason might be that FDI inflows cannot directly affect export performance in a year after, meaning that time lag between investment and its impact may be bigger than one year. Yet, although they are not significant, the negative value of the investment coefficient should raise concern. According to Zhang (2005) and Amighini & Sanfilippo (2014), the negative relationship between investment and export performance means that either FDI is not allocated efficiently or FDI is targeted to reach only the domestic market and not the export market.

Focusing on time dummies, in which 2005 becomes a year base, based on the estimation, export value in 2007 and 2009 significantly differ from other years. The coefficient of the time dummy in 2007 and 2009 are 0.133 and -0.183 respectively. To know the real effect of the time dummy, it needs a mathematical operation to retransform it from the logarithm form to its USD value. Then, it can be concluded that there was an addition to export value in 2007 of USD 11.46 billion, whereas in 2009, the

manufacturing export value dropped by USD 13.48 billion.

According to Bulman report (2008), the significant increase in Indonesia's manufacturing exports in 2007 was supported by three conditions. Firstly, the high growth in industries producing automotive, chemical, and agricultural products, with the highest growth being in the automotive industries, growing by 37 percent in 2007. Secondly, the increase in commodity prices, particularly palm oil rising by 55 percent in 2007, also supported improvement in Indonesia's manufacturing export performance. The third factor was that in 2007 Indonesia successfully reduced its dependency on the US as Indonesia's biggest export market. In 2007, the US was still the second largest export market for Indonesia even though its contribution to Indonesia's non-oil and gas export performance decreased, from about 17% in 2000 to 12% in 2007. At the same time, Indonesia's export to Malaysia, RRT and India increased by 48%, 22%, and 21% respectively, which in total, contributed to 22% of Indonesia's non oil and gas export. This export market diversification seems to be beneficial for Indonesia's manufacturing export performance by increasing its value. Additionally, the improvement of export performance in 2007 also contributed to economic growth in Indonesia, reaching 6.3 percent which was the highest growth since the 1990s (Bulman report, 2008).

On the other hand, in 2009, Indonesia's manufacturing exports suffered a significant decrease. This reduction started from the middle of 2008. Based on the Purna report (2009), this reduction was mainly caused by the financial crisis of 2008 which led to a slowdown in the global economy. According to Indonesia economic quarterly report (2009), the highest drops in manufacturing exports were to Japan, Singapore, the US and RRT. These declines were due to a fall in the prices of Indonesia's export commodities such as mining products, oil and rubber.

CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATION

Indonesia's total export value has been decreasing since 2012 due to the global economic crisis and the drop of commodity price in 2011. This study, focusing on export in manufacturing sector, is conducted to support the Indonesian government to overcome this problem. By applying panel data regression using random effect approach, this study analyses the impact of export determinants on Indonesia's manufacturing export performance to the biggest 28 partner countries from 2005 to 2014.

Results of this study show that real GDP and distance between Indonesia and its partner countries have a statistically significant effect on Indonesia's manufacturing export. Real

GDP positively affects manufacturing export, whereas distance negatively affects the export performance. However, Indonesia cannot interfere with these factors, therefore there are no direct policy recommendations that can influence these factors, except to conduct deeper research to understand and maintain Indonesia's export to rich countries which have a higher export share than other countries. In addition, the government should also consider other countries with which to diversify its export market because if GDP of those countries increase in the future, this will encourage an increase in Indonesia's manufacturing export. Moreover, this can also minimize the impact of trade shock suffered by partner countries in the future.

Moving to other factors, ratio of the real exchange rate, number of import days and average tariffs statistically negatively affect Indonesia's manufacturing export. Accordingly, there are suggestions for the Indonesian government to improve manufacturing export values. Firstly, the Indonesian government should stabilise the rupiah exchange rate to prevent the drawback of rupiah depreciation. Moreover, as suggested by Shao et al (2012), the Indonesian government should encourage domestic industries to use more advanced technologies to reduce dependency of Indonesia's export on price competitiveness influenced by the rupiah exchange rate. In regard to import

days and average tariffs, the Indonesian government can suggest simplification of import processes by, for example, promoting a national single window system and tariffs improvement through FTA negotiation in order to improve international trade between countries.

However, the results also reveal that the level of exchange rate, FDI inflows (investment and divestment), foreign population and FTA implementation do not have a statistically significant effect on Indonesia's manufacturing export performance. Focusing on FTA implementation, the Indonesian government is suggested to support the expansion of FTA scope beyond tariff reduction, such as agreement of products standards and customs process simplification. Next, regarding FDI inflows, although they do not statistically affect manufacturing export as a whole, it cannot be assumed that FDI inflows do not support Indonesia's manufactures as study by Rahmaddi and Ichihashi (2013) found that the FDI statistically affects specific sectors of manufacturing in Indonesia. Therefore, deeper study of FDI, using different methods or more specific data for each sector of manufacturing, is required to identify its real impact on manufacturers.

ACKNOWLEDGEMENT

The author would like to express deepest gratitude to Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS and Dr Florian

Ploeckl who were abundantly helpful and offered invaluable assistance for this study.

REFERENCES

- Akinkugbe, O. (2009). Trade facilitation and Africa's manufactured goods' export: a panel data analysis'. *Journal of Comparative International Management*, Vol. 9(2), pp. 77-88.
- Amighini, A., & M. Sanfilippo. (2014). Impact of south-south FDI and trade on the export upgrading of African economies. *World Development*, Vol. 64, pp.1-17.
- Baldwin, J. & B. Yan. (2012). Export Market Dynamics and Plant-Level Productivity: Impact of Tariff Reductions and Exchange-Rate Cycles. *Scand. J. of Economics*. Vol. 114(3), pp. 831-855.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Bank Indonesia. (2015). Producer Prices Indices. viewed 24 September 2015 from http://www.bi.go.id/sdds/series/ppi/index_ppi.asp
- Bulman, T. (2008). *Indonesia: economic and social update*. Washington. DC: World Bank.
- Cavallari, L & d'Addona. (2013). Nominal and real volatility as determinants of FDI. *Applied Economics*, Vol. 45, pp. 2603-2610.
- Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII). (2015). Distance. viewed 24 September 2015 from <http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm>
- Deliarnov. (1995). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: UI Press.
- Goldstein, M., & S. Khan. (1985). Income and price effects in foreign trade. In Jones, R., and Kenen, P. (1985). *Handbook of International Economics*, Vol. II. Amsterdam: North-Holland.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometric*. Boston: McGraw Hill.
- Gunawan, H. (2014). Keran ekspor bahan mentah akan ditutup total. *Kontan*. viewed 21 September 2015 from <http://industri.kontan.co.id/news/keran-ekspor-bahan-mentah-akan-ditutup-total>.
- Hausman, J. A. (1978). Specification test in econometrics. In Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Hummels, D.L., & Schaur, G. (2013). *Time as a trade barrier*. *American Economic Review*. Vol. 103(7), pp. 2935-2959.
- Indonesia Economic Quarterly report (2009) The World Bank. viewed 16 October 2015 from <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1235115695188/5847179-1243851359474/61647391243851879653/Full.Report.bh.pdf>
- Mankiw, N. G. (2010). *Principles of Economics*. Stamford: Cengage Learning.
- Ministry of Trade. (2015). Total balance of trade of Indonesia. viewed 25 August 2015 from <http://www.kemendag.go.id/en/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>
- Purna, I., Hamidi, & Prima. (2009). *Perekonomian Indonesia tahun 2008 tengah krisis keuangan global*. Jakarta: Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia.
- Pusat Hubungan Masyarakat (2015). Pembukaan Rapat Kerja Kemendag, Rachmat Gobel: Rebut Pangsa Pasar Ekspor. *Ministry of Trade*. Viewed 7 June 2016 from <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/28/pembukaan- Rapat-kerja-kemendag->

rachmat-gobel-rebut-pangsa-pasar-ekspor-id0-1422415856.pdf

- Rahmaddi, R., & M. Ichihashi. (2013). The role of Foreign Direct Investment in Indonesia's manufacturing exports. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 49(3), pp. 329-354.
- Riedel, J. (1988). The demand for LDC exports of manufactures: estimates from Hong Kong. *The Economic Journal*. Vol. 98, pp. 138-148.
- Shao, J., K. Xu., & B. Qiu. (2012). Analysis of Chinese manufacturing export duration. *China & World Economy*, Vol. 20(4) 56-73.
- Sheldon, I., S.K., Mishra., D. Pick & S.R. Thompson. (2013). Exchange rate uncertainty and US bilateral fresh fruit and fresh vegetable trade: an application of the gravity model. *Applied Economics*, Vol. 45(15), pp. 2067-2082.
- Shepherd, B. (2013). Trade times, importing and exporting: firm-level evidence. *Applied Economics Letters*. Vol. 20, pp. 879-883.
- Siregar, R., & R.S. Rajan. (2004). Impact of exchange rate volatility on Indonesia's trade performance in the 1990s. *Journal of The Japanese and International Economies*, Vol. 18, pp. 218-240.
- Soderbom, M., & F. Teal. (2003). Are manufacturing exports the key to economics success in Africa?. *Journal of African Economics*, Vol. 12(1) 1-29.
- Sukarno, P.A. (2012). Kinerja ekspor: realisasi ekspor indonesia tahun ini turun dari 2011. *Kabar24*. viewed 21 September 2015 from <http://kabar24.bisnis.com/read/20121220/78/110922/kinerja-ekspor-realisasi-eksporindonesia-tahun-ini-turun-dari-2011>.
- Syafputri, E. (2013). Ekspor merosot, impor membengkak tahun 2012. *Antaranews*. viewed 21 September 2015 from <http://www.antaranews.com/berita/356127/ekspor-merosot-impor-membengkak-tahun-2012>.
- UNCTAD. (2013). *FDI Flows*. UNCTAD. viewed 26 September 2015 from http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Investment%20and%20Enterprise/FDI_Flows.aspx.
- World Bank. (2015). World Development Indicators. viewed 24 September 2015 from http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#selectedDimension_WDI_Series
- World Bank. (2015). World Integrated Trade Solution (WITS). The World Trade. Viewed 24 September 2015 from <http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/AdvanceQuery/TariffAndTradeAnalysis/AdvancedQueryDefinition.aspx?Page=TariffandTradeAnalysis>
- World Bank and IMF. (2008). Global Monitoring Report 2008. Washington DC: World Bank
- Yang, S., & I.M. Zazoso. (2014). A panel data analysis of trade creation and trade diversion effects: the case of ASEAN-China Free Trade Area. *China Economic Review*, Vol. 29, pp.138-151.
- Zhang, K. H. (2005). How does FDI affect a host country's export performance? The case of China', in Rahmaddi R, Ichihashi M. 2013. The role of foreign direct investment in Indonesia's manufacturing exports. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 49(3), pp. 329-354.

DAMPAK KEBERADAAN PERWAKILAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TERHADAP KINERJA EKSPOR NON MIGAS INDONESIA

The Impact of Indonesian Foreign Trade Representatives on Export Performance

Ayu Sinta Saputri, Septika Tri Ardiyanti

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan,
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, 10110, Indonesia.
e-mail: ayusinta.saputri@gmail.com

Naskah diterima: 06/01/2016 Naskah direvisi: 22/03/2016 Disetujui diterbitkan: 20/06/2016

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembentukan Atase Perdagangan (Atdag) dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) terhadap kinerja ekspor non migas Indonesia. Metode yang digunakan adalah *random effect model* fungsi permintaan dengan menggunakan nilai ekspor non migas Indonesia dan pangsa ekspor non migas Indonesia di negara mitra dagang sebagai indikator-indikator yang menggambarkan kinerja ekspor Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan Atdag dan ITPC memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Nilai ekspor dan pangsa ekspor non migas Indonesia di negara mitra dagang dimana terdapat Atdag dan ITPC lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara mitra yang belum terdapat Atdag dan ITPC. Di samping itu, besaran anggaran yang diterima oleh para perwakilan perdagangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Dengan demikian, penguatan dan pengembangan Atdag dan ITPC penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan ekspor Indonesia baik melalui peningkatan besaran anggaran dan atau penambahan jumlah perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: Ekspor, Perwakilan Perdagangan, Fungsi Permintaan

Abstract

This study analyzes the impact of establishing the Indonesian Trade Attaché (Atdag) and The Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) on Indonesia's non-oil exports performance. The method used in this study is random effect model of demand functions using non-oil and gas export value, and non-oil and gas export share of Indonesia in trading partner countries as the indicators of Indonesia's export performance. The results indicate that the presence of Atdag and ITPC gave a positive and significant effect to improve exports. The value of Indonesia's non-oil and gas exports, and the share of Indonesia's non-oil exports with some partner countries of Atdag and ITPC are higher compared to countries without Atdag and ITPC. Moreover, the amount of budget received by the trade representative also has a positive and significant effect on the export performance. Therefore, the government should strengthen and develop Atdag and ITPC in order to boost export by increasing the budget and the number of trade representatives abroad.

Keywords: Export, Trade Representative, Demand Function

JEL Classification: F10, F13, F14

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin dinamis, negara-negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang memandang bahwa ekspor merupakan salah satu sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan ekspor, negara-negara di dunia kemudian mendirikan *Export Promotion Agencies* (EPA) yang memiliki tujuan utama untuk memberikan jasa (*services*) yang mendukung ekspor di negara tujuan yang menjadi target pasar. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan domestik ingin melakukan ekspor, maka perusahaan tersebut harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana kondisi dan selera konsumen di negara yang menjadi target pasar. Salah satu peran EPA disini adalah sebagai mediator yang menyediakan informasi pasar negara tujuan ekspor bagi perusahaan domestik yang akan melakukan ekspor.

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja EPA atau lembaga sejenis EPA dalam rangka melakukan promosi ekspor, antara lain Kostecki & Naray (2007), Lederman *et al.* (2010), Lederman *et al.* (2015), Álvarez & Crespi (2000), Martincus & Carballo (2008), Rose (2007), Ferreira & Teixeira (2011), Kang (2011), dan Ruël & Zuedima (2012), Grater *et al.* (2015), Moons (2012), Xu & Zhang (2014), Ayob & Freixanet (2014), Freixanet (2012), Pareja *et al.* (2015)

Durmuşoğlu *et al.* (2012), Cassey (2014), Cadot, *et al.* (2015). Secara umum, studi tersebut menunjukkan bahwa lembaga pengembangan ekspor (EPA) atau sejenisnya memiliki dampak yang positif dalam promosi ekspor.

Hal tersebut di atas disebabkan karena hambatan pasar yang banyak dihadapi oleh eksportir adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi pasar terkait selera konsumen, *distribution network*, cara dan metode pemasaran dan promosi serta pemahaman terhadap regulasi di negara tujuan (Van Biesebeoeck, *et al.*, 2010). Kegagalan pasar (*market failures*) yang disebabkan oleh hal-hal tersebut akan dapat diminimalisasi apabila peran tersebut dilakukan oleh EPA atau lembaga sejenis EPA. Lebih lanjut, Hayakawa, Lee & Park (2011) bahkan menyatakan bahwa dampak membangun kantor EPA di suatu negara terhadap peningkatan ekspor setara dengan dampak yang ditimbulkan dari penandatanganan FTA dengan negara tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa EPA memiliki peran yang sangat krusial terhadap promosi dan peningkatan ekspor suatu negara.

Dalam menganalisis dampak lembaga pengembangan ekspor terhadap kinerja ekspor, studi-studi tersebut menggunakan beberapa pendekatan dan metode yang berbeda. Alvarez & Crespi (2000) dalam menganalisis dampak kegiatan

promosi ekspor yang dilakukan oleh *the National Agency for Export Promotion* (PROCHILE) terhadap kinerja ekspor Chili dengan menggunakan metode *Quasi-experimental design*. Terdapat dua indikator kinerja ekspor yang dianalisis yaitu indikator kualitatif (perbaikan teknologi produksi, pengembangan produk baru, inovasi teknologi pengolahan, dan inovasi manajemen organisasi) dan indikator kuantitatif (nilai ekspor, perubahan pangsa di pasar tujuan, diversifikasi produk ekspor, dan diversifikasi pasar tujuan). Studi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan PROCHILE berdampak positif pada penambahan jumlah pasar tujuan ekspor dan nilai ekspor. Lebih lanjut, Martincus, *et al.* (2010) menggunakan pendekatan *with-without* yaitu membandingkan kinerja ekspor perusahaan yang mendapat bantuan dari lembaga promosi ekspor Argentina dengan perusahaan yang tidak mendapat bantuan. Dampak bantuan lembaga pengembangan ekspor diestimasi dengan menggunakan *difference-in-difference estimator* yaitu rata-rata perbedaan nilai ekspor sebelum dan sesudah menerima bantuan untuk perusahaan yang menerima bantuan dan hal yang sama untuk perusahaan yang tidak menerima bantuan.

Sementara itu, Kang (2011) menganalisis hubungan antara anggaran kantor perwakilan perdagangan di luar negeri Korea Selatan (Korsel), KOTRA,

dengan peningkatan ekspor ke negara yang telah terdapat KOTRA dengan menggunakan *gravity model*. Variabel kontrol yang digunakan dalam studi tersebut antara lain Produk Domestik Bruto (PDB) Korsel dengan PDB negara tempat KOTRA berada, *income convergence*, *tariff rate* di negara importir, nilai tukar, jarak, *dummy variabel* untuk negara dengan bahasa asing utama (Inggris) dan bahasa asing kedua (Mandarin, Spanyol, Jepang, Perancis, dan Jerman), harga ekspor, dan indeks harga konsumen di negara importir. Selanjutnya, variabel instrumen yang digunakan antara lain penggunaan energi, konsumsi listrik, penggunaan telepon, arus *net FDI*, penggunaan internet, pengeluaran militer, *primary completion*, kompensasi dan pengiriman uang tenaga kerja, emisi CO², ekspor barang berteknologi tinggi, dan *market capitalization*. Studi tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan anggaran untuk kantor perwakilan perdagangan sebesar 10% akan meningkatkan ekspor Korea Selatan sebesar 2,45%-6,34%.

Pareja, *et al.* (2008) juga menggunakan pendekatan *gravity model* untuk mengetahui dampak pembukaan kantor promosi ekspor oleh pemerintah daerah Spanyol yang diteliti (Andalusia, Aragon, Basque Country, Catalonia, Murcia, dan Valencia) terhadap ekspor selama periode 1995-2003. Indikator kinerja ekspor yang

dianalisis adalah nilai ekspor daerah ke masing-masing negara tujuan ekspor yang telah memiliki kantor perwakilan perdagangan. Sementara itu, *variable of interest* yang digunakan adalah jumlah kantor promosi ekspor di negara tujuan ekspor, sedangkan variabel kontrol yang digunakan antara lain PDB riil daerah di Spanyol yang diteliti dan PDB riil negara tujuan ekspor, jarak antara daerah yang diteliti dengan negara tujuan ekspor, jumlah kedutaan besar dan konsulat Jenderal di negara tujuan ekspor, *dummy variable* untuk negara yang tergabung pada EU atau EFTA, bahasa, negara tujuan yang berbagi perbatasan, jumlah pulau di negara tujuan ekspor, dan jumlah *landlocked country-region* di negara tujuan ekspor.

Di samping Negara-negara tersebut, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menggunakan strategi pembentukan lembaga pengembangan ekspor (EPA) untuk meningkatkan kinerja ekspornya yaitu dengan mendirikan perwakilan perdagangan di luar negeri, Atase Perdagangan (Atdag) dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC). Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 23 Atase Perdagangan, dan 19 ITPC yang tersebar di berbagai negara mitra dagang Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2015). Berdasarkan Permendag Nomor: 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia

di Luar Negeri, tugas dan fungsi Atase Perdagangan antara lain: Pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama perdagangan dan koordinasi dengan berbagai pihak di negara penerima; Pengamatan, analisa dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah perdagangan di negara penerima; Pelaksanaan promosi terpadu dalam rangka peningkatan citra produk ekspor; dan Pelaksanaan kegiatan kerjasama, fasilitasi, diplomasi, pengamatan pasar dan peningkatan akses pasar ekspor yang ditugaskan oleh Menteri Perdagangan dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan. Sementara itu, tugas dan fungsi ITPC berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 1147/M-DAG/KEP/10/2014, antara lain: penetrasi pasar, pelayanan informasi pasar, promosi ekspor, pelayanan kepada dunia usaha, pelaksanaan Intelijen Manajemen dan pengamatan terhadap kebijakan perdagangan.

Apabila melihat beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait EPA yang telah diuraikan sebelumnya, maka salah satu strategi Indonesia untuk membentuk perwakilan perdagangan luar negeri menjadi cukup logis. Namun demikian, hingga saat ini belum ada studi yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak dibentuknya perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri baik Atase perdagangan dan ITPC yang berperan sebagai EPA.

Pengetahuan akan dampak Atase Perdagangan dan ITPC tersebut sangat diperlukan terutama untuk menyusun langkah dan strategi peningkatan ekspor Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Atase Perdagangan dan ITPC terhadap kinerja ekspor Indonesia. Dalam melakukan evaluasi dampak perwakilan perdagangan, kajian ini menggunakan pendekatan *random effect model* (REM) fungsi model permintaan seperti yang telah banyak digunakan pada studi sebelumnya dalam mengevaluasi peran EPA seperti Pareja, *et al.* (2008) serta Hayakawa, Lee & Park (2011) dan Kang (2011).

Studi ini terbagi ke dalam empat bagian antara lain latar belakang dan tujuan kajian terdapat pada bagian pertama. Bagian kedua menjelaskan metode analisis dan data yang digunakan dalam kajian ini. Selanjutnya, pada bagian ketiga dan keempat merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini.

METODE

Model ekonometrik yang digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis dampak dari Atdag dan ITPC terhadap kinerja ekspor pada dasarnya menggunakan pengembangan dari model-model yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti Alvarez & Crespi (2000), Martincus *et al.* (2010), Kang (2011),

dan Pareja, *et al.* (2008). Model yang dikembangkan oleh Martincus, *et al.* (2010) pada prinsipnya adalah model ekonometrik dengan menggunakan pendekatan *with-without* perusahaan yang telah mendapat dukungan dari EPA dan tanpa bantuan EPA. Namun di sisi lain juga berusaha membandingkan kondisi sebelum dan sesudah mendapat bantuan dari EPA untuk masing kategori perusahaan (*before-after*). Dengan demikian, dua pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *with-without* dan *before-after*.

Namun demikian, berdasarkan data yang diberikan oleh Lembaga Arsip Nasional (2015), perwakilan perdagangan luar negeri Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1956, sementara data perdagangan luar negeri Indonesia baru tersedia pada tahun 1990. Mempertimbangkan ketersediaan data tersebut maka evaluasi dampak perwakilan perdagangan luar negeri dengan menggunakan pendekatan perbandingan periode sebelum dan sesudah adanya perwakilan (*before and after*) tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, kajian ini hanya menggunakan pendekatan perbandingan negara yang telah memiliki perwakilan perdagangan luar negeri dengan negara yang belum memiliki perwakilan perdagangan (*with and without*) selama periode 1996-2014.

Kinerja ekspor Indonesia ke negara tujuan yang menjadi variabel *dependent* dalam kajian ini akan didekati dengan

menggunakan dua indikator yaitu nilai ekspor non migas dan pangsa ekspor non migas di negara mitra dagang. Penggunaan dua indikator tersebut dalam kajian ini disebabkan apabila menggunakan sebanyak delapan indikator seperti yang digunakan oleh Alvarez & Crespi (2000) untuk menilai kinerja ekspor akan membuat analisis dan kebutuhan data menjadi sangat kompleks. Dengan demikian secara teoritis, keberadaan Atdag dan ITPC diharapkan akan mampu meningkatkan nilai ekspor dan pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra dagang.

Dengan menggunakan pendekatan model permintaan, maka variabel independen dalam kajian ini antara lain variabel ekonomi makro di negara tujuan ekspor yaitu nilai tukar riil dan PBD riil negara mitra dagang, jarak antara Indonesia dengan negara mitra dagang, dan *complementary index*. Harga produk ekspor tidak digunakan sebagai variabel kontrol karena harga spesifik dari produk yang diekspor di negara tujuan ekspor tidak tersedia sementara jika digunakan pendekatan *unit value* akan didapatkan hasil yang bias terutama untuk produk manufaktur yang sangat beragam. Sementara untuk mengetahui dampak Atdag dan ITPC pada kinerja ekspor akan didekati dengan variabel dummy dan variabel *budget* (besaran anggaran) yang diterima Atdag dan ITPC.

Dengan pilihan variabel *independent* dan *dependent* seperti diuraikan

sebelumnya, maka model dengan pendekatan *with-without* adalah seperti persamaan (1) sampai dengan (3) berikut. Koefisien dari ATDAG_D dan ITPC_D merupakan indikator efektivitas peran kedua lembaga tersebut dalam peningkatan ekspor.

$$XV_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 RER_{it} + \alpha_2 RGDP_{it} + \alpha_3 CID_{it} + \alpha_4 TRF_{it} + \alpha_5 DISTANCE_{it} + \alpha_6 ITPC_D_{it} + \alpha_7 ATDAG_D_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

$$XS_{it} = \beta_0 + \beta_1 RER_{it} + \beta_2 RGDP_{it} + \beta_3 CID_{it} + \beta_4 TRF_{it} + \beta_5 DISTANCE_{it} + \beta_6 ITPC_D_{it} + \beta_7 ATDAG_D_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

dimana:

- XV_{it} : Ln Nilai ekspor Indonesia ke Negara i periode t (USD ribu)
- XS_{it} : Ln Pangsa nilai ekspor Indonesia di negara i periode t (%)
- RER_{it} : Ln Nilai tukar riil IDR terhadap mata uang negara periode t
- $RGDP_{it}$: Ln GDP riil negara i periode t (USD)
- CID_{it} : Ln *Complementary index* Indonesia dengan negara i periode t
- TRF_{it} : Ln Rata-rata tarif Bea Masuk di negara mitra
- $DISTANCE_{it}$: Ln Jarak Indonesia dengan negara i
- $ITPC_D_{it}$: *dummy* untuk ITPC di negara i periode t (D=0: *without* dan D=1: *with*)

ATDAG_Dit : *dummy* untuk Atdag di negara i periode t (D=0: *without* dan D=1: *with*)
i : 1, 2, ..., 62 (62 negara)
t : 1, 2, ..., 19 (tahun 1996 hingga 2014)

Sementara model pendekatan *with-without* dengan menggunakan variabel besaran anggaran untuk mengevaluasi kinerja Atdag dan ITPC adalah sebagai berikut:

$$XV_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 RER_{it} + \gamma_2 RGDP_{it} + \gamma_3 CID_{it} + \gamma_4 TRF_{it} + \gamma_5 DISTANCE_{it} + \gamma_6 ITPC_Budget_{it} + \gamma_7 ATDAG_Budget_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3)$$

$$XS_{it} = \delta_0 + \delta_1 RER_{it} + \delta_2 RGDP_{it} + \delta_3 CID_{it} + \delta_4 TRF_{it} + \delta_5 DISTANCE_{it} + \delta_6 ITPC_Budget_{it} + \delta_7 ATDAG_Budget_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(4)$$

dimana:

ITPC_Budget_{it} : Ln Besaran anggaran (*budget*) yang diterima oleh ITPC di negara i pada periode ke-t

ATDAG_Budget_{it} : Ln Besaran anggaran (*budget*) yang diterima oleh ATDAG di negara i pada periode ke-t

Sementara penjelasan variabel *independent* lainnya sama dengan penjelasan variabel pada persamaan (1) sampai dengan (2). Lebih lanjut, definisi beberapa variabel yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Real Gross Domestic Product (RGDP) :

GDP riil di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor (negara yang dianalisis) dihitung berdasarkan persamaan berikut:

$$RGDP = \frac{(GDP\ Nominal \times 100)}{GDP\ Deflator} \dots\dots\dots(5)$$

dimana GDP deflator yang digunakan adalah berdasarkan indeks 2010=100.

Nilai Tukar Riil:

Nilai tukar riil Indonesia Rupiah terhadap mata uang Negara tujuan ekspor i dihitung berdasarkan persamaan berikut:

$$RER_i = NER_i \times \frac{CPI^{Negara\ tujuan\ ekspor\ i}}{CPI^{IDN}} \dots\dots\dots(6)$$

dimana NER_i merupakan nilai tukar nominal IDR terhadap mata uang negara mitra dagang (Negara tujuan ekspor i),

$CPI^{Negara\ tujuan\ ekspor\ i}$ merupakan *Consumer Price Index* (Indeks Harga Konsumen) di negara mitra dagang Indonesia dan CPI^{IDN} merupakan *Consumer Price Index* (Indeks Harga Konsumen) Indonesia. CPI yang digunakan adalah berdasarkan indeks 2010=100.

Berdasarkan, teori perdagangan internasional, tanda (*sign*) dari koefisien RER, RGDP dan CID diharapkan memiliki nilai positif karena depresiasi nilai tukar, peningkatan PDB negara mitra dagang dan tingginya *Complementary index* antara Indonesia

dan negara mitra dagang akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, tanda dari koefisien TRF dan DISTANCE diharapkan bernilai negatif karena tingginya tarif bea masuk di negara mitra dagang serta jarak yang jauh antara Indonesia dengan negara mitra akan berdampak pada penurunan kinerja ekspor Indonesia ke negara mitra. Dampak dari Atdag dan ITPC terhadap ekspor Indonesia belum diketahui, sehingga koefisien ITPC_D, ATDAG_D, ITPC_Budget dan ATDAG_Budget dapat bernilai positif maupun negatif. Namun demikian berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan studi kasus di negara lain, diharapkan koefisien-koefisien tersebut memiliki tanda positif.

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder dari berbagai sumber seperti BPS, IMF, CEPII, WITS dan World Bank dengan periode pengamatan selama 19 tahun terakhir yaitu periode 1996-2014. Negara yang akan diobservasi adalah negara tujuan ekspor yang telah terdapat Atdag dan atau ITPC serta negara tujuan ekspor yang belum terdapat keduanya. Jumlah negara yang diobservasi adalah 62 negara yaitu 31 negara yang ada Atdag dan atau ITPC dan 31 negara yang tidak ada keduanya (Tabel 1). Pemilihan Negara yang belum memiliki Atdag/ITPC dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan adanya kemiripan karakteristik ekonomi, sosial

budaya serta kesamaan letak geografis suatu negara sebagai contoh terletak pada benua yang sama. Diharapkan pemilihan Negara yang belum terdapat Atdag dan ITPC sebagai pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut dapat mengurangi dan meminimumkan resiko adanya *selection bias* dalam pemilihan negara yang mungkin timbul meskipun tidak dapat menghilangkan resiko tersebut secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Ekspor Indonesia

Selama tahun 2015 ini, permintaan pasar impor negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia belum memperlihatkan kondisi yang membaik. Hal tersebut disebabkan oleh belum stabilnya kondisi perekonomian global, sebagai contoh selama Januari-Mei 2015, permintaan impor Jepang mengalami penurunan sebesar 21,2% YoY. Sementara itu, pada periode yang sama pasar impor RRT, Amerika Serikat, dan Singapura juga mengalami penurunan masing-masing 21,0%, 3,6%, dan 21,9% (Tabel 2).

Selama 2015, secara keseluruhan Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan sebesar USD 7,6 miliar terdiri dari defisit perdagangan migas sebesar USD 6,1 miliar dan surplus non migas sebesar USD 13,6 miliar, sementara pada tahun sebelumnya Indonesia justru mengalami defisit

Tabel 1. Daftar Negara yang Dianalisis

No	Negara dengan Atdag/ITPC	No	Negara dengan Atdag/ITPC	No	Negara tanpa Atdag/ITPC	No	Negara tanpa Atdag/ITPC
1	Thailand	17	Russian Federation	32	Vietnam	48	Austria
2	Malaysia	18	Italy	33	Cambodia	49	Finland
3	Singapore	19	Spain	34	Myanmar	50	Ireland
4	Philippines	20	Netherlands	35	Sri Lanka	51	Portugal
5	RRT	21	Switzerland	36	Turkey	52	Czech Republic
6	Japan	22	Belgium	37	Kazakhstan	53	Romania
7	Korea, Rep.	23	Denmark	38	Azerbaijan	54	Ukraine
8	Hong Kong, RRT	24	Hungary	39	Qatar	55	Slovak Republic
9	India	25	United States	40	Pakistan	56	Argentina
10	Australia	26	Canada	41	New Zealand	57	Colombia
11	Saudi Arabia	27	Brazil	42	Kuwait	58	Venezuela
12	United Arab Emirates	28	Mexico	43	Oman	59	Peru
13	Egypt, Arab Rep.	29	Chile	44	Algeria	60	Uruguay
14	Germany	30	South Africa	45	Sweden	61	Kenya
15	France	31	Nigeria	46	Norway	62	Cote d'Ivoire
16	United Kingdom			47	Poland		

**Tabel 2. Kinerja Impor Beberapa Negara Tujuan Ekspor Utama Indonesia
Periode Januari-Mei 2015**

Negara	Jan-Mei 2015 (USD Miliar)		% Perub. 15/14
	2014	2015	
AS (CIF)	977.2	941.8	- 3.62
RRT	804.4	635.4	- 21.01
Jepang	350.1	275.8	- 21.23
Singapura	158.7	124.0	- 21.88
Taiwan	111.9	95.7	- 14.43
Turki	99.0	88.3	- 10.80
Thailand	94.4	85.4	- 9.50
Australia	93.4	82.1	- 12.11
Brazil	94.9	77.0	- 18.88
Afrika Selatan	41.4	37.0	- 10.58
Argentina	27.1	23.2	- 14.45

Sumber: GTIS (2015)

perdagangan sebesar USD 2,2 miliar. Namun demikian, surplus perdagangan tersebut lebih disebabkan oleh menurunnya kinerja impor sebesar 19,9% YoY, lebih besar dari penurunan eksponya yang mencapai 14,6% YoY.

Penurunan impor yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh permintaan impor minyak yang dapat ditekan hingga 43,4% YoY sehingga membuat surplus neraca perdagangan semakin membaik (Tabel 3).

Tabel 3. Perkembangan Neraca Perdagangan Periode 2011-2015

URAIAN	Nilai : USD Miliar					Perub.(%)	Trend (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2015/14	2011-2015
Total Perdagangan	380.9	381.7	369.2	354.2	293.0	- 17.3	- 5.8
Migas	82.2	79.5	77.9	73.5	43.2	- 41.3	- 12.8
Non Migas	298.8	302.2	291.3	280.7	249.8	- 11.0	- 4.2
Ekspor	203.5	190.0	182.6	176.0	150.3	- 14.6	- 6.6
Migas	41.5	37.0	32.6	30.0	18.6	- 38.2	- 16.6
Non Migas	162.0	153.0	149.9	146.0	131.7	- 9.7	- 4.5
Impor	177.4	191.7	186.6	178.2	142.7	- 19.9	- 5.0
Migas	40.7	42.6	45.3	43.5	24.6	- 43.4	- 9.4
Non Migas	136.7	149.1	141.4	134.7	118.1	- 12.3	- 3.9
Neraca Perdagangan	26.1	- 1.7	- 4.1	- 2.2	7.6		
Migas	0.8	- 5.6	- 12.6	- 13.4	- 6.1		
Non Migas	25.3	3.9	8.6	11.2	13.6		

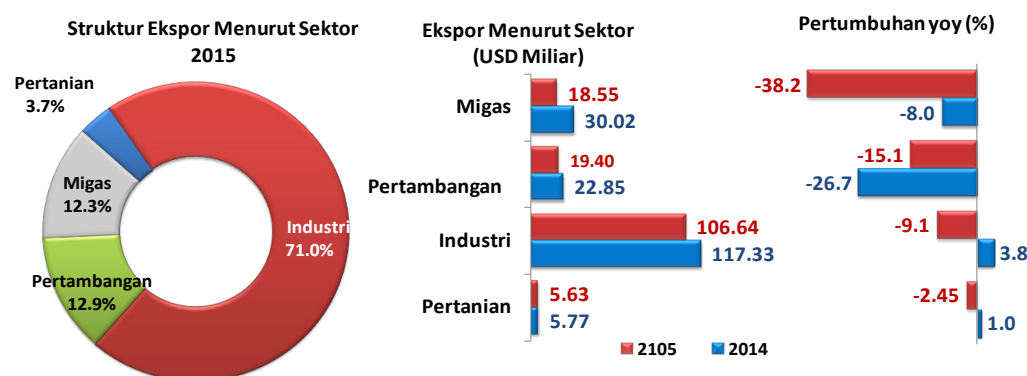
Sumber: BPS (2016a), diolah Puska Daglu, BPPP

Selama semester I - 2015, total ekspor Indonesia mencapai USD 78,3 miliar (turun 11,9% YoY) yang terdiri dari ekspor migas sebesar USD 10,0 miliar (turun 36,3% YoY) dan ekspor non migas sebesar USD 68,3 miliar (turun 6,6% YoY). Ekspor non migas Indonesia ke beberapa negara mitra dagang utama selama semester I - 2015 seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Singapura masih mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,9%; 5,5%; 26,0% dan 15,1% dibandingkan dengan semester I tahun 2014. Namun demikian, ekspor non migas sepanjang Januari-Juni 2015 ke beberapa negara mitra dagang masih menunjukkan peningkatan signifikan, seperti Swiss, Tanzania, Algeria, Kenya, Saudi Arabia dan India. Ekspor non migas ke Swiss tumbuh signifikan lebih dari 1.500% sedangkan ekspor ke Tanzania naik sebesar 135,6%; Algeria

41,8%; Kenya 27,8%; Arab Saudi naik sebesar 23,5% dan India naik sebesar 12,7%.

Pada tahun 2015, ekspor sektor industri pengolahan tetap merupakan sektor yang mendominasi ekspor non migas Indonesia dengan pangsa sebesar 71,0%, yang nilai ekspornya mencapai USD 106,6 miliar. Ekspor sektor tambang dan migas berada pada urutan ke-2 dan ke-3 dengan pangsa masing-masing sebesar 12,9% dan 12,3% dan nilai ekspor mencapai USD 19,4 miliar dan USD 18,6 miliar. Sementara itu, ekspor sektor pertanian hanya memiliki pangsa sebesar 3,7% dan nilai ekspor mencapai USD 5,6 miliar (Gambar 1).

Bijih, kerak, dan abu logam; Perhiasan serta alas kaki adalah beberapa produk yang menopang peningkatan ekspor non migas Indonesia selama tahun 2015. Ekspor bijih, kerak



Gambar 1. Ekspor Indonesia Menurut Sektor

Sumber: BPS, (2016b)

dam abu logam mencapai USD 3,4 miliar atau meningkat sebesar 76,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu produk penopang ekspor lainnya yaitu ekspor perhiasan serta alas kaki masing-masing mencapai USD 5,5 miliar dan USD 4,4 miliar atau meningkat sebesar 18,2% YoY dan 9,7% YoY. Lebih lanjut, ekspor CPO dan produk turunannya,

batubara serta mesin dan peralatan listrik merupakan produk utama ekspor Indonesia, meskipun nilai ekspornya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Ekspor CPO dan produk turunannya mencapai USD 18,7 miliar (turun 11,4% YoY), batubara USD 16,0 miliar (turun 23,9% YoY) dan mesin/ peralatan listrik mencapai USD 8,6 miliar (turun 12,3% YoY) (Tabel 4).

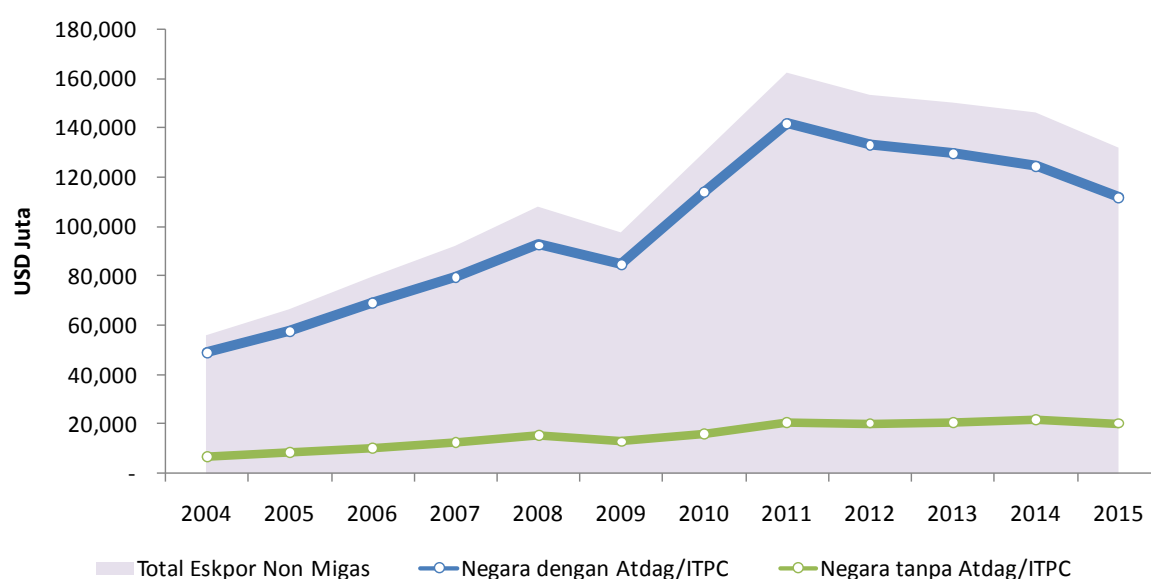
Tabel 4. Kinerja Ekspor Non Migas Berdasarkan HS 2 Digit

HS	URAIAN	2015			
		USD JUTA	% GROWTH NILAI YOY	RIBU TON	% GROWTH VOLUME YOY
	TOTAL EKSPOR	150,252.5	-14.8	507,832.6	-7.6
	TOTAL NON MIGAS	131,700.6	-9.8	462,932.1	-8.8
15	Lemak & minyak hewan/nabati	18,657.9	-11.4	30,277.2	14.2
27	Bahan bakar mineral	16,021.9	-23.9	365,891.7	-10.5
85	Mesin/peralatan listrik	8,550.3	-12.3	516.2	-2.8
40	Karet dan Barang dari Karet	5,913.5	-16.7	3,310.4	0.4
71	Perhiasan/Permata	5,494.9	18.2	2.6	0.0
87	Kendaraan dan Bagiannya	5,422.8	4.0	647.4	7.7
84	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	5,213.7	-12.7	581.2	-9.7
64	Alas kaki	4,507.0	9.7	235.2	9.4
44	Kayu, Barang dari Kayu	3,999.6	-1.8	5,860.2	-7.2
62	Pakaian jadi bukan rajutan	3,978.2	1.2	201.4	-0.7
48	Kertas/Karton	3,565.1	-4.8	4,288.7	-1.1
26	Bijih, Kerak, dan Abu logam	3,378.4	76.1	5,196.4	-49.8
61	Barang-barang rajutan	3,305.0	-3.6	250.9	-3.2
38	Berbagai produk kimia	2,686.6	-35.5	3,438.4	-22.4
03	Ikan dan Udang	2,649.1	-14.9	664.31	-22.8
	SUBTOTAL 15 KOMODITI UTAMA	93,344.1	-9.6	421,362.3	-9.8
	NON MIGAS LAINNYA	38,356.5	-10.1	41,569.8	2.8
	TOTAL MIGAS	18,551.9	-38.8	44,900.5	7.6
	Minyak Mentah	6,457.0	-32.2	15490.0	25.1
	Hasil Minyak	1,754.2	-51.6	4625.8	-16.8
	Gas	10,340.78	-39.8	24784.8	4.2

Sumber: BPS (2016b)

Sejak tahun 2004, proporsi ekspor non migas Indonesia ke negara-negara dimana Atdag dan ITPC berada selalu di atas 80%, sedangkan sisanya ditujukan ke negara-negara tanpa Atdag dan ITPC. Meskipun demikian, pertumbuhan ekspor non migas ke negara-negara tanpa Atdag dan ITPC selama lima tahun terakhir masih mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,4%

per tahun disaat ekspor non migas ke negara-negara dengan Atdag dan ITPC justru mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,3% per tahun. Negara tujuan utama ekspor non migas ke negara-negara tanpa Atdag dan ITPC adalah Tawan (pangsa tahun 2015 sebesar 2,8%), Vietnam (pangsa 2,1%), Pakistan (pangsa 1,5%), Bangladesh (pangsa 1,0%), dan Turki (pangsa 0,9%).



Gambar 2. Ekspor Non Migas Indonesia Menurut Kelompok Negara

Sumber: BPS (2016b)

Dampak Keberadaan Atase Perdagangan (Atdag) dan ITPC Terhadap Nilai Ekspor Non Migas

Metode yang digunakan dalam menganalisis hubungan antara Atdag dan ITPC dengan kinerja ekspor non migas Indonesia baik pada variabel *dependent* nilai ekspor maupun pangsa ekspor di negara mitra dagang adalah dengan pendekatan efek acak (*random effect model/REM*). Menurut Nachrowi

(2005), REM disarankan untuk dipilih jika jumlah data *cross-sectional* lebih besar dari jumlah data *time-series*. Dalam penelitian ini, jumlah data negara mitra dagang atau data *cross-sectional* yang digunakan sebanyak 62 negara, lebih besar dari jumlah waktu yang digunakan, yaitu dari tahun 1996 hingga 2014. Estimasi dengan *generalized least square* pada REM memiliki kelebihan karena varians

akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan estimasi menggunakan *ordinary least square*. Selain itu, alasan lain yang mendasari pemilihan REM adalah masalah kolinearitas yang terjadi jika data diestimasi dengan *fixed effect model* (FEM).

Tabel 5 menunjukkan koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0,539 yang mengindikasikan bahwa sebesar 53,9% dari keragaman variabel respon atau variabel nilai ekspor non migas Indonesia dapat dijelaskan oleh model. Nilai *R-square* tersebut dianggap telah cukup untuk menjelaskan keragaman yang terjadi pada variabel respon mengingat data yang digunakan adalah data kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Selain itu, minimal terdapat satu variabel prediktor yang dapat menjelaskan variasi atau keragaman variabel respon (berdasarkan uji simultan dengan menggunakan uji F yang menghasilkan nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%).

Secara umum, semua koefisien dari variabel prediktor menunjukkan tanda yang diharapkan atau sesuai dengan teori ekonomi. Selain itu, pengaruh masing-masing variabel independen signifikan terhadap kinerja ekspor yang diukur dengan nilai ekspor non migas Indonesia di negara mitra dagang pada tingkat signifikansi 5%, kecuali untuk variabel CID dan tarif.

Tabel 5. Dampak Keberadaan Atdag dan ITPC Terhadap Nilai Ekspor Non Migas Indonesia

	Model 1	Model 2
Cons	18,400	18,160
RER	0,883** (0,000)	0,871** (0,000)
RGDP	0,311** (0,000)	0,323** (0,000)
CID	0,132 (0,639)	0,146 (0,603)
TRF	-0,002 (0,989)	0,019 (0,895)
DISTANCE	-1,116** (0,000)	-1,089** (0,000)
ITPC_D	1,120** (0,002)	
ATDAG_D	1,619** (0,000)	
ITPC_BUDGET		0,062* (0,011)
ATDAG_BUDGET		0,077** (0,000)
R-SQUARE	0,539	0,541
Prob (F-statistic)	0,000	0,000

Keterangan: **) signifikan pada $\alpha = 1\%$ dan *) signifikan pada $\alpha = 5\%$. Nilai *P_value* dalam tanda kurung. Variabel respon: Nilai ekspor non migas Indonesia di negara mitra dagang; variabel prediktor: RER: Nilai tukar riil; RGDP: PDB riil; CID: *Trade Complementary Index*; TRF: Tarif bea masuk rata-rata negara mitra dagang; Distance: Jarak Indonesia dengan negara mitra dagang; ITPC_D: Variabel *dummy* ITPC. Atdag_D: Variabel *dummy* Atdag; ITPC_BUDGET: anggaran ITPC; ATDAG_BUDGET: anggaran Atdag.

Secara spesifik, hasil estimasi yang terlihat pada Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien untuk variabel *dummy*

Atdag pada model 2 mencapai 1,62. Karena variabel tersebut dalam bentuk *dummy* variabel, maka dalam melakukan interpretasi perlu dilakukan transformasi ke dalam bentuk anti natural logaritmanya. pada tabel 5, didapatkan nilai konstanta sebesar 18,4 sehingga anti natural logaritma dari 18,4 adalah USD 97,6 Juta yang merupakan rata-rata nilai ekspor pada $D=0$ atau pada negara tanpa adanya Atdag. Sementara pada negara dengan Atdag ($D=1$), nilai rata-rata ekspor diperoleh dari anti natural logaritma dari 19,52 yang diperoleh dari $18,4 + 1,12$ adalah USD 300,2 Juta. Dengan demikian, ekspor non migas Indonesia ke negara-negara yang telah memiliki Atdag 206,5% lebih tinggi dibandingkan dengan negara tanpa adanya Atdag. Sementara itu, pada variabel *dummy* ITPC diperoleh koefisien sebesar 1,12. Dengan menggunakan langkah yang sama yaitu melakukan transformasi anti natural logaritma diperoleh nilai rata-rata ekspor non migas Indonesia ke negara dimana ITPC berada lebih tinggi 404,8% dibandingkan dengan negara tanpa adanya ITPC. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perwakilan Indonesia secara signifikan cukup efektif dalam meningkatkan nilai ekspor. Selain itu, dapat terlihat bahwa peran Atdag dalam meningkatkan nilai ekspor non migas Indonesia lebih efektif dibandingkan dengan peran ITPC.

Koefisien dari hasil regresi untuk variabel nilai tukar riil (RER) memiliki tanda positif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah dapat meningkatkan ekspor Indonesia. Dalam hal ini, hasil estimasi menunjukkan bahwa peningkatan nilai tukar riil Indonesia terhadap mata uang negara mitra sebesar 1% membuat nilai ekspor non migas Indonesia meningkat sebesar 0,88%. Hal yang sama juga terjadi ketika PDB riil negara mitra dagang mengalami peningkatan. Setiap peningkatan PDB riil negara mitra dagang meningkat sebesar 1% secara signifikan juga meningkatkan ekspor non migas Indonesia sebesar 0,31%. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa nilai ekspor non migas Indonesia akan meningkat sebesar 0,13% setiap indeks komplementer perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra dagang naik 1%. Meskipun demikian, dampak peningkatan indeks tersebut terhadap peningkatan nilai ekspor non migas Indonesia cukup lemah atau tidak signifikan pada level 5%. Hal tersebut disebabkan karena indeks komplementer perdagangan menunjukkan kesesuaian antara struktur ekspor Indonesia dengan impor negara mitra namun tidak memperhatikan faktor indeks komplementer negara pesaing lainnya dengan negara mitra yang juga dapat berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia.

Sebaliknya, hasil estimasi koefisien tarif impor yang diberlakukan oleh negara mitra dagang menunjukkan angka -0,002, dengan nilai *p-value* sangat tinggi (0,99). Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan tarif impor negara mitra dagang Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan nilai ekspor non migas Indonesia. Nilai tarif tersebut tidak signifikan diduga disebabkan karena tarif yang digunakan merupakan tarif rata-rata sehingga tidak dapat menggambarkan secara utuh variasi yang terjadi pada nilai ekspor non migas Indonesia ke negara mitra. Sementara itu, koefisien jarak antara Indonesia dengan negara mitra dagang bertanda negatif dengan nilai 1,12 dan signifikan dalam tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, setiap peningkatan jarak sebesar 1% secara signifikan membuat nilai ekspor non migas Indonesia menurun sebesar 1,12%.

Ketika data *dummy* untuk Atdag dan ITPC diubah menjadi data anggaran Atdag dan ITPC, hasil estimasi menunjukkan hasil serupa. Perbedaan yang signifikan hanya terjadi pada koefisien tarif yang bertanda positif. Sementara itu, tanda koefisien untuk variabel anggaran Atdag dan ITPC, nilai tukar riil Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat, PDB riil negara mitra dagang, dan *trade complementary index* menunjukkan arah yang sama, yaitu positif. Sedangkan koefisien untuk variabel jarak antara Indonesia dengan

negara mitra dagang sama-sama menunjukkan arah negatif.

Koefisien anggaran Atdag sebesar 0,08 (tabel 5, kolom 2) menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan anggaran Atdag sebesar 1%, nilai ekspor di negara-negara dimana Atdag berada akan meningkat sebesar 0,08% dibandingkan dengan negara-negara tanpa keberadaan Atdag. Hal yang sama juga terjadi pada koefisien anggaran ITPC yang mengimplikasikan bahwa ketika anggaran ITPC ditingkatkan sebesar 1%, nilai ekspor non migas Indonesia ke negara tujuan ekspor tempat ITPC berada akan lebih besar. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa penambahan anggaran untuk Atdag dan ITPC berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai ekspor non migas Indonesia.

Hasil estimasi ini juga menunjukkan bahwa nilai tukar riil Rupiah terhadap mata uang negara mitra dan PDB riil negara mitra dagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor non migas nasional. Koefisien untuk variabel nilai tukar riil mengindikasikan bahwa ekspor non migas Indonesia akan meningkat sebesar 0,87% setiap terjadi peningkatan nilai tukar riil Rupiah sebesar 1%. Selain itu, ketika PDB riil negara mitra dagang mengalami peningkatan sebesar 1%, nilai ekspor non migas Indonesia juga akan meningkat sebesar 0,32%. Sementara

itu, dampak peningkatan *trade complementary index* antara Indonesia dengan negara mitra dagang jug tidak signifikan dalam meningkatkan ekspor non migas Indonesia.

Di sisi lain, koefisien jarak antara Indonesia dengan negara mitra dagang menunjukkan nilai -1,1. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap jarak antara Indonesia dengan negara mitra dagang meningkat sebesar 1%, ekspor Indonesia ke negara tersebut akan mengalami penurunan sebesar 1,1%. Di sisi lain, koefisien tarif impor yang diberlakukan oleh negara mitra dagang dari hasil estimasi menunjukkan tanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif yang terjadi di negara mitra dagang sebesar 1% justru membuat ekspor non migas Indonesia ke negara tersebut meningkat sedikit sebesar 0,02%. Meskipun demikian, dampak tarif tersebut secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia (dengan p-value sebesar 0,895).

Dampak Keberadaan Atdag dan ITPC Terhadap Pangsa Ekspor Non Migas di Negara Mitra Dagang

Dampak perwakilan perdagangan luar negeri terhadap pangsa pasar di negara tujuan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 pada model 1 menunjukkan koefisien variasi (*R-square*) sebesar 0,488 yang berarti bahwa 48,8% dari keragaman variabel respon dapat

Tabel 6. Dampak Atdag dan ITPC Terhadap Pangsa Indonesia di Negara Mitra Dagang

	Model 1	Model 2
Cons	8,633	7,594
RER	0,051 ** 0,005	0,048** 0,0071
RGDP	-0,044 0,159	-0,038 0,226
CID	0,454** 0,000	0,463** 0,000
TRF	0,030 0,556	0,041 0,4156
DISTANCE	-1,254** 0,000	-1,141** 0,000
ITPC_D	0,720** 0,001	
ATDAG_D	0,069 0,619	
ITPC_BUDGET		0.058** (0.0019)
ATDAG_BUDGET		0.093* (0.013)
R-SQUARE	0,488	0,469
Prob(F-statistic)	0,000	0,000

Keterangan: **) signifikan pada $\alpha = 1\%$ dan *) signifikan pada $\alpha = 5\%$. Nilai P_value dalam tanda kurung. Variabel respon: pangsa Indonesia di negara mitra dagang; variabel prediktor: RER: Nilai tukar riil; RGDP: PDB riil; CID: *TradeComplementary Index*; TRF: Tarif bea masuk rata-rata negara mitra dagang; Distance: Jarak Indonesia dengan negara mitra dagang; ITPC_D: Variabel *dummy* ITPC. Atdag_D: Variabel *dummy* Atdag; ITPC_BUDGET: anggaran ITPC; ATDAG_BUDGET: anggaran Atdag.

dijelaskan oleh model. Walaupun nilai R-square tidak terlalu besar namun nilai tersebut dianggap telah cukup untuk menjelaskan keragaman yang terjadi pada variabel respon. Lebih lanjut, uji simultan/serentak dengan menggunakan uji F didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 kurang dari $\alpha=5\%$ yang berarti bahwa minimal ada satu

variabel bebas yang dapat menjelaskan variasi atau keragaman pada variabel respon berupa pangsa Indonesia di negara tujuan ekspor utama. Dengan kata lain, model regresi tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Secara umum, semua koefisien regresi menunjukkan tanda yang diharapkan sesuai dengan teori ekonomi kecuali koefisien pada GDP dan tarif yang seharusnya masing-masing memiliki tanda positif dan negatif. Hampir semua variabel regresi menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kinerja ekspor yang diukur dengan pangsa Indonesia di pasar tujuan ekspor pada tingkat signifikansi 5%, kecuali untuk variabel GDP, besaran tarif dan dummy Atdag.

Nilai tukar riil memiliki koefisien sebesar 0,051 yang berarti bahwa setiap Rupiah Indonesia mengalami depresiasi sebesar 1% terhadap mata uang negara mitra, maka pangsa ekspor Indonesia ke negara tujuan akan meningkat sebesar 0,051%. Sementara itu, koefisien GDP riil sebesar -0,044, memiliki tanda yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Tanda koefisien regresi pada variabel GDP riil tersebut berkebalikan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan suatu negara maka semakin besar pula impor negara tersebut. Perbedaan tanda tersebut disebabkan karena pada saat negara "X" mengalami peningkatan GDP maka negara eksportir "Y" akan

bersaing untuk dapat masuk ke dalam pasar "X" karena permintaan impor negara tersebut meningkat. Namun demikian, peningkatan impor negara "X" dari negara "Y" tidak akan serta merta meningkatkan pangsa pasar negara "Y" di pasar impor negara "X" karena pada saat bersamaan juga terjadi peningkatan impor dari negara eksportir lainnya (pesaing negara "Y").

Indeks komplementeri (CID) dan jarak antar negara (DIS) masing-masing memiliki koefisien sebesar 0,454 dan -1,254, kedua koefisien tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan indeks komplementeri Indonesia dengan negara importir di luar negeri sebesar 1% dapat meningkatkan pangsa Indonesia di pasar tujuan ekspor sebesar 0,454% dan penambahan jarak antara negara sebesar 1 Km akan mengurangi pangsa Indonesia di negara tujuan ekspor sebesar 1,254%. Lebih lanjut, koefisien besaran tarif sebesar 0,030 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pangsa Indonesia di pasar negara tujuan. Hal tersebut disebabkan karena data tarif yang digunakan merupakan data *average tariff* secara agregat sehingga tidak mampu menerangkan perilaku ekspor Indonesia termasuk pangsa ekspor Indonesia di negara mitra.

Lebih lanjut, keberadaan ITPC terbukti mampu secara signifikan meningkatkan pangsa Indonesia di

pasar negara tujuan ekspor yang ditunjukkan oleh koefisien variabel dummy ITPC. Dengan menggunakan transformasi ke dalam bentuk anti natural logaritma, diperoleh bahwa ITPC mampu meningkatkan pangsa di pasar negara mitra sebesar 105,4% pada tingkat kepercayaan 5% lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang belum terdapat ITPC. Berkebalikan dengan ITPC, keberadaan Atdag justru tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan pangsa Indonesia di negara dimana Atdag berada dibandingkan dengan negara yang belum terdapat Atdag, meskipun memiliki koefisien yang bernilai positif. Dengan kata lain, keberadaan ITPC dinilai lebih memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan keberadaan Atdag dalam hal peningkatan pangsa Indonesia di pasar tujuan ekspor. Keberadaan Atdag mampu meningkatkan pangsa Indonesia sebesar 7,1% dibandingkan dengan negara yang belum terdapat Atdag.

Hasil analisis dampak perwakilan perdagangan luar negeri terhadap pangsa ekspor ke negara tujuan dengan pendekatan besaran anggaran (*budget*) menunjukkan bahwa semua koefisien regresi menunjukkan tanda yang diharapkan sesuai dengan teori ekonomi kecuali koefisien pada riil GDP dan tarif. Secara umum, hasil regresi dengan menggunakan pendekatan

budget untuk mengukur dampak Atdag dan ITPC sejalan dengan hasil regresi dengan menggunakan pendekatan dummy variabel.

Lebih lanjut, besaran *budget* yang diterima oleh ITPC dan Atase Perdagangan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pangsa pasar Indonesia di negara tujuan ekspor. Koefisien Atdag_Budget dan ITPC_budget masing-masing sebesar 0,058 dan 0,093 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% terhadap budget untuk negara-negara dimana ITPC berada, pangsa ekspor di negara-negara tersebut lebih tinggi sebesar 0,058% dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki ITPC. Hal serupa juga terjadi pada negara-negara dimana Atdag berada, pada negara-negara tersebut, pangsa ekspor akan lebih tinggi sebesar 0,093% dibandingkan dengan negara-negara tanpa Atdag. Pengaruh anggaran Atdag/ITPC terhadap kinerja ekspor non migas Indonesia cukup rendah karena sekitar 50% anggaran tersebut digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, sementara itu sisanya digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan biaya penunjang. Oleh karena itu, peningkatan anggaran, terutama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibutuhkan dalam upaya peningkatan ekspor non migas Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan Atase Perdagangan dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) berpengaruh positif dan signifikan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Keberadaan ITPC juga berpengaruh positif untuk meningkatkan pangsa pasar Indonesia di negara tujuan ekspor, sementara keberadaan Atase Perdagangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pangsa pasar Indonesia di negara tujuan ekspor. Koefisien variabel *dummy* untuk ITPC menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien variabel *dummy* Atdag pada variabel respon pangsa pasar Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ITPC memiliki peran yang lebih besar dalam peningkatan pangsa pasar di negara tujuan dibandingkan dengan peran Atase perdagangan.

Berdasarkan hasil tersebut, maka keberadaan perwakilan perdagangan luar negeri baik Atase perdagangan dan ITPC memiliki peranan yang penting bagi peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Di samping itu, hasil empiris menunjukkan bahwa besaran anggaran (*budget*) yang diterima oleh Atdag dan ITPC di luar negeri terbukti secara signifikan memengaruhi kinerja para perwakilan perdagangan di luar negeri serta berpengaruh positif bagi kinerja

ekspor Indonesia. Dengan demikian, melihat pentingnya peranan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri baik Atdag maupun ITPC, maka penguatan dan pengembangan lembaga tersebut harus terus dilakukan salah satunya melalui: peningkatan anggaran operasional mengingat anggaran yang diterima oleh perwakilan perdagangan juga memiliki pengaruh krusial terhadap peningkatan kinerja ekspor Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kasan, Dr. Wayan R. Susila, Ir. Rahdi Sumitro yang telah memberikan banyak masukan, saran dan bantuan dalam proses penulisan kajian ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih rekan-rekan tim Bidang Ekspor, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang telah memberikan bantuan data dan referensi serta motivasi dalam penulisan kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvarez, E.R., & G. Crespi. (2000). Exporter Performance and Promotion Instruments: Chilean Empirical Evidence. *Estudios de Economía*, 27(2), 225-224.
- Ayob, A. H., & J. Freixanet. (2014). Insights into public export promotion programs in an emerging economy: The case of Malaysian SMEs. *Evaluation and Program Planning*. Volume 46, 38-46.
- Badan Pusat Statistik. (2016a). Data Neraca Perdagangan Indonesia Periode 2011 – 2015.

- Badan Pusat Statistik. (2016b). Data Kinerja Ekspor Indonesia Periode 1996 – 2015 Berdasarkan sektor, kode HS dan Negara Tujuan.
- Cadot, O., A.M. Fernandes., J. Gourdon & A. Matoo. (2015). Are the benefits of export support durable? Evidence from Tunisia. *Journal of International Economics*, 97(2), 310- 324.
- Cassey, A., (2014), The Location of U.S. States' Overseas Offices, *Review of International Economics*, 22(2): 310-325.
- Durmusoglu, S.S., G. Apfelthaler, D.Z. Nayir, R. Alvarez & T. Mughan. (2012). The effect of government-designed export promotion service use on small and medium-sized enterprise goal achievement: A multidimensional view of export performance. *Industrial marketing management* 41(4), 680-691.
- Ferreira, M. I. V., & A.A Teixeira. (2011). *Organizational Characteristics and Performance of Export Promotion Agencies: Portugal and Ireland compared*. Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto. Retrieved from <http://ideas.repec.org/p/por/fepps/424.html>.
- Freixanet, J. (2012). Export promotion programs: Their impact on companies' internationalization performance and competitiveness. *International Business Review*, 21(6), 1065-1086.
- Grater, S., E. Steenkamp, W. Viviers, & L. Cuyvers. (2015). Combining the export promotion of products and services: the case of South Africa. *Southern African Business Review*, 18(3), 93-118.
- Hayakawa, K., H.H. Lee, D. Park. (2011). Do Export Promotion Agencies Promote Exports? *IDE Discussion Paper No. 313*.
- Kang, K. (2011). Overseas Network of Export Promotion Agency and Export Performance: The Korean Case. *Contemporary Economic Policy*, 29(2), 274–283.
- Kementerian Perdagangan (Kemendag). (2015). Data *Existing* Atdag dan ITPC. Makalah: Disajikan Pada Diskusi Terbatas Kajian Pengembangan Pembukaan Perwakilan Perdagangan Luar Negeri Pada Tanggal 10 Februari 2015.
- Kostecki, M., & O. Naray. (2007). *Commercial Diplomacy and International Business*. Netherlands Institute of International Relations' Clingendael'.
- Ledermen, D., M. Olarreaga, & L. Payton. (2010). Export Promotion Agencies: Do They Work?. *Journal of Development Economics*, 91(2), 257-265.
- Lederman, D., Olarreaga, M., & Zavala, L. (2015). Export promotion and firm entry into and survival in export markets. *World Bank Policy Research Working Paper*, (7400).
- Lembaga Arsip Nasional (LAN). (2015). Data Penelusuran Arsip Koleksi Peraturan Perundang-Undangan Dirinci Menurut Jenis Keputusan Presiden.
- Martincus, C. V., Carballo, J., & P. Garcia. (2010). Firm Size and The Impact of Export Promotion Programs. *Applied Economic Letters*, 18, 191-244.
- Martincus, C. V., & J. Carballo (2008). Is Export Promotion Effective in Developing Countries? Firm-Level Evidence on The Intensive and The Extensive Margins of Exports. *Journal of International Economics*, 76(1), 89–106.
- Moons, S. (2012). What are the effects of economic diplomacy on the margins of trade? *International Journal of Diplomacy and Economy*, 1(2), 147-162.

- Nachrowi, D (2005). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Fakultas Ekonomi UI: Jakarta. Hal 309.
- Pareja, S.G., R.L. Vivero, J.A.M. Serrano. (2008). Measuring The Impact Of Regional Export Promotion: The Spanish Case. *Papers in Regional Science*, 87(1), 139-146.
- Pareja, S.G., R. Llorca-Vivero., J.A. Martinez-Serrano, & F. Requena-Silvente (2015). Regional export promotion offices and trade margins. *Review of World Economics*, 151(1), 145-167.
- Rose, A. K. (2007). The Foreign Service and Foreign Trade: Embassies as Export Promotion. *The World Economy*, 30(1), 22–38.
- Ruël, H. J. M., & L. Zuidema (2012). The Effectiveness of Commercial Diplomacy; A Survey Among Dutch Embassies and Consulates. *Clingendael Discussion Papers Series.*, (123), 1–54.
- Van Biesebroeck, J., E. Yu., S. Chen. (2010). The Impact of Trade Promotion Services on Canadian Exporter Performance. Center for Economic Studies - Discussion papers (DPS) 10.14. Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Economische Studiën.
- Xu, T. S., & Y.Q. Zhang. (2014). Impact of Trade Promotion Agencies on China's Export Binary Marginal Growth. *Contemporary Finance & Economics*, 2, 1-10.

ANALISIS INTEGRASI HARGA LADA DI PASAR DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

An Analysis of Pepper Price Integration at Domestic and International Markets

Dewi Asrini Fazaria¹, Dedi Budiman Hakim², Sahara²

¹)Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Pascasarjana IPB

²)Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

Kampus IPB, Dramaga Bogor, 16680, Indonesia.

e-mail: dewiasrini@gmail.com

Naskah diterima: 18/03/2016 Naskah direvisi: 03/06/2016 Disetujui diterbitkan: 26/09/2016

Abstrak

Lada merupakan produk komoditas ekspor Indonesia yang diekspor ke berbagai negara. Ketergantungan lada Indonesia pada pasar ekspor menjadikan harga lada domestik mengikuti fluktuasi harga lada di pasar dunia meskipun harga lada di pasar domestik tidak selalu linier dengan harga lada dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan harga lada Indonesia dengan harga lada internasional. Data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 1990-2014 dan dianalisis dengan menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil analisis menunjukkan bahwa harga lada hitam lokal dan lada hitam *spot* memiliki hubungan integrasi baik pada jangka panjang maupun pendek. Sementara pengaruh timbal balik terjadi pada harga lada putih. Harga lada putih lokal terintegrasi dengan harga lada putih ekspor dan harga lada putih *spot* baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Penyaluran informasi harga yang lancar dan dapat diakses oleh setiap pelaku pemasaran sangat perlu untuk diupayakan. Diharapkan dengan adanya kelancaran informasi, pelaku pemasaran khususnya yang berada di tingkat lokal memiliki posisi tawar yang semakin kuat serta dapat terhindar dari praktek yang menyebabkan timbulnya *market power* dalam pemasaran lada.

Kata kunci: Integrasi Pasar, VECM, Lada Putih, Lada Hitam.

Abstract

Pepper is one of the Indonesian commodities which has been exported to various countries. The dependence of Indonesia's exporting pepper has caused the domestic price of pepper to follow the fluctuations of the world's market price, even though the domestic price is not necessarily linked to the world market. This study aims to find out the relation between the domestic pepper price to the world's market price. The data were from 1990-2014 and were analyzed using Vector Error Correction Model (VECM) method. The results indicated that the price of local black pepper and spot black pepper had good integration relationship in long and short term. Besides, the mutual relation occurs in white pepper price. The price of local white pepper is related to the exported one, and is also related to the price of spot white pepper both in short term and long term. Good distribution of pepper and access to current pricing information is necessary to be done. By using a good access to information, marketing actors especially those at local marketing level will have a stronger bargaining position and therefore it can avoid practices that might cause market power in pepper market.

Keywords: Market Integration, VECM, White Pepper, Black Pepper

JEL Classification: F15, Q11, Q17

PENDAHULUAN

Lada merupakan salah satu produk sub sektor perkebunan yang termasuk dalam kategori rempah-rempah. Lada memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada tahun 2013, sumbangan perdagangan lada kepada PDB merupakan terbesar ke lima setelah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa, yaitu sebesar 342 juta USD dari total PDB (Ditjenbun, 2014). Sementara bagi masyarakat, perkebunan lada mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Budidaya tanaman lada merupakan usaha padat karya. Pada pengusahaan tanaman lada secara intensif, satu KK mampu mengelola kurang lebih 0.5 ha lahan perkebunan lada (Suwanto, 2013). Besarnya kebutuhan tenaga kerja dalam pengelolaan lada menjadikan usaha perkebunan lada menjadi usaha yang mampu memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Pada tahun 2013, terdapat sekitar 265.574 rumah tangga yang mengusahakan perkebunan lada (BPS, 2015). Berdasarkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh, diketahui bahwa komoditas lada memiliki prospek yang baik untuk terus dikembangkan lebih lanjut.

Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir lada terbesar ke dua di dunia setelah Vietnam (UNCOMTRADE, 2014). Negara

pengekspor utama lain selain Indonesia dan Vietnam adalah Brazil, India, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Tiongkok dan Meksiko. Menurut data dari IPC (2014), pada tahun 2013, pangsa pasar ekspor lada Indonesia adalah 18% dari total lada yang diperdagangkan di dunia. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pangsa ekspor Indonesia tahun 2000 yang jumlahnya mencapai 23%.

Menurut Bappebti (2014), permintaan lada dunia mencapai 400.000 ton per tahun dan meningkat setiap tahunnya sekitar 5 – 7%. Sementara kemampuan produksi dan ekspor lada Indonesia justru terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012, produksi lada Indonesia mencapai 87.841 ton dengan ekspor mencapai 62.607 ton. Pada tahun 2013, produksi lada Indonesia menurun menjadi 81.039 ton dengan ekspor sebesar 47.908 ton (Kementan, 2014).

Isu utama tentang faktor yang mempengaruhi merosotnya produksi dan ekspor lada selama beberapa dekade terakhir adalah volatilitas harga. Fluktuasi dan rendahnya harga lada memengaruhi pendapatan petani, dan rendahnya pendapatan tersebut berakibat berkurangnya gairah petani untuk merawat kebun mereka. Akibat lebih lanjut, serangan hama meningkat dan sebagian dari mereka meninggalkan usaha yang sudah tidak lagi menguntungkan (IPC dan FAO, 2005; Ginting, 2014).

Sebanyak sekitar 80% produksi lada Indonesia dikirim ke berbagai negara di dunia. Ketergantungan pasar lada Indonesia kepada pasar lada ekspor diduga berakibat harga lada Indonesia fluktuatif mengikuti fluktuasi pada tingkat pemasaran yang lebih tinggi. Harga lada dunia dengan demikian memengaruhi harga lada pada pasar domestik. Hal ini bisa dimengerti mengingat perdagangan yang terjadi antar satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat menimbulkan pasar yang terpadu. Perubahan harga yang terjadi pada suatu pasar dapat memengaruhi perubahan harga di pasar lainnya jika terjadi keterpaduan atau integrasi yang baik diantara kedua pasar. Pasar yang terintegrasi didefinisikan sebagai lokasi yang memiliki korelasi harga yang tinggi (Harriss, 1979 dalam McNew, 1996). Jika pasar terintegrasi, transmisi perubahan harga akan dengan sempurna terjadi di kedua lokasi. Jika tanpa adanya integrasi, tidak akan terjadi mekanisme yang membuat perubahan *excess demand* ditransfer secara spasial sehingga tidak ada perubahan harga yang dibagi diantara pasar yang tidak terintegrasi (McNew, 1996).

Integrasi pasar beragam bentuknya, diantaranya adalah integrasi spasial (Asmarantaka, 2012). Integrasi spasial merupakan hubungan antar pasar yang terpisah secara geografis atau wilayah. Tomek dan Robinson (1990) dan Fitrianti (2009), menyebutkan bahwa integrasi pasar spasial menunjukkan pergerakan

harga dan secara umum merupakan signal dari transmisi harga dan informasi diantara pasar yang terpisah secara spasial.

Menurut Asmarantaka (2012), integrasi pasar merupakan salah satu indikator dari efisiensi pemasaran, terutama efisiensi harga. Integrasi pasar dapat diartikan sebagai seberapa jauh pembentukan harga suatu komoditas pada tingkat lembaga pemasaran tertentu dipengaruhi oleh harga di tingkat lembaga lainnya. Integrasi pasar menunjukkan seberapa jauh perubahan harga yang terjadi di tingkat pasar acuan (referensi) akan menyebabkan terjadinya perubahan di tingkat pasar pengikut.

Pasar yang terintegrasi secara baik merupakan pasar yang efisien karena informasi dapat disalurkan dengan baik. Hal ini ditandai dengan bergerakanya harga di satu pasar dikarenakan adanya perubahan harga di pasar lain. Jika perdagangan terjadi pada dua wilayah yang berbeda dan harga di daerah yang mengimpor sebanding dengan harga yang berlaku di daerah yang mengekspor ditambah dengan biaya yang diperlukan, maka kedua pasar tersebut dapat dikatakan telah terintegrasi (Ravallion, 1986). Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perubahan harga pada pasar acuan akan ditransfer secara sempurna (100%) ke pasar pengikut, yakni di tingkat petani (Yustianingsih, 2012).

Identifikasi tentang ada tidaknya integrasi pasar lada di Indonesia dengan pasar dunia akan memberikan gambaran mengenai efisiensi dari usaha tersebut, dan mengetahui perubahan harga yang diterima oleh setiap lembaga pemasaran lada. Integrasi pasar sebagai salah satu indikator efisiensi pasar sangat penting untuk diketahui dalam pembangunan pertanian, sebagai suatu informasi penting sebagai landasan pengambilan keputusan tentang pemasaran lada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji integrasi pasar lada hitam dan lada putih Indonesia dengan pasar internasional.

METODE

Analisis integrasi pasar dalam penelitian ini menggunakan *Vector Autoregression (VAR)/Vector Error Correction Model (VECM)*. Sebelum menentukan penggunaan VAR/VECM dalam model, data harus terlebih dahulu dicari tahu apakah terdapat hubungan kointegrasi atau tidak dengan menggunakan uji trace statistic maupun *Eiugenvvalue test*. Apabila model yang dianalisis tidak memiliki hubungan kointegrasi maka model analisis yang digunakan dalam analisis integrasi pasar adalah VAR, dan sebaliknya jika terdapat hubungan kointegrasi maka model analisis yang digunakan adalah VECM. Penggunaan VAR/VECM dalam analisis integrasi pasar sudah banyak dilakukan sebelumnya seperti oleh

Muzendi (2014), Rachman (2011) dan Nurhidayati (2015) untuk komoditas perkebunan, Asmara & Ardhiani (2010), Srofenyoh (2015) untuk komoditas hortikultura, serta Habte (2014) dan Zainuddin (2015) untuk komoditas peternakan. Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis integrasi pasar dengan VAR/VECM adalah uji stasioneritas. Uji stasioneritas penting untuk dilakukan karena untuk menghindari timbulnya regresi palsu (*spurious regression*). Data dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan varians konstan sepanjang waktu. Stasioneritas data diuji menggunakan *Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)* sebagai berikut:

$$\Delta LPBP_t = \beta_0 + \beta_1 LPBP_{t-1} + \beta_2 \Delta LPBP_{t-2} + \dots + \beta_n \Delta LPBP_{t-n} + \varepsilon_t$$

$$\Delta FOBBP_t = \beta_0 + \beta_1 FOBBP_{t-1} + \beta_2 \Delta FOBBP_{t-2} \dots + \beta_n \Delta FOBBP_{t-n} + \varepsilon_t$$

$$\Delta SPOTBP_t = \beta_0 + \beta_1 SPOTBP_{t-1} + \beta_2 \Delta SPOTBP_{t-2} \dots + \beta_n \Delta SPOTBP_{t-n} + \varepsilon_t$$

$$\Delta LPWP_t = \beta_0 + \beta_1 LPWP_{t-1} + \beta_2 \Delta LPWP_{t-2} + \dots + \beta_n \Delta LPWP_{t-n} + \varepsilon_t$$

$$\Delta FOBWP_t = \beta_0 + \beta_1 FOBWP_{t-1} + \beta_2 \Delta FOBWP_{t-2} \dots + \beta_n \Delta FOBWP_{t-n} + \varepsilon_t$$

$$\Delta SPOTWP_t = \beta_0 + \beta_1 SPOTWP_{t-1} + \beta_2 \Delta SPOTWP_{t-2} \dots + \beta_n \Delta SPOTWP_{t-n} + \varepsilon_t$$

Dimana:

Δ = Operator perbedaan tingkat pertama

$LPBP_t$ = Harga lada hitam lokal periode waktu t (USD/ton)

$FOBBP_t$ = Harga lada hitam tingkat eksportir periode waktu t (USD/ton)

$SPOTBP_t$ = Harga lada hitam *spot* New York periode waktu t (USD/ton)

$LPWP_t$ = Harga lada putih lokal periode waktu t (USD/ton)

$FOBWP_t$ = Harga lada putih tingkat eksportir periode waktu t (USD/ton)

$SPOTWP_t$ = Harga lada putih *spot* New York periode waktu t (USD/ton)

β = Koefisien parameter

ε_t = Error

Langkah selanjutnya adalah melihat hubungan kointegrasi yang terjadi antar variabel berdasarkan dua uji statistik yaitu *trace statistic* ($\lambda_{trace}(\tau)$) dan *maximum eigenvalue test* (λ_{max}). Secara umum hubungan kointegrasi dengan uji *trace statistic* dan *maximum eigenvalue* dapat dituliskan dengan persamaan berikut:

$$\lambda_{trace}(r) = -T \sum_{i=r+1}^n \ln \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \lambda_i)$$

$$\lambda_{max}(r, r+1) = -T \ln(1 - \lambda_{r+1})$$

dimana:

T = Jumlah observasi yang digunakan

λ_i = Estimasi nilai ke- i ordo *eigenvalue* yang didapatkan dari matriks Π

r = pangkat yang mengindikasikan jumlah vektor kointegrasi

Jika terdapat kointegrasi dalam persamaan, maka analisis integrasi

dapat dilanjutkan dengan metode VECM. VECM merupakan model VAR yang terestriksi. Apabila data stasioner pada proses diferensi namun variabel tidak terkointegrasi disebut dengan model VAR dengan data differensi (VAR *in difference*). Adapun sistem persamaan dengan model VAR yang dimodifikasi dari persamaan Enders (2004) untuk menghubungkan ketiga pasar adalah sebagai berikut:

$$LPBP_t = \alpha_{01} + \sum_{i=1}^p \alpha_{i1} LPBP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_{i1} FOBBP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_{i1} SPOTBP_{t-i} + \varepsilon_{1t}$$

$$FOBBP_t = \alpha_{02} + \sum_{i=1}^p \alpha_{i2} LPBP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_{i2} FOBBP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_{i2} SPOTBP_{t-i} + \varepsilon_{2t}$$

$$SPOTBP_{t-i} = \alpha_{03} + \sum_{i=1}^p \alpha_{i3} LPBP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_{i3} FOBBP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_{i3} SPOTBP_{t-i} + \varepsilon_{3t}$$

$$LPWP_t = \alpha_{04} + \sum_{i=1}^p \alpha_{i4} LPWP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_{i4} FOBWP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_{i4} SPOTWP_{t-i} + \varepsilon_{4t}$$

$$FOBWP_t = \alpha_{05} + \sum_{i=1}^p \alpha_{i5} LPWP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_{i5} FOBWP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_{i5} SPOTWP_{t-i} + \varepsilon_{5t}$$

$$SPOTWP_{t-i} = \alpha_{06} + \sum_{i=1}^p \alpha_{i6} LPWP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_{i6} FOBWP_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_{i6} SPOTWP_{t-i} + \varepsilon_{6t}$$

Restriksi tambahan harus diberikan karena keberadaan data yang

tidak stasioner namun terkointegrasi. Spesifikasi VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar konvergen dalam hubungan kointegrasi namun tetap membiarkan dinamisasi jangka pendek. Adapun persamaan VECM dalam bentuk matriks untuk pasar lada hitam yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} \Delta LPBP_t \\ \Delta FOBBP_t \\ \Delta SPOTBP_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta LPBP_{t-1} \\ \Delta FOBBP_{t-1} \\ \Delta SPOTBP_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta ECT_1 \\ \delta ECT_2 \\ \delta ECT_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

Persamaan VECM dalam bentuk matriks untuk pasar lada putih yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$\begin{bmatrix} \Delta LPWP_t \\ \Delta FOBWP_t \\ \Delta SPOTWP_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta LPWP_{t-1} \\ \Delta FOBWP_{t-1} \\ \Delta SPOTWP_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta ECT_1 \\ \delta ECT_2 \\ \delta ECT_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

δECT = mekanisme penyesuaian keseimbangan yang terjadi pada periode t-n (mekanisme penyesuaian jangka panjang).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* harga dari periode Januari 1995 sampai Desember 2014, dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan *International Pepper*

Community (IPC). Data yang digunakan terdiri dari data harga lada hitam dan lada putih. Harga lokal diwakili oleh harga lada di tingkat pedagang besar, harga FOB adalah harga ekspor dan harga lada internasional yang diwakili oleh harga lada hitam dan putih pada pasar *spot* (fisik) di New York.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Harga Lada

Selama periode Januari 1995 hingga Desember 2014 harga lada hitam di pasar lokal sangat bervariasi, berdasarkan nilai CV yang paling besar yaitu 60.713%. Variasi harga yang tinggi tersebut disebabkan oleh minimnya pemilahan sehingga mutu lada hitam yang dihasilkan beragam pada tingkat pedagang besar. Lebih jelasnya deskripsi statistik pada Tabel 1 memperlihatkan variasi tersebut.

Lada putih memiliki harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lada hitam. Hal tersebut dikarenakan harga lada putih sangat bergantung kepada *supply* lada. Fluktuasi *supply* yang terjadi di tingkat lokal dapat menyebabkan

Tabel 1. Deskripsi Statistik Harga Lada Hitam dan Lada Putih Januari 1995 - Desember 2014

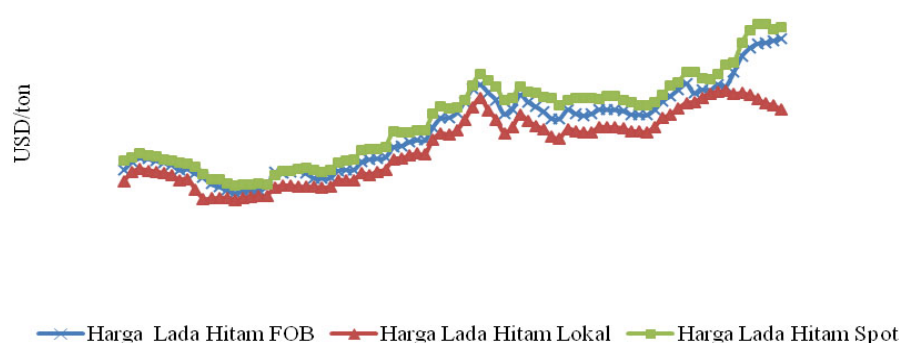
Variabel	Lada Hitam			Lada Putih		
	Mean	Std Dev	CVa	Mean	Std Dev	CVa
Lokal	3015.310	1830.676	60.713	4619.191	2526.417	54.694
FOB	3749.104	2171.606	57.923	5211.574	2940.054	56.414
SPOT	4039.433	2312.119	57.239	5617.341	3005.755	53.509

Keterangan: aKoefisien varians (%).

fluktuasi harga lada putih. Hal yang sama juga terjadi pada pasar lada hitam ekspor, yang memiliki fluktuasi harga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pasar lada hitam lokal dan pasar lada hitam *spot*.

Secara umum, harga lada hitam di pasar lokal, ekspor dan *spot* memiliki

tren yang sama-sama meningkat. Namun pergerakan yang terjadi antara harga di pasar lokal, ekspor dan *spot* pada komoditas lada hitam tidak selalu berubah secara bersamaan. Pergerakan harga lada hitam dapat dilihat pada Gambar 1.



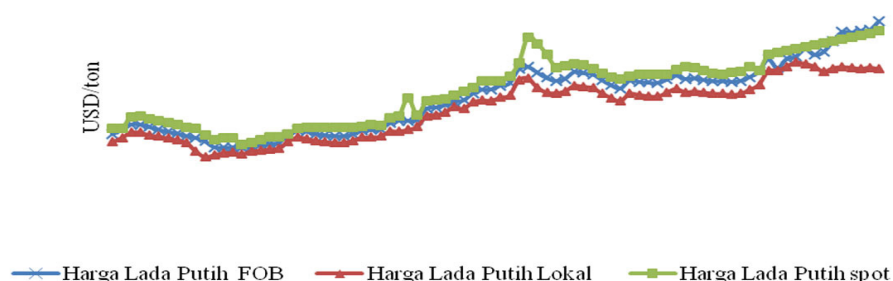
Gambar 1. Perkembangan Harga Lada Hitam 1995-2014

Sumber: IPC (diolah)

Pada akhir tahun pengamatan, saat terjadi tren peningkatan harga lada hitam di pasar lada hitam ekspor dan pasar lada hitam *spot* hingga mencapai 11.025 USD/ton, pada pasar lada hitam lokal justru terjadi penurunan harga. Pergerakan harga yang berbeda pada tiap harga pada satu saluran pemasaran mengindikasikan terjadinya *assymetric price information*. Perubahan atau

pergerakan harga yang terjadi di pasar lada hitam ekspor dan *spot* tidak ditransmisikan kepada pasar lada hitam dari tingkat pedagang besar.

Berbeda dengan itu adalah pergerakan harga lada putih. Pada Gambar 2 disajikan pergerakan harga lada putih yang terjadi di tingkat lokal, eksportir dan *spot*.



Gambar 2. Perkembangan Harga Lada Putih Tahun 1995-2014

Sumber: International Pepper Community (2014), diolah

Seperti yang terjadi pada pasar lada hitam, pada pasar lada putih secara keseluruhan tren pergerakan harga juga menunjukkan tren yang meningkat. Namun dalam periode-periode tertentu, harga lada putih di tingkat lokal, ekspor dan *spot* tidak bergerak secara bersama. Contohnya pada akhir tahun pengamatan, yaitu tahun 2014, harga lada putih ekspor dan harga lada putih *spot* mengalami peningkatan, namun pada tingkat lokal, harga lada putih tidak ikut mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya *assymetric price information* pada pasar lada putih lokal, ekspor dan *spot*.

Perdagangan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat menimbulkan pasar yang terpadu atau terintegrasi secara spasial. Perubahan harga yang terjadi pada suatu pasar dapat memengaruhi perubahan harga di pasar lainnya jika terjadi keterpaduan atau integrasi yang baik diantara kedua pasar. Pasar lada yang terintegrasi dengan baik mengindikasikan bahwa

pasar lada yang terbentuk dalam saluran pemasaran lada sudah efisien. Pasar lada yang efisien mengindikasikan bahwa informasi yang diterima untuk setiap perubahan di tingkat pasar lada tertentu dapat diketahui dengan baik oleh tingkat pasar lada lainnya.

Uji Kointegrasi Lada Hitam

Sebelum melakukan uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang antara harga di pasar lada, terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas data. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa harga lada hitam dan lada putih pada pasar lokal, ekspor dan *spot* stasioner pada tingkat *first different*.

Perubahan harga pada pasar lada hitam *spot* dapat memengaruhi harga pada pasar lada hitam di tingkat lokal dan eksportir secara negatif. Saat terjadi peningkatan harga lada hitam *spot* sebesar 1 USD/ton maka akan terjadi penurunan harga lada hitam pada pasar lokal sebesar 0.735 USD/ton dan harga lada hitam ekspor sebesar 0.925 USD/ton. Hasil uji kointegrasi pada pasar lada hitam dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi Pasar Lada Hitam

Persamaan Kointegrasi	LPBP(-1)	FOBBP(-1)	SPOTBP(-1)
Kointegrasi 1	1.000	0.000	-0.735 [-60.055]***
Kointegrasi 2	0.000	1.000	-0.925 [-63.979]***

Keterangan: ***signifikan pada taraf nyata 1%

Pada analisis VECM diperoleh variabel *Error Correction Term* (ECT) yang merupakan koreksi kesalahan

atau koreksi penyimpangan yang terjadi pada jangka pendek untuk menuju keseimbangan pada jangka panjang.

Pada jangka pendek, penyimpangan yang terjadi pada pasar lada hitam ekspor akan dikoreksi sebesar 0.186 dan 0.268 per bulan menuju keseimbangan jangka panjang dan pada pasar *spot*, penyimpangan akan dikoreksi sebesar 0.184 per bulan.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa variabel harga lada hitam lokal pada jangka pendek dipengaruhi oleh harga lada hitam lokal pada tiga dan empat bulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi

permintaan adalah harga barang itu sendiri. Oleh karena itu harga suatu barang pada bulan sebelumnya dapat memengaruhi pembentukan harga barang tersebut pada bulan ini (Aji, 2010). Selain dipengaruhi oleh harga pada tingkat pasar lokal sendiri, harga lada hitam lokal juga dipengaruhi oleh harga lada hitam pada tingkat eksportir pada satu dan tiga bulan sebelumnya serta harga lada hitam *spot* pada empat bulan sebelumnya. Integrasi jangka pendek pada pasar lada hitam dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Integrasi Jangka Pendek Pasar Lada Hitam

Error Correction	D(LPBP)	D(FOBBP)	D(SPOTBP)
ECT1	-0.043 [-0.528]	0.186 [2.199]**	0.184 [2.784]***
ECT2	-0.096 [-1.075]	-0.268 [-2.873]***	-0.056 [-0.770]
D(LPBP(-1))	0.124 [1.138]	0.020 [0.180]	-0.031 [-0.354]
D(LPBP(-2))	-0.062 [-0.564]	-0.058 [-0.507]	-0.225 [-2.502]***
D(LPBP(-3))	-0.258 [-2.420]***	-0.153 [-1.378]	-0.269 [-3.089]***
D(LPBP(-4))	0.237 [2.215]**	-0.084 [-0.757]	0.001 [0.013]
D(LPBP(-5))	-0.039 [-0.372]	-0.035 [-0.316]	0.003 [0.034]
D(FOBBP (-1))	0.271 [2.332]***	0.253 [2.095]**	0.362 [3.825]***
D(FOBBP (-2))	0.082 [0.704]	0.033 [0.276]	0.214 [2.262]**
D(FOBBP (-3))	0.264 [2.356]***	0.114 [0.973]	0.245 [2.677]***
D(FOBBP (-4))	0.014 [0.136]	-0.071 [-0.654]	0.054 [0.631]
D(FOBBP (-5))	-0.010 [-0.098]	-0.029 [-0.276]	0.017 [0.204]
D(SPOTBP(-1))	-0.044 [-0.303]	0.168 [1.104]	0.108 [0.905]
D(SPOTBP(-2))	-0.230 [-1.567]	-0.113 [-0.740]	-0.187 [-1.569]
D(SPOTBP(-3))	-0.081 [-0.565]	0.076 [0.507]	-0.011 [-0.094]
D(SPOTBP(-4))	-0.234 [-1.717]*	-0.026 [-0.185]	-0.190 [-1.714]*
D(SPOTBP(-5))	0.203 [1.611]	0.169 [1.290]	0.099 [0.972]

Keterangan: ***signifikan pada taraf nyata 1%, ** signifikan pada taraf nyata 5%, signifikan pada taraf nyata 10%.

Harga lada hitam ekspor pada jangka pendek dipengaruhi oleh harga lada hitam ekspor sendiri pada satu bulan sebelumnya secara positif pada taraf nyata 1%. Harga lada hitam ekspor pada bulan lalu menjadi acuan dalam penentuan harga untuk harga lada hitam ekspor bulan ini. Perilaku eksportir Indonesia banyak dipengaruhi oleh harga yang terjadi pada periode sebelumnya (Jumadi, 1991) sehingga penentuan harga pada bulan ini dipasar lada hitam ekspor berpatokan pada harga lada hitam yang terjadi pada bulan sebelumnya. Harga lada hitam *spot* dipengaruhi oleh harga lada hitam lokal pada dua dan tiga bulan sebelumnya, harga lada hitam ekspor pada satu, dua dan tiga bulan sebelumnya dan harga lada hitam *spot* pada empat bulan sebelumnya. Harga lada hitam lokal dipengaruhi oleh harga lada hitam pada dua dan tiga bulan sebelumnya, dan harga lada hitam *spot* pada empat bulan sebelumnya memiliki pengaruh yang negatif terhadap perubahan harga lada hitam *spot* pada bulan ini, sedangkan harga lada hitam ekspor pada satu, dua dan tiga periode

sebelumnya memiliki pengaruh yang positif terhadap perubahan harga lada hitam *spot* bulan ini.

Informasi tambahan mengenai hubungan saling memengaruhi juga dapat diperoleh dari uji kausalitas Granger. Uji kausalitas Granger dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar pasar lada hitam lokal (LPBP), pasar lada hitam ekspor (FOBBP) dan pasar lada dunia hitam diwakilkan dengan pasar *spot* (SPOTBP). Pengujian kausalitas dapat digunakan untuk melihat arah transmisi. Guncangan harga yang disebabkan oleh efek permintaan akan memberikan efek transmisi yang berbeda dengan guncangan harga akibat efek penawaran. Hasil uji kausalitas Granger untuk pasar lada hitam dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan informasi tambahan melalui uji kausalitas pada taraf nyata 5%, diketahui bahwa pasar lada hitam lokal dan ekspor saling memengaruhi atau memiliki pengaruh dua arah. Begitu juga antara harga yang terjadi di pasar lada hitam ekspor dan *spot*.

Tabel 4. Hubungan Kausalitas Pasar Lada Hitam

Null Hipotesis	Obs	F-Statistic	Prob
FOBBP tidak memengaruhi LPBP	238	2.609	0.026
LPBP tidak memengaruhi FOBBP		5.218	0.000
SPOTBP tidak memengaruhi LPBP	238	1.121	0.350
LPBP tidak memengaruhi SPOTBP		3.178	0.009
SPOTBP tidak memengaruhi FOBBP	238	3.928	0.002
FOBBP tidak memengaruhi SPOTBP		3.882	0.002

Namun antara pasar lada hitam lokal dan *spot*, pengaruh yang ada hanya satu arah. Harga lada hitam lokal dapat memengaruhi harga lada hitam di pasar *spot*, namun tidak sebaliknya. Diduga besarnya peran Indonesia sebagai salah satu eksportir utama lada hitam dunia menjadikan harga lada hitam Indonesia mampu memengaruhi harga lada hitam di pasar *spot*.

Seperti yang telah dikemukakan, sebagian besar produksi lada hitam Indonesia dikirim ke luar negeri untuk disalurkan ke berbagai negara tujuan ekspor. Kemampuan Indonesia dalam mengeksportir lada hitam sangat bergantung kepada kemampuan pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga perubahan yang terjadi pada pasar lokal, khususnya perubahan harga sebagai suatu sinyal dalam pengambilan keputusan ekonomi dapat memengaruhi harga yang terdapat pada pasar ekspor (FOB). Sebaliknya, pasar lada ekspor yang merupakan pasar tujuan utama pemasaran lada hitam mampu memengaruhi harga yang terjadi pada tingkat lokal karena sebagian besar penawaran lada hitam oleh tingkat lokal diserap oleh pasar eksportir yaitu sekitar 80% dari produksi.

Terjadi hubungan kausalitas dua arah antara pasar lada hitam ekspor dan pasar lada hitam *spot*. Harga pasar lada hitam ekspor mampu memengaruhi harga lada hitam *spot* dan begitu juga sebaliknya. Efek permintaan dan

penawaran memiliki kekuatan yang relatif sama. Penawaran lada hitam Indonesia yang besar untuk pasar dunia memengaruhi *supply* lada hitam di dunia sehingga perubahan harga yang terjadi di pasar lada hitam ekspor mampu memengaruhi terjadinya perubahan harga lada hitam *spot*. Di sisi lain, harga pasar lada hitam *spot* yang merupakan pasar utama pada perdagangan lada dunia, mampu memengaruhi harga pada pasar lada hitam ekspor Indonesia.

Hubungan antara pasar lada hitam lokal dan *spot* menunjukkan hubungan satu arah. Harga pada pasar lada hitam lokal mampu memengaruhi harga pada pasar lada hitam *spot*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan harga lada hitam lokal di Indonesia akan menjadi acuan dalam penentuan harga lada hitam di pasar *spot* New York. Penawaran lada hitam dari Indonesia yang cukup besar dapat memengaruhi jumlah lada yang diperdagangkan di dunia.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis VECM yang diperoleh, telah terjadi integrasi antara pasar lada hitam lokal, eksportir dan *spot*. Saat terjadi perubahan harga pada satu tingkat pasar dalam pemasaran lada hitam, maka akan terjadi perubahan harga pada tingkat pasar lainnya. Namun demikian, besarnya perubahan harga yang terjadi pada satu tingkat pasar belum dapat memengaruhi harga di tingkat pasar lainnya secara sempurna. Perubahan harga yang terjadi pada

satu pasar belum dapat menyebabkan perubahan harga dengan jumlah yang sama pada pasar lainnya atau dapat dikatakan bahwa perubahan harga yang terjadi belum dapat ditransmisikan dengan sempurna ke pasar lainnya. Adanya transmisi harga yang tidak sempurna antar pasar dapat disebabkan oleh adanya waktu penyesuaian yang diperlukan oleh pasar dalam merespon perubahan harga. Asimetris harga dalam integrasi pasar bisa disebabkan oleh adanya *market power* yang dapat memengaruhi besar kecilnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh agen

ekonomi dalam rantai pemasaran (Yustianingsih, 2012).

Uji Kointegrasi Lada Putih

Berbeda dengan pasar lada hitam, kointegrasi yang terjadi pada pasar lada putih dapat dilihat pada Tabel 5. Harga lada putih lokal memiliki hubungan jangka panjang dengan harga lada putih ekspor dan *spot*. Harga pada pasar lada putih ekspor memengaruhi harga lada putih lokal secara positif. Sedangkan harga lada putih pada pasar *spot* memiliki hubungan yang negatif terhadap harga pada pasar lada lokal.

Tabel 5. Hasil Uji Kointegrasi Pasar Lada Putih

Persamaan Kointegrasi	LPWP(-1)	FOBWP(-1)	SPOTWP(-1)
Kointegrasi 1	1.000	0.910 [4.656]***	-1.772 [-9.109]***

Keterangan: ***signifikan pada taraf nyata 1%

Pada hubungan integrasi jangka pendek di pasar lada putih, diperoleh nilai ECT untuk pasar lada putih spot yang signifikan pada taraf nyata 1% sebesar 0.256. Artinya bahwa terdapat penyesuaian dari persamaan di jangka pendek untuk keseimbangan jangka panjang sebesar 0.256 atau kesalahan dikoreksi sebesar 0.256 per bulan untuk menuju keseimbangan jangka panjang pada harga di pasar lada putih spot. Estimasi VECM untuk melihat integrasi jangka pendek pada pasar lada putih dapat dilihat pada Tabel 6.

Diketahui bahwa pada jangka pendek harga lada putih lokal dipengaruhi secara

negatif oleh harga lada putih lokal pada dua bulan sebelumnya pada taraf nyata 10%, secara positif oleh harga lada putih ekspor pada satu bulan sebelumnya dan harga lada putih *spot* pada satu bulan sebelumnya. Artinya setiap terjadi peningkatan pada harga lada putih lokal pada dua bulan sebelumnya atau peningkatan harga lada putih *spot* pada satu bulan sebelumnya, akan menurunkan harga lada putih lokal pada bulan ini, dan saat terjadi peningkatan harga lada putih ekspor pada satu bulan sebelumnya akan menyebabkan meningkatnya harga lada putih lokal pada bulan ini. Penentuan harga lada

Tabel 6. Hasil Integrasi Jangka Pendek Pasar Lada Putih

Error Correction	LPWP	FOBWP	SPOTWP
ECT1	-0.084 [-1.389]	0.038 [0.674]	0.256 [5.480]***
LPWP(-1)	-0.098 [-1.036]	0.074 [0.849]	0.080 [1.097]
LPWP (-2)	-0.168 [-1.814]*	-0.036 [-0.422]	-0.041 [-0.573]
FOBWP (-1)	0.607 [5.038]***	0.245 [2.206]**	0.287 [3.084]***
FOBWP(-2)	0.092 [0.748]	0.032 [0.288]	-0.074 [-0.780]
SPOTWP(-1)	-0.278 [-2.442]***	-0.232 [-2.213]**	-0.098 [-1.122]
SPOTWP(-2)	-0.089 [-0.960]	0.038 [0.446]	0.133 [1.866]*
C	22.952 [0.894]	40.638 [1.720]	30.519 [1.542]

Keterangan: ***signifikan pada taraf nyata 1%, ** signifikan pada taraf nyata 5%, signifikan pada taraf nyata 10%,

putih lokal mengacu kepada harga lada putih lokal pada dua bulan sebelumnya. Sedangkan ketergantungan pasar lada putih lokal terhadap pasar ekspor menyebabkan perubahan harga yang terjadi pada tingkat eksportir dan *spot* berpengaruh pada harga lada putih pada tingkat lokal.

Sedangkan untuk harga lada putih pada pasar ekspor dipengaruhi secara positif oleh harga lada putih ekspor pada satu bulan sebelumnya dan dipengaruhi secara negatif oleh harga lada putih *spot* pada satu bulan sebelumnya. Dipengaruhinya harga lada putih ekspor oleh harga pada tingkat ekspor dan dunia pada bulan sebelumnya juga ditemukan oleh Djulin

dan Malian (2005). Harga lada putih ekspor pada satu bulan sebelumnya menjadi acuan dalam penentuan harga lada putih bulan ini. Perilaku eksportir Indonesia cenderung dipengaruhi oleh harga pada periode sebelumnya (Jumadi, 1991). Perubahan pada harga lada putih *spot* pada satu bulan sebelumnya memberikan pengaruh negatif terhadap harga lada putih ekspor bulan ini. Sebagian besar lada putih Indonesia diserap oleh pasar dunia yang diwakilkan oleh pasar *spot*. Hal tersebut menjadikan perubahan harga yang terjadi di tingkat eksportir lada putih sangat bergantung kepada tingkat harga yang terjadi di pasar *spot*. Harga lada putih *spot* dipengaruhi secara positif oleh

harga lada putih ekspor pada satu bulan sebelumnya dan harga lada putih *spot* pada dua bulan sebelumnya. Kenaikan harga lada putih ekspor pada satu bulan sebelumnya ataupun harga lada putih *spot* pada dua bulan sebelumnya, dapat berpengaruh pada meningkatnya harga lada putih *spot* pada bulan ini. Informasi tambahan mengenai hubungan yang dimiliki antar pasar dapat diperoleh dengan analisis kausalitas Granger. Hubungan kausalitas pada pasar lada putih dapat dilihat pada Tabel 7.

Melalui uji kausalitas pada taraf nyata 5%, diketahui bahwa pasar lada putih lokal (LPWP) dan *spot* (SPOTWP) saling memengaruhi. Begitu juga antara harga yang terjadi di pasar lada putih ekspor (FOBWP) dan *spot*. Namun antara pasar lada putih lokal dan ekspor, pengaruh yang ada hanya satu arah. Harga lada putih ekspor dapat memengaruhi harga pada pasar lada putih lokal, namun tidak sebaliknya. Besarnya ketergantungan pasar lada putih lokal pada pasar ekspor diduga menjadi faktor berpengaruhnya

Tabel 7. Hubungan Kausalitas Granger Pasar Lada Putih

Null Hipotesis	Obs	F-Statistic	Prob
FOBWP tidak memengaruhi LPWP	238	13.434	3.E-06
LPWP tidak memengaruhi FOBWP		0.197	0.821
SPOTWP tidak memengaruhi LPWP	238	5.316	0.005
LPWP tidak memengaruhi SPOTWP		31.496	8.00E-13
SPOTWP tidak memengaruhi FOBWP	238	4.671	0.010
FOBWP tidak memengaruhi SPOTWP		51.568	3.00E-19

harga pasar lada putih ekspor pada harga lada putih di pasar lokal.

Harga lada putih pasar lokal dipengaruhi oleh harga lada putih *spot* dan begitu juga sebaliknya. Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara eksportir lada putih terbesar dunia, sehingga oleh karenanya penawaran yang diberikan Indonesia memengaruhi jumlah lada putih yang diperdagangkan di dunia. Sebagian besar produksi lada putih Indonesia diekspor ke berbagai negara dan hanya sebagian kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Akibatnya, komoditas lada putih Indonesia sangat bergantung kepada pasar *spot*. Perubahan yang terjadi pada harga *spot* dengan sendirinya dapat memengaruhi harga lada putih pada pasar nasional. Namun hubungan kausalitas antara harga di pasar lada putih lokal dan ekspor ternyata hanya satu arah. Pasar lada putih lokal merupakan pasar acuan dalam penentuan harga di tingkat eksportir, dan tidak untuk sebaliknya.

Harga yang terjadi di pasar lada putih ekspor dan pasar lada putih *spot* memiliki hubungan kausalitas dua arah.

Efek penawaran yang berasal dari pasar lada putih ekspor memiliki kekuatan relatif sama dengan efek permintaan yang berasal dari pasar *spot* sehingga harga yang terbentuk pada kedua pasar saling memengaruhi. Hal tersebut menggambarkan pentingnya peran pasar lada putih ekspor Indonesia dan pasar lada putih *spot* dan begitu juga sebaliknya.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil estimasi VECM yang diperoleh, diketahui bahwa telah terjadi integrasi antara pasar lada putih lokal, pasar lada putih ekspor, dan pasar lada putih *spot* baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Integrasi yang terjadi mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara harga yang terjadi di pasar lada putih lokal, ekspor dan *spot*. Perubahan harga pada satu tingkat pasar dapat memengaruhi harga di tingkat pasar lainnya. Namun perubahan harga yang terjadi pada satu tingkat pasar belum mampu ditransmisikan dengan sempurna kepada tingkat pasar lainnya, mengingat masih diperlukannya waktu penyesuaian pada setiap pasar dalam merespon perubahan harga. Pasar yang belum terintegrasi dengan baik juga dapat mengindikasikan pasar tersebut masih belum efisien. Adanya transmisi harga yang tidak sempurna antar pasar juga bisa saja disebabkan oleh terdapatnya *market power* dalam perdagangan lada putih.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Terjadi integrasi antara pasar lada hitam lokal, eksportir dan *spot*. Namun transmisi harga yang terjadi belum berproses secara sempurna antar pasar. Kesenjangan waktu untuk menyesuaikan perubahan harga yang terjadi oleh setiap pasar masih selalu ada. Integrasi antar pasar lada putih lokal, ekspor dan *spot* juga sudah terjadi, meskipun perubahan harga lada putih yang terjadi pada pasar ekspor dan *spot* belum dapat sepenuhnya disalurkan pada pasar lada putih lokal, mengingat adanya penyesuaian sebagai respon perubahan harga.

Penyaluran informasi harga yang lancar dan dapat diakses oleh setiap pelaku pemasaran lada perlu diupayakan. Dengan informasi perubahan harga yang lancar, pelaku pasar di tingkat lokal akan memiliki posisi tawar yang semakin kuat, sekaligus dapat menghindari praktek yang menyebabkan *market power* dalam pemasaran lada. Pendapatan dan kesejahteraan bagi petani lada dengan sendirinya akan meningkat, dan ini merupakan insentif untuk meningkatkan produksi. Dengan penyaluran informasi harga yang lancar, penyesuaian perubahan harga untuk setiap tingkat pasar juga dapat dipersingkat. Lebih lanjut, integrasi yang terjadi antar pasar akan berlangsung secara lebih baik, dan pasar berjalan dengan lebih efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini, khususnya kepada *International Pepper Community* (IPC) atas bantuannya dalam membantu menyediakan data yang diperlukan dan kepada Kementerian Perdagangan atas bantuannya dalam publikasi artikel. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B.W.P. (2010). *Analisis Integrasi Harga Minyak Bumi, Minyak Kedelai, CPO, Minyak Goreng Domestik, dan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit* Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Asmara, R., R. Ardhiani. (2010). Integrasi pasar dalam sistem pemasaran bawang merah. *AGRISE*. Vol X No. 3, pp: 164-176.
- Asmarantaka, R.W. (2012). *Pemasaran Agribisnis (Agrimarketing)*. Bogor: Departemen Agribisnis-FEM IPB.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2014). *Analisis Harga Lada Hitam/Putih Mei 2014*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Analisis Rumah Tangga Usaha Perkebunan di Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). *Neraca Perkebunan Tri Wulan IV 2013*. Diunduh tanggal 16 Oktober 2014 dari <http://ditjenbun.pertanian.go.id>.
- Djulin, A. & H. Malian. (2005). Struktur dan Integrasi pasar ekspor lada hitam dan lada putih di daerah produksi utama. *Jurnal Sosio-ekonomi Pertanian Soca*, Vol 5(1), pp. 16-20.
- Enders, W. (2004). *Applied Econometric Time Series. Second Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Fitrianti, W. (2009). *Analisis Integrasi Pasar Karet Alam antara Pasar Fisik di Indonesia dengan Pasar Berjangka di Dunia*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Ginting, K. H. (2014). *Analisis Prosisi Lada Putih Indonesia di Pasar Lada Putih Dunia*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Habte, Z. (2014). Market integration for oxen prices using vector error correction model (VECM) in Ethiopia. *International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research*. Vol. 2, pp. 6-9.
- Harriss, B. (1979). There is method in my madness: or is it vice versa?. *Food Research Institut Studies*. Vol 17, pp. 193-208.
- International Pepper Community dan Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2005). *Pepper (Pepper Nigrum L.) Production Guide for Asia and The Pacific*. International Pepper Community: Jakarta.
- International Pepper Community. (2014). *Pepper Statistical Yearbook 2013*. Jakarta: International Pepper Community.
- Jumadi. (1991). *Analisis Perdagangan Lada Hitam Indonesia di Pasar Internasional*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kementerian Pertanian RI. (2014). Ekspor lada Indonesia. Diunduh tanggal 22 September 2014 dari <http://aplikasi.pertanian.go.id/>.
- McNew, K. (1996). Spatial market integration: Defenition, theory, and

- evidence. *Agricultural and Resource Economics Review*. Vol 25, pp. 1-11.
- Muzendi, A.S. (2014). *Integrasi Pasar dan Dampak Kebijakan Non Tarif terhadap Permintaan Ekspor dan Daya Saing Kopi Indonesia di Pasar Internasional*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Nurhidayati, I. (2015). *Analisis Integrasi Pasar Karet Alam Antara Produsen Utama dengan Pasar Berjangka Singapura dan Jepang*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rachman, A. (2011). *Integrasi dan Transmisi Harga pada Pasar CPO dan Minyak Goreng Sawit di Indonesia*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Ravallion, M. (1986). Testing market integration. *American Journal of Agricultural Economics*. Vol. 68 no.(1), pp. 102-109.
- Srofenyoh, F. (2015). Maize market integration: a case study of Maize Marketing in Ghana. *International Journal of Technology and Management Research*. Vol 4(2015), pp. 1-11.
- Suwarto. (2013). *Budidaya Monokultur, polikultur, dan di pot; Lada*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Tomek, W. & K.L. Robinson. (1990). *Agricultural Product Prices*. Third Edition. London: Cornell University Press.
- United Nations Commodity Trade. Ekspor-Impor Lada. Diunduh tanggal 25 September 2014 pada <http://comtrade.un.org/data>.
- Yustianingsih, F. (2012). *Analisa Integrasi Pasar dan Transmisi Harga Beras-Petani-Konsumen di Indonesia*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Zainuddin, A. (2015). *Integrasi Pasar dan Respon Penawaran Daging Sapi di Indonesia*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

POSISI DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA JASA PERGUDANGAN DI INDONESIA

Positions and Enabling Factors of Warehouse Services Performance in Indonesia

Bagus Wicaksana

Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan,
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, 10110, Indonesia.
e-mail: bagus.wicaksana@kemendag.go.id

Naskah diterima: 23/05/2016 Naskah direvisi: 12/07/2016 Disetujui diterbitkan: 20/09/2016

Abstrak

Jasa pergudangan merupakan sektor usaha yang diperlukan untuk merespon perubahan tren logistik, potensi pertumbuhan perdagangan, serta tuntutan efisiensi dalam menghadapi liberalisasi sektor jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja jasa pergudangan sehingga kebijakan yang efektif dapat dirumuskan, mengingat jasa pergudangan bersifat lintas sektoral. Untuk mengetahui posisi jasa pergudangan, digunakan analisis SWOT, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja jasa pergudangan digunakan *Structural Equation Modeling (SEM)*. Berdasarkan analisis SWOT, ekspansi jasa pergudangan Indonesia melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi, dan klasterisasi daerah pergudangan perlu dilakukan, sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hasil analisis SEM dengan *Partial Least Square (PLS)* menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan dan upah merupakan faktor yang paling signifikan dalam mendukung ekspansi jasa pergudangan. Untuk itu, kebijakan yang dapat menimbulkan pajak ganda, misalnya pembebanan pajak penghasilan pada setiap proses logistik untuk satu produk, harus dihindari. Penetapan upah minimum regional tidak perlu dinaikkan karena dapat menghambat ekspansi usaha.

Kata Kunci: Jasa Pergudangan, Logistik, SWOT, SEM dengan PLS

Abstract

Warehouse service is a business sector which plays a significant role in addressing some changes in logistic trend, potentials of trade growth, and the needs of efficiency as a result of services trade liberalization. This study aims at finding out positions and enabling factors which affect warehouse services performance. These are needed to formulate an effective policy since warehouse services operation is inter-sectoral. SWOT analysis is used to analyse the positions of warehouse services, and Structural Equation Modeling (SEM) is used to identify enabling factors of warehouse services. SWOT analysis shows that warehouse services in Indonesia needs to be expanded by human resource development, technology, and warehousing cluster policy in order to grab maximum opportunities. The results of Structural Equation Modeling with Partial Least Square shows that tax policy variable and regional wage appears to be the most significant variable that supports expansion of warehouse services. Therefore, any policies that potentially cause double taxation, such as the imposition of income tax of one product in every logistic process must be eliminated. Besides, regional minimum wage should not be increased as it would hamper the business expansion.

Key Word: Warehouse Services, Logistic, SWOT, SEM with PLS

JEL Classification: D23, D40, O25

PENDAHULUAN

Dalam mendukung pertumbuhan logistik di Indonesia, diperlukan investasi pergudangan di beberapa wilayah simpul logistik seperti Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2011). Khusus untuk pergudangan, studi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut menjelaskan bahwa Aceh setidaknya memerlukan tambahan investasi fisik pergudangan hingga 5 (lima) unit, Jawa Barat sebanyak 75 unit, Kalimantan Selatan sekitar 20 unit, dan Sulawesi Utara sebanyak 5 (lima) unit. Sementara pada tahun 2015, kebutuhan pergudangan secara rata-rata juga naik mengingat kawasan pergudangan seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur melakukan perluasan areal pergudangan baru seluas rata-rata 30% (Properti, 2015) Diberlakukannya MEA pada awal tahun 2016 mendorong produsen atau perusahaan manufaktur melakukan *outsourcing* aktivitas pergudangannya (Jakarta Post, 2015). Secara rata-rata, kebutuhan *outsourced* rantai pasok, pergudangan, dan distribusi diperkirakan akan terus naik hingga 14,7% per tahun sampai dengan tahun 2019 (Jakarta Globe, 2015).

Jasa pergudangan memiliki peran yang strategis dalam mendukung efisiensi logistik nasional (Baijal, 2014), kelancaran distribusi pasokan (*supply*) (Addy-Tayie, 2012), peramalan

kebutuhan dan permintaan (Kot; Grondys, & Spoza, 2011), dan dalam meningkatkan daya saing sektor logistik nasional (Center of Logistics and Supply Chain Studies, 2013 dan BKPM, 2011). Lebih jauh, Rubie (Logistics Insight Asia, 2015) menjelaskan bahwa peran jasa pergudangan menjadi strategis pada pasar yang tidak terkonsentrasi dan lokasi produsen yang tersebar. Dengan demikian, perusahaan yang menggunakan jasa pergudangan dapat lebih fokus kepada kegiatan produksinya.

Berkembangnya permintaan jasa pergudangan juga merupakan tren di negara seperti India, dimana sekitar 52% aktivitas logistik yang meliputi transportasi, persediaan (*inventory*), dan pergudangan dilimpahkan kepada jasa logistik (Project Monitor, 2013 dan Baijal, 2014). Pada kasus Indonesia, kebutuhan atas jasa pergudangan mulai dipertimbangkan seiring dengan tumbuhnya permintaan gudang yang modern, tuntutan konsumen atas pengiriman barang yang cepat, akurat, dan aman, serta tren perusahaan yang melakukan *outsourcing* aktivitas pergudangan karena pertimbangan biaya (Jakarta Post, 2015).

Gambaran di atas pada satu sisi menunjukkan potensi bagi penyedia jasa pergudangan untuk terus tumbuh memenuhi permintaan. Pada sisi lain, beberapa hal seperti masih tingginya biaya pergudangan di Indonesia, yakni

sekitar 9,47% dari Produk Domestik Bruto (Center of Logistics and Supply Chain Studies, 2013), perlu menjadi perhatian. Sebagai perbandingan, biaya pergudangan di beberapa negara lain relatif lebih kecil seperti Thailand sebesar 7,6% (Xianghui, 2012), Brazil sekitar 4,1% (Filipe, 2012), Tiongkok 6,3%, India 3,8%, dan Amerika Serikat sebesar 2,8% (Baijal, 2014). Selain itu, tantangan subsektor pergudangan di Indonesia semakin besar, selain oleh karena diberlakukannya MEA, juga beberapa kerjasama perdagangan internasional sudah menunjukkan inisiatif dalam mencapai liberalisasi sektor jasa¹. Oleh karena itu, perangkat kebijakan yang dapat mendukung perdagangan seperti jasa pergudangan semakin diperlukan². Terkait dengan jasa pergudangan, mengacu studi Puspitasari, *et al.* (2012), tentang konsep pengembangan sektor potensial, berbagai permasalahan seperti identifikasi industri dan memetakan posisi industri berdasarkan kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman faktor eksternal, serta informasi tentang faktor yang menentukan kinerja industri, menjadi hal yang penting dan bersifat strategis.

Identifikasi dan pemetaan industri jasa pergudangan dengan demikian diperlukan untuk melihat secara spesifik mengenai aktivitas bisnis serta aspek yang membentuk kekuatan-kelemahan serta peluang-ancaman.

Setelah mengetahui posisi jasa pergudangan, maka perlu diketahui pula informasi mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh pada kinerja jasa pergudangan. Identifikasi aktivitas, posisi, dan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja jasa pergudangan merupakan informasi penting sebagai landasan untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam pengembangan jasa pergudangan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan adalah karena jasa pergudangan merupakan suatu entitas bisnis dengan aktivitas yang beragam dan yang menjangkau sektor hulu hingga hilir (Nath & Gandhi, 2011). Strategi dan kebijakan yang diambil hendaknya bersifat menyeluruh (Baijal, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk (a) menganalisis posisi jasa pergudangan di Indonesia; (b) menganalisis faktor-faktor penentu kinerja jasa pergudangan di Indonesia; dan (c) merumuskan kebijakan pengembangan jasa pergudangan di Indonesia. Hasilnya disajikan dalam struktur penulisan sebagai berikut. Pada bagian Metode Penelitian, dijelaskan pendekatan analisis SWOT, yakni pendekatan untuk menjelaskan posisi kuadran jasa pergudangan, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang konsep kinerja dan daya saing untuk mengetahui faktor

¹ ASEAN Sectoral Integration Protocol For The Logistics Services Sector pada tanggal 24 Agustus 2007 di Makati, Filipina yang terdaftar dalam CPC 742 yaitu Klasifikasi Produk Central Internasional untuk Jasa Penyimpanan, Pergudangan, Pengepakan, Kargo, Kurir, dan Jasa Pengiriman Barang

² Sektor Jasa Industri Dipetakan diunduh dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6717/Sektor-Jasa-Industri-Dipetakan>

penentu kinerja dengan pendekatan *Structure Equation Modeling* dengan *Partial Least Square* (SEM-PLS). Pada bagian Hasil dan Pembahasan, model hubungan faktor penentu kinerja dan kinerja jasa pergudangan dijelaskan secara kuantitatif dan kualitatif. Pada bagian akhir, dijelaskan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan.

METODE

Mengacu kepada konsep pengembangan sektor potensial Puspita *et al* (2012), identifikasi, pemetaan posisi, dan penentuan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja jasa pergudangan diperlukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan jasa pergudangan. Dalam hal ini, kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal industri, sedangkan peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal dapat ditentukan melalui penilaian responden ahli (*expert judgement*). Sementara faktor penentu kinerja jasa pergudangan merupakan faktor yang memiliki hubungan kausalitas dengan peningkatan daya saing.

Nath & Gandhi (2011) dan Baijal (2014) menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator kinerja pergudangan, yaitu biaya, sistem, dan utilisasi ruang. Sementara dalam mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kinerja, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) baik dari segi pendidikan maupun pengalaman, infrastruktur

perusahaan baik *hard* seperti peralatan atau *soft* seperti penelitian, dan sistem informasi dianggap sebagai variabel yang cukup penting (Faber, de Koster, & Smidts, 2013). Optimalisasi aktivitas pergudangan juga ditentukan oleh modernisasi sistem melalui teknologi informasi, inovasi, serta penelitian dan pengembangan (Goskoy, Vayvay, & Ergeneli, 2013; Mahajan, Singh, & Singh, 2013; dan Sankar, Kannan, & Muthukumaravel, 2014). Selain itu, faktor kepuasan pelanggan, kemampuan dalam memprediksi permintaan, keberadaan industri hulu dan hilir, dukungan aktivitas logistik lainnya, strategi klasterisasi, hingga dukungan kebijakan perlu menjadi pertimbangan dalam menunjang fungsi pergudangan dalam mendukung rantai pasok (Kot *et al*, 2011; Boja, 2011; Baijal, 2014; dan Coyle, Joseph, & Edward, 2003).

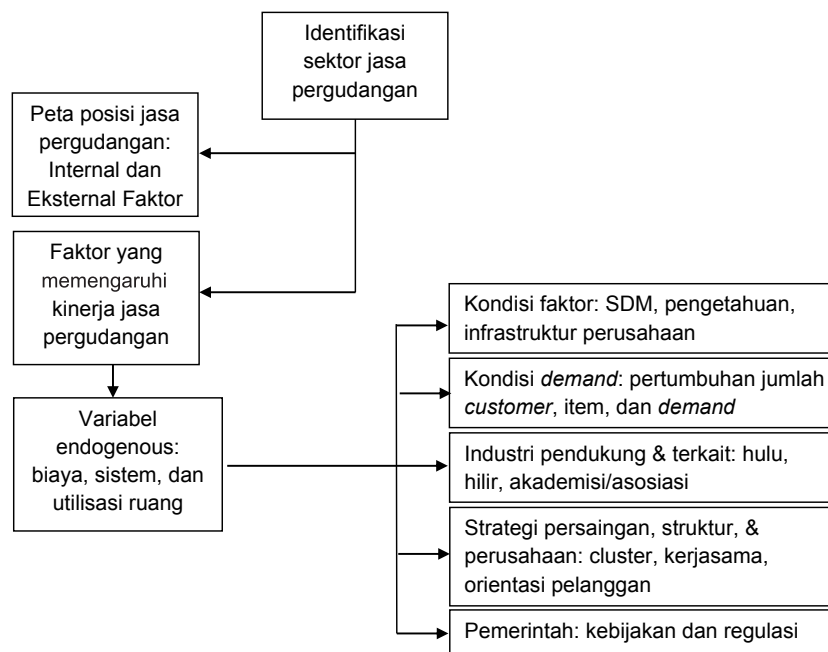
Untuk kasus Indonesia, biaya masih menjadi prioritas dalam mengukur kinerja jasa pergudangan, disamping penggunaan teknologi tepat guna, penerapan *warehouse management*, hingga pemenuhan standard gudang. Faktor-faktor seperti potensi SDM, infrastruktur yang menunjang, kepuasan pelanggan, meningkatnya permintaan, serta keberadaan industri hulu-hilir sebagai penunjang bisnis jasa pergudangan bisa berpengaruh positif terhadap kinerja jasa pergudangan di Indonesia.

Variabel tersebut kemudian dikembangkan dan disederhanakan ke dalam konsep Porter's Diamond. dengan faktor kualifikasi sumberdaya manusia (SDM), sumber pengetahuan, dan infrastruktur perusahaan sebagai kondisi faktor; pertumbuhan jumlah pelanggan sebagai kondisi permintaan; potensi industri hulu, hilir, serta dukungan asosiasi/akademisi sebagai industri pendukung dan industri terkait; strategi untuk berada di *cluster*, kerjasama dengan mitra logistik, dan orientasi pelanggan sebagai strategi persaingan, struktur, dan perusahaan (Porter, 1990). Saptana (2010) menjelaskan bahwa Porter's diamond dimodifikasi dari contoh Korea dengan membagi sumber keunggulan menjadi dua kategori yaitu faktor fisik dan faktor manusia. Jika diperinci, maka faktor penentu daya saing faktor fisik adalah sumber daya alam, lingkungan bisnis, industri pendukung, dan kondisi permintaan, sedangkan untuk faktor manusia adalah pekerja, politisi, birokrasi, pengusaha, dan profesional dan perekayasa teknologi. Disamping empat determinan tersebut, dua faktor lain, meski bukan pembentuk diamond, juga berpengaruh terhadap daya saing negara, yaitu *chance* dan pemerintah melalui produk kebijakan (Porter, 1998; Bakan & Dogan, 2012).

Dalam penelitian ini, konsep Porter's Diamond yang pada umumnya menerangkan daya saing suatu sektor masih relevan dan dapat digunakan

untuk menerangkan kinerja mengingat konsep daya saing tidak dapat dipisahkan dari perbaikan kinerja itu sendiri. Beberapa studi yang menekankan keterkaitan konsep daya saing dengan kinerja diantaranya adalah Serhat & Harun (2011) yang menjelaskan perbaikan kinerja logistik di dalam negeri terhadap peningkatan daya saing global, dan Yoyo et al. (2014) yang mengembangkan model daya saing berasal dari kinerja (*performance*) industri kelapa sawit berdasarkan teori Industrial Organization (IO). Selain itu, Porter's Diamond juga umum digunakan dalam analisis strategi pengembangan, seperti studi yang dilakukan oleh Maryandani (2013) yang menganalisis situasi, kondisi, dan pengaruhnya terhadap perkembangan industri gula di Indonesia, Puspitasari *et. al* (2012) dalam penelitian pengembangan bisnis tanaman enceng gondok, dan Tumengkol, Palar, dan Rutinsulu (2015) untuk mengetahui faktor kinerja industri perikanan di Kota Bitung. Gambar 1 berikut adalah menjelaskan kerangka berpikir penelitian ini.

Dalam menjawab tujuan pertama tentang posisi jasa pergudangan di Indonesia, maka digunakan analisis kualitatif dengan SWOT (Pearce & Robinson, 1997) agar diketahui peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha jasa pergudangan dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

1) Melakukan perhitungan skor dan bobot poin faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot pada setiap faktor S-W-O-T yang terdiri dari Faktor Internal (IFAS), yaitu infrastruktur perusahaan (seperti ketersediaan lahan, sistem, dan alat pendukung), strategi untuk berada di kawasan khusus (*cluster*) untuk efisiensi distribusi, strategi promosi kepada industri tentang pentingnya jasa perdagangan, kemitraan dengan lembaga pendidikan dan logistik, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan standard terkait SHE (Safety, Health, Environment) sesuai SNI dan Faktor Eksternal (EFAS) yaitu tingkat permintaan jasa perdagangan, potensi peningkatan volume distribusi komoditas akibat MEA 2015 dan *e-commerce*,

kondisi geografis dan demografis, ketersediaan SDM yang *trained* dan *skilled* dari negara ASEAN (MEA 2015) atau negara asing lainnya, kondisi investasi asing dalam industri jasa perdagangan, tingkat relokasi *supplier* ke luar Indonesia, dan regulasi dalam kerangka otonomi daerah.

- 2) Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W dan faktor O dengan T yang telah diidentifikasi pada butir (1).
- 3) Menentukan posisi jasa perdagangan yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT yang diperoleh dari butir (2)

Sedangkan untuk menjawab tujuan kedua tentang faktor-faktor penentu kinerja jasa perdagangan di Indonesia, digunakan uji Model Persamaan

Struktural (*Structural Equation Modelling-SEM*) berbasis varians dengan Partial Least Square (PLS), yakni model persamaan struktural yang berdaya karena tidak didasarkan pada banyak asumsi seperti normalitas data, ukuran sampel, dan skala pengukuran (Monecke & Leisch, 2012). PLS dapat memberikan hasil optimal meski dengan jumlah sampel kecil (Chin, 1995 dan Gefen, Straub, & Marie-Claudia, 2000). Disamping itu, PLS juga memiliki kelebihan dalam mengestimasi hubungan antar variabel untuk seluruh skala pengukuran variabel; nominal, ordinal, maupun interval. PLS juga bisa digunakan untuk menganalisis model persamaan struktural dengan indikator reflektif, formatif, maupun keduanya (Henseler, Ringle, & Sinkovicks, 2009).

Analisis data dan pemodelan persamaan struktural dengan menggunakan PLS dilakukan dengan prosedur berikut (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011):

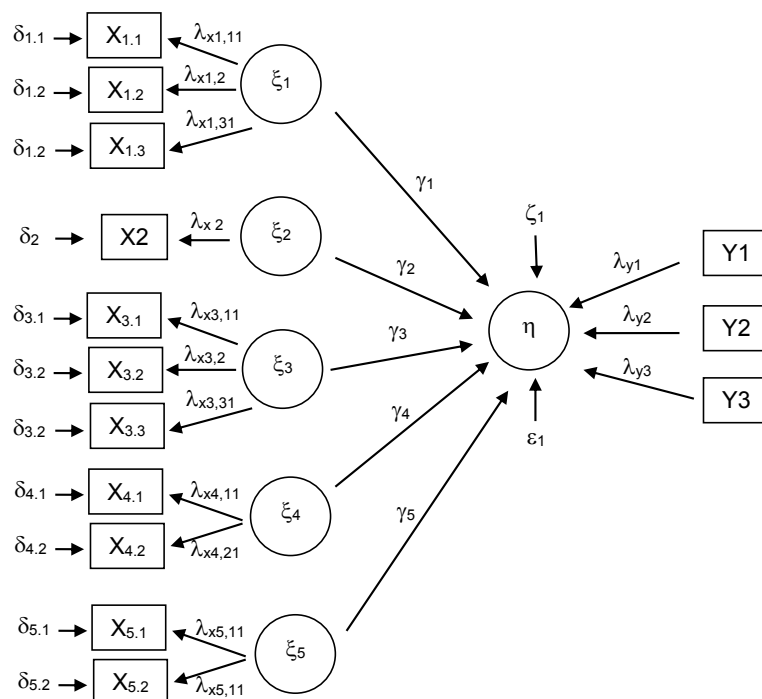
- a. Merancang model struktural (*inner model*) yang menggambarkan hubungan antar variabel laten yaitu variabel independen yang terdiri dari kondisi faktor, kondisi permintaan; industri pendukung dan industri terkait, strategi persaingan, struktur, dan perusahaan, dan pemerintah (kebijakan) dengan variabel dependen yang merupakan kinerja jasa pergudangan yang

didasarkan pada *substantive theory* dan diterjemahkan dalam kerangka berpikir atau hipotesis penelitian.

- b. Merancang model pengukuran (*outer model*) yang mendefinisikan hubungan setiap blok indikator dengan variabel latennya seperti kondisi faktor yang diindikasikan dengan SDM, pengetahuan, dan infrastruktur perusahaan dan lain sebagainya.
- c. Konstruksi diagram jalur yang menggambarkan hubungan antar variabel dan dimensi pembentuk variabel dalam model persamaan struktural dengan PLS yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk menjawab tujuan pertama dari penelitian, dilakukan secara bertahap, yaitu *expert judgement* dalam mengidentifikasi dan menentukan kelompok jasa pergudangan secara deskriptif dan kemudian dilakukan pembobotan untuk menentukan posisi kuadran jasa pergudangan dengan analisis SWOT berdasarkan jawaban pada kuesioner. Untuk tujuan kedua dari penelitian, dilakukan pengolahan SEM dengan PLS dengan aplikasi SmartPLS untuk setiap variabel.

Penelitian ini menggunakan data primeryang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 75 responden secara *purposive* di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.



Gambar 2. Konstruksi Structure Equation Modeling (SEM)

Notasi-notasi dalam diagram jalur tersebut adalah:

- ξ_1 : Variabel laten eksogen kondisi faktor
- ξ_2 : Variabel laten eksogen kondisi permintaan (*demand*)
- ξ_3 : Variabel laten eksogen industri pendukung dan terkait
- ξ_4 : Variabel laten eksogen strategi perusahaan, struktur, dan persaingan
- ξ_5 : Variabel laten eksogen pemerintah
- $X_{1,1}$ s.d. $X_{1,3}$: Manifest variabel laten eksogen kondisi faktor: Kualifikasi SDM, *Knowledge Resource*, Infrastruktur
- X_2 : Manifest variabel laten eksogen kondisi permintaan (*demand*)
- $X_{3,1}$ s.d. $X_{3,3}$: Manifest variabel eksogen industri pendukung dan terkait: Keberadaan Industri Hulu, Keberadaan Industri Hilir, Keberadaan Lembaga Riset
- $X_{4,1}$ s.d. $X_{4,2}$: Manifest variabel eksogen strategi perusahaan, struktur, dan persaingan.

- $X_{5,1}$ s.d. $X_{5,2}$: Manifest variabel eksogen pemerintah (kebijakan/regulasi terkait)
- $\lambda_{X_{1,1}}$ s.d. $\lambda_{X_{1,3}}$: *Loading factors* variabel eksogen kondisi faktor
- λ_{X_2} : *Loading factors* variabel eksogen kondisi faktor kondisi permintaan
- $\lambda_{X_{3,1}}$ s.d. $\lambda_{X_{3,3}}$: *Loading factors* variabel eksogen industri pendukung dan terkait
- $\lambda_{X_{4,1}}$ s.d. $\lambda_{X_{4,2}}$: *Loading factors* variabel eksogen strategi perusahaan, struktur, dan persaingan
- $\lambda_{X_{5,1}}$ s.d. $\lambda_{X_{5,2}}$: *Loading factors* variabel eksogen pemerintah
- $\delta_{1,1}$ s.d. $\delta_{1,3}$: Error variabel manifest untuk variabel laten eksogen kondisi faktor
- δ_2 : Error variabel manifest untuk variabel laten eksogen kondisi permintaan
- $\delta_{3,1}$ s.d. $\delta_{3,3}$: Error variabel manifest untuk variabel laten eksogen industri pendukung dan terkait

- $\delta_{4.1}$ s.d $\delta_{4.2}$: Error variabel manifest untuk variabel laten eksogen strategi perusahaan, struktur, dan persaingan
- $\delta_{5.1}$ s.d $\delta_{5.2}$: Error variabel manifest untuk variabel laten eksogen pemerintah
- η : Variabel laten endogen kinerja jasa pergudangan
- Y_1 s.d Y_3 : Manifest variabel laten endogen kinerja jasa pergudangan: biaya, sistem, dan utilisasi ruang
- λ_{y1} s.d λ_{y3} : Loading factors variabel endogen kinerja jasa pergudangan
- ε_1 : Error variabel manifest untuk variabel laten endogen kinerja jasa pergudangan
- λ_1 s.d. λ_5 : koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen
- ζ_1 : Error model persamaan struktural

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Bisnis Jasa Pergudangan

Identifikasi subsektor jasa pergudangan dilakukan melalui telaah literatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009, diskusi terbatas dengan ahli (*expert*) yang terdiri dari pelaku usaha logistik dan pergudangan, akademisi, dan asosiasi. Adapun gambaran bisnis jasa pergudangan secara sederhana diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tipe dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari hasil tabel 1, penyedia jasa pergudangan tipe 2 dan tipe 3 merupakan lingkup penelitian yang

Tabel 1. Gambaran Bisnis Jasa Pergudangan

Tipe	Deskripsi	Contoh
Tipe 1: yang mengelola aset pergudangan dengan menyewakan kepada pihak lain	PT X sebagai penyedia jasa pergudangan memiliki aset pergudangan dengan luasan tertentu dan disewakan kepada PT Y dan Z. Indikator kerja pada jasa pergudangan tipe 1 antara lain harga sewa dan jumlah unit tersewa	Pergudangan Bumi Benowo di Jawa Timur
Tipe 2: Perusahaan yang mengelola aset pergudangan dan inventory pihak lain	PT X sebagai penyedia jasa pergudangan melakukan pengelolaan inventory PT A, PT B, dan PT C di dalam gudang PT X sendiri atau menyewa gudang dari PT Z. Dalam hal ini, umumnya penyedia jasa pergudangan fokus pada biaya, utilisasi ruang, dan lalu lintas barang (<i>throughput</i>).	Bhanda Ghara Rekso (PT BGR), Kamadaja, Dunia Express yang berlokasi di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur.
Tipe 3: Perusahaan yang mengelola <i>inventory</i> pihak lain di gudang milik pihak tersebut.	PT X sebagai penyedia jasa pergudangan mengelola inventory PT Z di gudang PT Z. Merupakan pengembangan produk jasa dari Jasa Pergudangan Tipe 2 sehingga umumnya penyedia jasa pergudangan fokus pada biaya, utilisasi ruang, dan lalu lintas barang (<i>throughput</i>).	PT Agility di Jakarta.

Sumber: Telaah literatur KBLI (2009) dan diskusi terbatas (primer).

akan dianalisis lebih lanjut. Hal ini dikarenakan pertimbangan indikator kinerja jasa pergudangan yang fokus pada biaya, utilisasi ruang, dan lalu lintas barang yang mendekati indikator kinerja jasa pergudangan dalam oleh Nath, R. & D. S. Gandhi (2011) yang digunakan sebagai referensi.

Aktivitas dan Posisi Jasa Pergudangan

Seperti yang disajikan dalam Tabel 1, perusahaan jasa pergudangan adalah penyedia jasa pergudangan yang melakukan pengelolaan barang atau persediaan (*inventory*) pihak lain. Dalam hal ini, penyedia jasa pergudangan bertindak atas nama pemilik barang untuk mengelola persediaannya dengan kualifikasi tertentu berdasarkan *service level agreement* (SLA) yang disepakati antara penyedia jasa dan pemilik barang. Secara umum, tanggung jawab penyedia jasa pergudangan meliputi penerimaan (*receiving*) yang merupakan rangkaian proses yang terdiri dari bongkar muat barang yang diterima dari transportasi (*trucking*), identifikasi, pendaftaran sebelum dilakukan pemindahan barang ke dalam area penyimpanan.

Selanjutnya, barang disimpan (*storage*) dalam rak/palet sesuai dengan karakteristiknya dan umumnya sudah dikemas ulang dengan kemasan tertentu untuk memudahkan proses pengambilan. Hal ini merupakan salah satu penciptaan nilai tambah yang

diberikan, selain beberapa contoh seperti penyortiran (*sorting*), pelabelan (*labeling*), pencantuman harga (*price tagging*), dan perakitan (*assembling*). Dalam mengelola *inventory* pemilik barang, penyedia jasa pergudangan juga melakukan *replenishment* yaitu proses pengelolaan stok dengan memindahkan barang dari gudang penyimpanan ke gudang penyimpanan yang sudah disesuaikan untuk pengambilan (*pick storage*). Hal ini dilakukan hanya jika tingkat persediaan di *pick storage* sudah di bawah batas yang ditentukan.

Kegiatan akhir terdiri dari proses pengepakan barang untuk kemudian dipersiapkan dalam pengapalan (*shipping*). Pengapalan juga identik dengan proses pemindahan barang dari penyimpanan ke angkutan. Untuk produk yang bersifat *fast-moving*, gudang dapat menjadi penghubung antara penerimaan (*receiving*) dengan titik pengapalan, umumnya bagi barang yang tidak perlu penyimpanan terlalu lama. Proses ini disebut *cross-dock*.

Dalam melakukan analisa SWOT, jawaban responden pada kuesioner dikelompokkan menjadi Faktor Internal (IFAS) yang terdiri dari Kekuatan (*strenght*) dan Kelemahan (*weakness*) dan Faktor Eksternal (EFAS) yang terdiri dari Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threat*). Kemudian, ditentukan bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap IFAS dan EFAS. Nilai total bobot untuk IFAS dan EFAS

masing-masing sebesar 1 (satu). Semakin besar bobot suatu atribut pada IFAS dan EFAS, secara relatif semakin penting atribut tersebut dibandingkan dengan atribut lain dalam hal perannya sebagai penentu keberhasilan industri jasa pergudangan.

Pengelompokkan IFAS-EFAS dan penentuan bobot menggunakan *expert judgment* yang terdiri dari akademisi dan pelaku usaha, sementara untuk nilai skor diperoleh dari rata-rata penilaian responden terhadap suatu atribut. Hasil perkalian bobot dan nilai skor menghasilkan nilai total yang digunakan untuk menentukan selisih total *strength* dan *weakness* sebagai IFAS serta *opportunity* dan *threat* sebagai EFAS yang kemudian dikombinasikan untuk menentukan posisi kuadran.

Berdasarkan analisis SWOT, faktor-faktor kekuatan adalah infrastruktur perusahaan (seperti ketersediaan lahan, sistem, dan alat pendukung); strategi untuk berada di kawasan khusus (*cluster*) untuk efisiensi distribusi; dan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara faktor-faktor yang merupakan kelemahan adalah kemitraan dengan lembaga pendidikan dan logistik; strategi promosi kepada industri tentang pentingnya jasa pergudangan; dan penerapan standard terkait SHE (Safety, Health, Environment) sesuai SNI.

Sementara faktor-faktor yang merupakan peluang adalah tingkat permintaan jasa pergudangan; potensi

peningkatan volume distribusi komoditas akibat MEA 2015; kondisi geografis dan demografis; dan kondisi investasi asing (langsung atau melalui kemitraan) dalam industri jasa pergudangan. Sedangkan faktor-faktor yang merupakan ancaman adalah ketersediaan SDM yang *trained* dan *skilled* dari negara ASEAN (MEA 2015) atau negara asing lainnya; tingkat relokasi *supplier* ke luar Indonesia; dan regulasi dalam kerangka otonomi daerah.

Hasil perhitungan skor, bobot, dan nilai total untuk masing-masing faktor ditunjukkan pada Tabel 2, dengan total nilai kekuatan sebesar 1,59 dan total nilai kelemahan sebesar 0,63. Dari ke dua nilai tersebut diperoleh selisih tersebut sebesar 0,96. Sementara total nilai peluang dan total nilai ancaman masing-masing sebesar 1,66 dan 0,63, sehingga selisih kedua nilai tersebut sebesar 1,03.

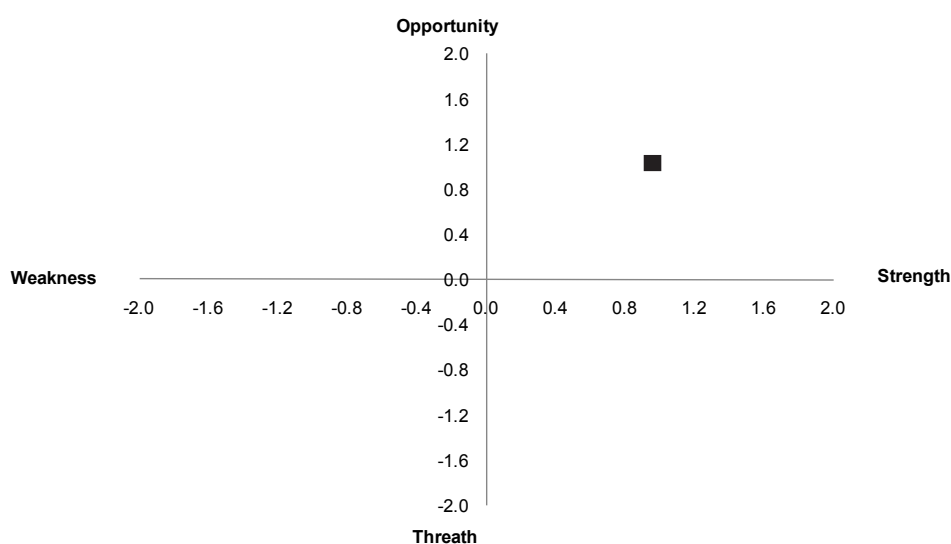
Berdasarkan hasil perhitungan selisih nilai kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman di atas, dapat dipetakan posisi industri jasa pergudangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

Secara umum, responden industri jasa pergudangan berorientasi pada kekuatan yang dimiliki, yaitu infrastruktur perusahaan seperti adanya lahan untuk pengembangan pergudangan, sistem yang menunjang *warehouse management*, ketersediaan alat pendukung aktivitas pergudangan seperti forklift misalnya. Selain itu,

Tabel 2. Perhitungan Skor dan Bobot Jasa Pergudangan

No.	Strength	Skor (a)	Bobot (b)	Total (c=a x b)
1	Infrastruktur perusahaan (seperti ketersediaan lahan, sistem, dan alat pendukung)	3.7	0.17	0.64
2	Strategi untuk berada di kawasan khusus (<i>cluster</i>) untuk efisiensi distribusi	3.3	0.17	0.56
3	Kepatuhan terhadap regulasi	2.6	0.15	0.40
Total Strength			0.49	1.59
No.	Weakness	Skor (d)	Bobot (e)	Total (f=d x e)
1	Kemitraan dengan lembaga pendidikan dan logistik	1.1	0.16	0.17
2	Strategi promosi kepada industri tentang pentingnya jasa pergudangan	1.8	0.16	0.30
3	Penerapan standard terkait SHE (Safety, Health, Environment) sesuai SNI	0.9	0.18	0.16
Total Weakness			0.51	0.63
Selisih Strength - Weakness =		1,59 - 0,63 = 0.96		
No.	Opportunity	Skor	Bobot	Total
1	Tingkat permintaan jasa pergudangan	3.2	0.14	0.46
2	Potensi peningkatan volume distribusi komoditas akibat MEA 2015	3.5	0.14	0.48
3	Kondisi geografis dan demografis	2.8	0.13	0.36
4	Kondisi Investasi asing (langsung atau melalui kemitraan) dalam industri jasa pergudangan	3.0	0.12	0.36
Total Opportunity			0.53	1.66
No.		Skor	Bobot	Total
1	Ketersediaan SDM asing yang <i>trained</i> dan <i>skilled</i>	1.5	0.12	0.18
2	Ketersediaan SDM yang <i>trained</i> dan <i>skilled</i> dari negara ASEAN (MEA 2015)	1.8	0.12	0.22
3	Tingkat relokasi <i>supplier</i> ke luar Indonesia	1.0	0.12	0.12
4	Regulasi dalam kerangka otonomi daerah	1.0	0.11	0.11
Total Treath			0.47	0.63
Selisih Opportunity - Treath =		1,66 - 0,63 = 1.03		

Sumber: Data Primer, (diolah)



Gambar 3. Kuadran Posisi Industri Jasa Pergudangan

sebagian besar responden berada dalam kawasan khusus (*cluster*), kawasan yang mendukung efisiensi distribusi yang dianggap sebagai suatu strategi dalam menciptakan kekuatan. Faktor internal lainnya seperti kepatuhan responden terhadap regulasi juga menjadi salah satu pendukung dalam menciptakan kekuatan. Beberapa regulasi diantaranya seperti kebijakan upah dan perpajakan merupakan regulasi yang dianggap oleh responden cukup baik dan dapat diterapkan. Jika dilihat dari bobot, maka atribut seperti baiknya infrastruktur perusahaan seperti ketersediaan lahan, sistem, dan alat pendukung dan strategi untuk berada di kawasan khusus (*cluster*) untuk efisiensi distribusi merupakan faktor kekuatan yang dipersepsikan paling penting dalam mendorong pengembangan jasa pergudangan.

Sementara faktor peluang meliputi tingkat permintaan jasa pergudangan baik dalam jumlah item maupun pelanggan, potensi peningkatan volume perdagangan komoditas akibat MEA 2015, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan struktur demografi penduduk yang didominasi usia muda, serta investasi asing terkait jasa pergudangan. Jika dilihat dari bobot, maka faktor seperti tingkat permintaan jasa pergudangan dan potensi peningkatan volume distribusi komoditas akibat MEA 2015 merupakan peluang yang dipersepsikan relatif lebih penting

dalam mendukung pengembangan industri jasa pergudangan. Dengan demikian, hasil pemetaan menunjukkan bahwa industri jasa pergudangan berada pada Kuadran I yang berarti *strength-and-opportunity dominant*. Secara umum, kondisi saat ini relatif sudah *on-track* bagi sektor jasa pergudangan. Walaupun demikian, faktor kelemahan seperti masih rendahnya kemitraan dengan lembaga pendidikan perlu menjadi perhatian mengingat bahwa keberadaan tenaga asing dengan keterampilan yang relatif lebih baik dipersepsikan sebagai ancaman.

Faktor Penentu Kinerja Jasa Pergudangan

Setelah melakukan analisis SWOT untuk mengetahui posisi jasa pergudangan, maka selanjutnya adalah menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja jasa pergudangan. Seperti yang telah disebutkan, analisis yang digunakan untuk melihat secara detail faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja jasa pergudangan adalah *Structure Equation Modeling* (SEM) dengan *Partial Least Square* (PLS). Dengan menggunakan variabel yang dikembangkan berdasarkan literatur dan *expert judgement*, maka hasil analisis dapat dijelaskan sebagai berikut.

Namun sebelum itu, terlebih dahulu perlu dilakukan uji validitas dan uji

reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui korelasi antara indikator dengan konstraknya. Pengujian validitas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menghitung korelasi antara indikator dengan konstruk berdasarkan variabel operasional. Indikator dinyatakan valid jika nilai korelasi terhadap konstraknya lebih besar atau sama dengan 0,5. Hasil penghitungan pada tahap ini berupa *outer loading* untuk masing-masing indikator.
2. Mengeluarkan indikator yang memiliki korelasi dengan konstruk lebih kecil dari 0,5 dan menghitung kembali (re-estimasi) model setelah
3. Melakukan uji reabilitas yang ditunjukkan oleh koefisien reliabilitas. Dalam SEM dengan PLS, uji reabilitas dilakukan dengan dua kriteria yaitu Composite Reliability dan Cronbachs' Alpha dari variabel. Umumnya disepakati bahwa suatu instrument dikatakan *reliable* jika memiliki nilai Composite Reliability di atas 0,6 dan Cronbachs' Alpha yang moderat yaitu antara 0,6-0,69 (Robinson, Shaver, & Wrightsman, 1991).

Tabel 3. Composite Reliability dan Cronbachs' Alpha Variabel

Variable/konstruk	Composite reliability	Cronbachs, alpha
Kondisi faktor	0.836893	0.773645
Kondisi permintaan	0.912838	0.885739
Industri pendukung dan terkait	0.746881	0.721715
Strategi Perusahaan, Struktur dan Persaingan	0.852817	0.736870
Pemerintah	0.927148	0.892118
Kinerja industri jasa pergudangan	0.881260	0.816059

Sumber: Data Primer, (diolah)

Nilai Composite Reliability maupun Cronbachs' Alpha untuk seluruh variabel/konstruk, sebagaimana terlihat pada Tabel 3 di atas jauh lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan

bahwa seluruh variabel/konstruk berpengaruh terhadap kinerja.

4. Melakukan pengujian *inner model* untuk menilai hubungan variabel laten eksogen dengan endogen dan diperoleh nilai R-square sebesar

0,827 yang berarti 82,7% kinerja pergudangan dapat dijelaskan oleh variabel/konstruk kondisi faktor, kondisi permintaan, industri pendukung & terkait, strategi perusahaan, dan pemerintah.

Selanjutnya, diperoleh koefisien variabel yang menunjukkan arah hubungan variabel eksogen dengan variabel kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Koefisien dan R-square Variabel

Variabel/Konstruk	Koefisien	t-hitung	R-square
Kondisi faktor	0,051	0,528	
Kondisi permintaan	-0,034	0,508	
Industri pendukung dan terkait	-0,547	3,813	0,827
Strategi Perusahaan, Struktur dan Persaingan	0,392	4,881	
Pemerintah	0,893	11,219	

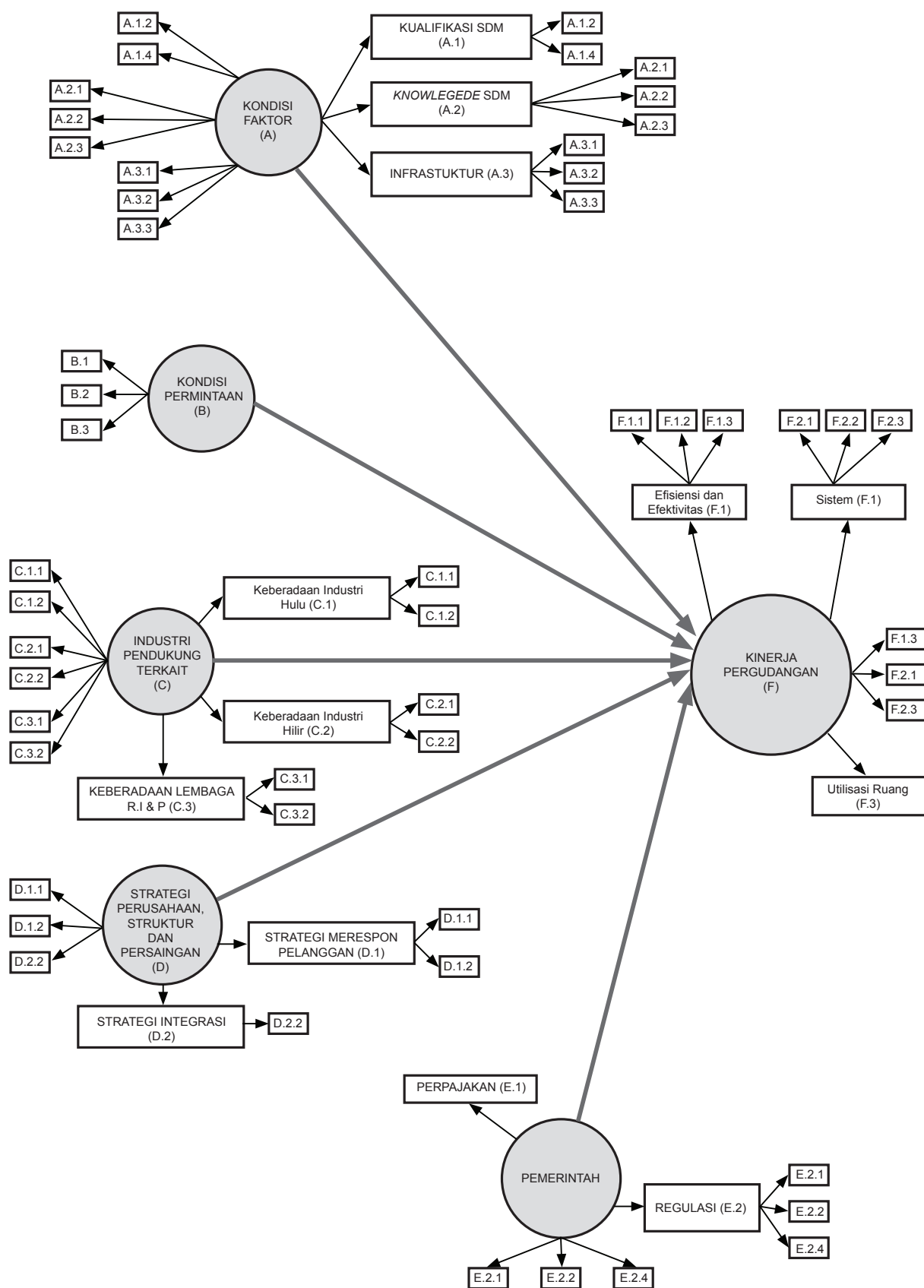
Sumber: data primer (diolah)
Keterangan: t-tabel 1,96

Setelah itu, melalui metode estimasi dengan *Partial Least Square* menggunakan perangkat *SmartPLS*, diperoleh model penentu kinerja pergudangan (*full model*) pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan dengan jelas variabel yang berpengaruh terhadap kinerja jasa pergudangan, dan setiap variabel terdiri dari beberapa dimensi yang direfleksikan oleh indikator dengan interpretasi sebagai berikut yang dirangkum pada Tabel 5. Variabel kinerja jasa pergudangan terdiri dari 3 (tiga) dimensi (*first order*) yaitu Efisiensi & Efektivitas yang direfleksikan dengan indikator rasio biaya operasional terhadap penjualan (kode F.1.1) dengan bobot *outer loadings* sebesar 1.000, Sistem yang direfleksikan dengan indikator penerapan manajemen pergudangan dengan bobot *outer*

loadings sebesar 0,905541 (kode F.2.1), dan Utilisasi Ruang yang direfleksikan dengan indikator penerapan persyaratan teknis mengacu pada SNI gudang dengan bobot *outer loadings* sebesar 1.000 (kode F.3.1). Dengan kata lain, kinerja jasa pergudangan yang baik diindikasikan dengan rasio biaya operasional yang semakin kecil, penerapan *warehouse management*, dan persyaratan teknis yang mengacu pada SNI.

Kinerja jasa pergudangan dipengaruhi oleh variabel Kondisi Faktor yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi (*first order*) yaitu kualifikasi SDM yang direfleksikan dengan indikator tingginya proporsi pekerja dengan pengalaman pergudangan minimal 3 tahun (kode A.1.2) dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,913532, Sumber Pengetahuan (*Knowledge Resources*)



Gambar 4. Diagram Model Faktor Penentu Kinerja Pergudangan

yang direfleksikan dengan indikator adanya program penerapan riset (*improvement project*) oleh perusahaan dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,952161 (kode A.2.2), dan Infrastruktur Perusahaan yang direfleksikan oleh keandalan sistem informasi dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,880981 (kode A.3.2).

Selanjutnya, variabel Kondisi Permintaan direfleksikan dengan indikator pertumbuhan jumlah item yang dikelola dalam 3 tahun terakhir dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,975865 (kode B.3) sedangkan variabel Industri Pendukung dan Terkait dengan 3 (tiga) dimensi (*first order*) yaitu keberadaan industri hulu yang direfleksikan dengan indikator potensi pertumbuhan industri hulu/supplier (*upstream*) dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,956055 (kode C.1.2), keberadaan industri hilir yang direfleksikan dengan indikator potensi pertumbuhan industri hilir/user (*downstream*) dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,921795 (kode C.2.1), dan keberadaan lembaga riset yang direfleksikan dengan indikator dukungan Perguruan Tinggi dan Asosiasi dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,961999 (kode C.3.2).

Variabel Strategi Perusahaan, Struktur, dan Persaingan dengan 2 (dua) dimensi (*first order*) yaitu strategi merespon pelanggan yang direfleksikan dengan indikator strategi melibatkan mitra logistik dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,929646 (kode D.1.2)

dan strategi integrasi yang direfleksikan dengan indikator strategi untuk berada di *cluster* dengan bobot *outer loadings* sebesar 1,000 (kode D.2.2). Sementara variabel Pemerintah terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu kebijakan perpajakan yang direfleksikan dengan indikator kebijakan perpajakan efisien dengan bobot *outer loadings* sebesar 1,000 (kode E.1) dan regulasi lainnya yang direfleksikan dengan indikator kebijakan upah regional (UMR) efisien dengan bobot *outer loadings* sebesar 0,917625 (kode E.2.2).

Berdasarkan tabel 5, maka semakin tinggi proporsi pekerja yang berpengalaman, adanya program *improvement project*, tersedianya sistem informasi yang baik, penerapan strategi oleh penyedia jasa pergudangan untuk melibatkan mitra logistik, strategi untuk berada di *cluster*, adanya kebijakan perpajakan yang efisien, serta kebijakan upah regional yang kondusif akan berdampak pada peningkatan kinerja penyedia jasa pergudangan, khususnya dalam hal efisiensi biaya, penerapan manajemen pergudangan, dan penerapan persyaratan teknis mengacu pada SNI gudang. Hal ini sesuai dengan nilai positif dari koefisien variabel/konstruk dari setiap indikator seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.

Sebaliknya, pertumbuhan jumlah item yang dikelola dan pertumbuhan industri hulu-hilir akan berdampak negatif bagi kinerja penyedia jasa

Tabel 5. Nilai Outer Loadings Indikator, Dimensi, dan Variabel Endogen

Variabel/Konstruk	Dimensi	Kode	Indikator	Outer Loadings
Kondisi Faktor (A)	Kualifikasi SDM	A.1.1	Tingginya proporsi pekerja dengan pengalaman pergudangan minimal 3 tahun	0,913532
		A.1.2	tingginya proporsi pekerja telah berada di perusahaan yang sama selama 5 tahun	0,765991
	Sumber Pengetahuan	A.2.1	Perusahaan memiliki tim riset	0,938279
		A.2.2	Perusahaan memiliki program penerapan riset (improvement project)	0,952161
		A.2.3	Perusahaan memiliki fasilitas pengembangan SDM (training center)	0,506829
	Infrastruktur Perusahaan	A.3.1	Luas area yang memadai	0,860440
		A.3.2	Keandalan sistem informasi	0,880981
		A.3.3	Ketersediaan sarana pendukung (forklift, pallet, dsb)	0,769262
Kondisi Permintaan (B)	Pertumbuhan jumlah pelanggan dalam 3 tahun terakhir	B.1		0,758312
	Pertumbuhan nilai <i>services fee</i> dalam 3 tahun terakhir	B.2		0,900041
	Pertumbuhan jumlah item yang dikelola dalam 3 tahun terakhir	B.3		0,975865
Industri Pendukung dan Terkait (C)	Keberadaan industri hulu	C.1.1	Dukungan industri hulu/supplier (<i>upstream</i>)	0,955072
		C.1.2	Potensi pertumbuhan industri hulu/supplier (<i>upstream</i>)	0,956055
	Keberadaan industri hilir	C.2.1	Potensi pertumbuhan industri hilir/user (<i>downstream</i>)	0,921795
		C.2.2	Dukungan industri hilir/user (<i>downstream</i>)	0,917673
	Keberadaan lembaga riset	C.3.1	Dukungan lembaga riset pemerintah	0,949955
		C.3.2	Dukungan Perguruan Tinggi dan Asosiasi	0,961999
Strategi Perusahaan, Struktur, dan Persaingan (D)	Strategi merespon pelanggan	D.1.1	Strategi orientasi pelanggan	0,908518
		D.1.2	Strategi melibatkan mitra logistic	0,929646
	Strategi integrasi	D.2.2	Strategi untuk berada di cluster	1,000000
Pemerintah (E)	Kebijakan Perpajakan	E.1	Kebijakan perpajakan efisien	1,000000
	Regulasi lainnya	E.2.1	Kebijakan investasi efisien	0,902325
		E.2.2	Kebijakan Upah Regional efisien	0,917625
		E.2.3	Kebijakan pengembangan kawasan khusus logistik/ pergudangan	0,731245

Sumber: data primer (diolah)

pergudangan dalam hal efisiensi biaya, penerapan manajemen pergudangan, dan penerapan persyaratan teknis yang mengacu pada SNI sebagaimana nilai koefisien variabel/konstruk dari setiap indikator tersebut yang negatif seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4 di atas. Sebagai interpretasi, berdasarkan konfirmasi *expert judgement*, industri jasa pergudangan mengalami kelebihan permintaan (*excess demand*) sehingga pertumbuhan permintaan, baik yang berasal dari sektor hulu (*supplier*) maupun hilir (*end user*), diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja. Hal ini terjadi karena industri jasa pergudangan berada dalam lingkungan yang belum optimal. Ekspansi dengan demikian masih perlu dilakukan.

Secara umum, industri jasa pergudangan berada pada Kuadran I yang berarti *strength and opportunity dominant* seperti pada hasil SWOT. Hal ini menunjukkan bahwa penyedia jasa pergudangan melihat kekuatan untuk memanfaatkan peluang sehingga memerlukan ekspansi. Kondisi ini sejalan dengan hasil SEM. Dimana pertumbuhan permintaan yang diindikasikan oleh pertumbuhan jumlah item yang dikelola dan pertumbuhan industri hulu-hilir dapat berdampak destruktif terhadap kinerja jasa pergudangan, yang menunjukkan adanya *excess demand* pada industri jasa pergudangan. Strategi ekspansi juga diperlukan karena adanya peluang terkait peningkatan permintaan dan

volume distribusi akibat MEA yang harus dimanfaatkan oleh penyedia jasa pergudangan.

Beberapa aspek menurut hasil SWOT yang merupakan kekuatan seperti baiknya infrastruktur perusahaan dan keberadaan perusahaan dalam kawasan khusus (*cluster*) perlu dipertahankan. Kondisi ini juga sejalan dengan hasil SEM dimana penyedia jasa pergudangan yang memiliki keandalan sistem informasi, menerapkan strategi untuk berada di *cluster* serta melibatkan mitra logistik akan memiliki implikasi positif terhadap kinerjanya. Lebih jauh, keputusan perusahaan dalam memutuskan untuk berada dalam kawasan khusus (*cluster*) dapat lebih efektif jika kebijakan pemerintah terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah diharapkan dapat menjadi bagian dalam menyediakan kawasan khusus (*cluster*) pergudangan.

Secara khusus, hasil analisa SWOT terkait faktor kelemahan seperti masih rendahnya kemitraan dengan lembaga pendidikan serta ancaman dari keberadaan tenaga kerja asing yang dipersepsikan relatif lebih terampil juga perlu menjadi perhatian. Secara tidak langsung, kedua faktor tersebut berhubungan dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di sektor pergudangan yang berdasarkan hasil SEM menunjukkan pengaruh terhadap kinerja jasa pergudangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan

pengembangan SDM pergudangan dalam mendukung ekspansi.

Secara keseluruhan, hasil SEM menunjukkan bahwa variabel pemerintah memiliki pengaruh yang paling signifikan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien dan t-hitung terbesar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Variabel pemerintah sendiri merupakan perangkat kebijakan dimana terdapat 2 (dua) kebijakan yang dipersepsikan paling berpengaruh yaitu perpajakan dan upah minimum dengan nilai *outer loadings* tertinggi yang ditunjukkan pada Tabel 5.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Industri jasa pergudangan di Indonesia berada pada kuadran I, yang berarti pelaku usaha menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang. Ekspansi industri jasa pergudangan merupakan hal yang penting untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa faktor sebagai kekuatan antara lain adalah infrastruktur perusahaan yang memadai, dan strategi untuk berada di *cluster*. Keduanya dapat mengoptimalkan peluang jasa pergudangan akibat tren *outsourcing* dan diberlakukannya MEA.

Sementara itu, variabel yang memengaruhi kinerja pergudangan antara lain adalah faktor SDM berpengalaman, keberadaan pusat pengetahuan, infrastruktur perusahaan,

permintaan yang meningkat dengan indikasi jumlah item yang dikelola, industri pendukung dan yang terkait yang direpresentasikan dengan keberadaan industri hulu, hilir, dan instansi akademik/asosiasi, strategi klasterisasi dan kemitraan dengan logistik, serta kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dan upah minimum. Strategi yang harus diterapkan untuk sektor jasa pergudangan yang berada pada kuadran 1 adalah ekspansi, yang dilakukan secara sinergis antara kebijakan perusahaan dengan pemerintah, diantaranya pertama, meningkatkan efisiensi melalui pengembangan kawasan khusus pergudangan dengan infrastruktur yang memadai.

Kedua adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui program pengembangan berbasis kompetensi inovatif (*improvement project*) yang dapat dilakukan secara mandiri atau melibatkan asosiasi. Melalui cara ini diharapkan dapat dihasilkan SDM logistik yang berkualitas dan terampil, mampu bermitra dan sekaligus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Pemerintah dalam hal ini dapat mendukung melalui penerbitan Peraturan Pemerintah terkait tenaga teknis yang kompeten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong sertifikasi kompetensi/keahlian pekerja pergudangan.

Ketiga adalah meningkatkan keandalan sistem informasi, suatu sistem yang mutlak diperlukan bagi perusahaan yang menerapkan *warehouse management* berbasis teknologi tepat guna, baik secara mandiri maupun dengan bantuan pemerintah. Optimalisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dalam hal ini akan sangat membantu. Sejauh ini, pelaksanaan regulasi tersebut masih menekankan pada penataan pergudangan melalui pemberlakuan wajib daftar dan pelaporan pengelolaan persediaan, belum secara spesifik menyentuh pembinaan pergudangan termasuk dalam kaitannya dengan *warehouse management system*. Dalam implementasinya, regulasi dimaksud dapat bersifat *light touch* dimana penyedia jasa yang telah melakukan pendaftaran dan pelaporan *inventory* memperoleh hak istimewa (*previlage*) dalam pembinaan teknis terkait manajemen pergudangan.

Keempat adalah menghindari penerapan kebijakan perpajakan yang berpotensi menghambat investasi pembangunan pergudangan (aset). Usulan terkait misalnya penghapusan pajak berganda untuk dana investasi real estate/property, dan penghapusan kebijakan yang kontra produktif terhadap efisiensi kerja merupakan langkah positif dalam mendorong

investasi pembangunan gudang baru oleh pengembang.

Sementara untuk kebijakan upah, Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan penetapan kebijakan upah yang tidak membebani pelaku usaha. Hal ini menjadi krusial mengingat penyedia jasa pergudangan masih didominasi oleh tenaga kerja manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri dan Tim Ahli dari *Supply Chain* Indonesia atas kontribusinya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Addy-Tayie, N. E. (2012). *Improving Warehouse and Inventory Management: Operational Efficiency and Transport Safety*. [Thesis]. Programme in Logistic Engineering, JAMK University of Applied Science.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2011). *Identifikasi Kebutuhan Investasi: Perencanaan Pengembangan Investasi Terpadu Logistik dan Pergudangan*. Jakarta. BKPM
- Baijal, S. (2014). *A Definitive View on Mumbai and Pune Warehousing Market. India Logistics & Warehousing Report*. Mumbai: Knight Frank India.
- Bakan, I. & I. F. Dogan. (2012). Competitiveness of The Industries Based On The Porter's Diamond Model: An Empirical Study. *International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences*, Vol 11 (3), pp. 441-455.

- Boja, C. (2011). Clusters Models, Factors and Characteristics. *International Journal of Economic Practices and Theories*, Vol. 1 (1), pp. 34-43
- Center of Logistics and Supply Chain Studies. (2013). *State of Logistics Indonesia 2013*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Chin, W.W. (1995). Partial Least Squares is to LISREL as Principal Components Analysis is To Common Factor Analysis. *Technology Studies*, Vol. 2, pp. 315-319.
- Coyle, J; B. Joseph, & J. Edward. (2003). *The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective*. 7th Edition. South-Western/Thomson Learning, Mason, Ohio.
- Faber, N., MBM, de Koster, & A. Smidts, (2013). Organizing warehouse management. *International Journal of Operations & Production Management*, 33(9), 1230-1256. Diunduh tanggal 15 Maret 2015 dari <http://search.proquest.com/docview/1430549919?accountid=25704>
- Filipe, L. (2012). *Fact Based Policymaking: Developing and Consolidating the Network of Logistic Observatories*. The World Bank Logistic Workshop Conference. Rio de Janeiro. ILOS.
- Gefen, D; D.W. Straub & B. Marie-Claudia. (2000). structural Equation Modeling and Regression: Guidelines for Research Practice. *Communications of the Association for Information System*, Vol. 4, pp 1-68.
- Goskoy, A; O. Vayvay, & E. Ergeneli. (2013). Gaining Competitive Advantage through Innovation Strategies: An Application in Warehouse Management Process. *American Journal of Business and Management*, Vol 2 (4), pp. 304-321.
- Hair, J.F. C.M. Ringle, & M. Sarstedt. (2011). PLS-SEM: indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, Vol. 19 (2), pp. 139–151.
- Henseler, J; C. M. Ringle, & R.R. Sinkovicks. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing, in Rudolf R. Sinkovics, Pervez N. Ghauri (ed.) *New Challenges to International Marketing* (Advances in International Marketing, Volume 20) Emerald Group Publishing Limited, pp.277 – 319.
- Jakarta Globe. (2015, April 8). Logistics Market Could Boom. Diunduh tanggal 24 November 2015 dari <http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/logistics-market-boom/>
- Kot, S; K. Grondys, & R. Spoza. (2011). Theory of Inventory Management Based on Demand Forecasting. *Polish Journal of Management Studies*, Vol 3 (1), pp. 148-156
- Logistics Insight Asia. (2015, Desember 18). Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS) Addresses Seven Key Challenges Impacting F&B Supply Chain Logistics. Diunduh tanggal 20 Desember 2015 dari <http://www.logasiamag.com/2015/12/asrs-addresses-seven-key-challenges-impacting-fb-supply-chain/>
- Mahajan, V., S. P. Singh, & S. K. Singh. (2013). Analysis of Indian Warehousing Sector and Warehouse Optimization and Modernization Techniques. *International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering*, Vol 2 (5), pp. 2319-2526.
- Monecke, A. & F. Leisch. (2012). SEM PLS: Structural Equation Modeling Using Partial Least Square. *Journal of Statistic Software*, Vol 48 (3), pp. 2-32. Diunduh dari <https://www.jstatsoft.org/article/view/v048i03> pada tanggal 5 Juli 2015.
- Maryandani, A. (2013). *Kinerja Industri Gula di Indonesia*. [Skripsi]. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

- Nath, R. & D. S. Gandhi. (2011). Building warehousing competition. *Pricewaterhouse Coopers*. India. Diunduh tanggal 8 Maret 2015 dari www.pwc.com/india
- Pearce, John A. & R. B. Robinson. (1997). *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1, Jakarta. Binarupa Aksara.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Porter, M. E. (1998). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press
- Project Monitor. (2013, Maret 18). The Future of Logistics Lies in Outsourcing. Diunduh tanggal 22 November 2015 dari <http://www.projectsmonitor.com/interviews/the-future-of-logistics-lies-in-outsourcing/>
- Properti. (2015, April 4). Sektor Pergudangan Jadi Andalan di 2015. Diunduh tanggal 24 November 2015 dari <http://properti.bisnis.com/read/20150404/107/419283/sektor-pergudangan-jadi-andalan-di-2015>.
- Puspitasari, N. B. ., A. Arvianto, D. Tauhida, & A. Hendra. (2012). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Enceng Gondok Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Semarang Menggunakan Analisis Rantai Nilai. *Jurnal Teknik Industri Universitas Diponegoro*, Vol 7 (2), pp 113-122.
- Robinson, J.P, P. Shaver, & I. Wrightsman. (1991). *Criteria for Scale Selection and Evaluation in Measure of Personality and Social Psychological Attitudes*, San Diego, CA: Academic Press
- Sankar, K., S. Kannan, & A. Muthukumaravel. (2014). E-Logistic for Warehouse Management. *Middle-East Journal of Specific Research*, Vol 20 (6), pp. 766-769.
- Saptana. (2010). Tinjauan Konseptual Mikro-Makro Daya Saing dan Strategi Pembangunan Pertanian. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol 28 (1), pp. 1-18.
- Serhat, B. & S. Harun. (2011). Analyzing the Dependency Between National Logistics Performance and Competitiveness: Which Logistics Competence for National Strategy. *Journal of Competitiveness*, Vol 4 (3), pp. 4-22. Diunduh tanggal 30 Juni 2015 dari <http://www.cjournal.cz/files/72.pdf>
- The Jakarta Post. (2015, Maret 2). Warehousing Business Grows But Delivery Problems Linger. Diunduh tanggal 24 November 2015 dari <http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/02/warehousing-business-grows-delivery-problems-linger.html>
- Tumengkol, W. L., S. W. Palar, & D. Rotinsulu. (2015). Kinerja dan Daya Saing Ekspor Hasil Perikanan Laut Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15 (1), pp. 1-16.
- Xianghui, L. (2012). The Impact of Logistics Costs on The Economic Development: The Case of Thailand. Paper presented to First Thai-Chinese Strategic Research Seminar, 24 – 26 August, Bangkok.
- Yoyo, T. A. Daryanto, E. Gumbira, & M. F. Hasan. (2014). Competitiveness Model and Gap Analysis of Indonesian Palm Oil-Based Fatty Acid and Fatty Alcohol Industry. *International Journal of Economics and Finance*, Vol 6 (2), pp. 218-225.

UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berpartisipasi dalam buletin ini. Secara khusus, Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Abuzar Asra, MSc; Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA; Prof. Dr. Rina Oktaviani; Dr. Slamet Sutomo; Dr. Wayan R. Susila, APU; Achmad Shauki, Ph.D; Dr. Ir. Hartoyo, MS.c; dan Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana MS sebagai Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan terhadap naskah yang ada.

INDEKS SUBYEK

- | | |
|---|---|
| <p>A</p> <p>Asimetri, 10 (1): 105, 106, 107</p> <p>ATDAG dan ITPC, 10 (2): 203, 207, 208, 209, 210, 214, 215, 217, 218</p> <p>Augmented Dickey-Fuller Test (ADF-Test), 10 (2): 228</p> | <p>Elastisitas, 10 (1): 117, 118</p> <p><i>Error Correction Term</i> (ECT) , 10 (1): 49, 50, 57, 59</p> <p>Export Determinants, 10 (2): 189, 190, 198</p> |
| <p>B</p> <p>Beras, 10 (1): 129, 137, 144</p> | <p>F</p> <p>Faktor Eksternal, 10 (2): 245, 246, 248, 252</p> <p>Faktor Internal, 10 (2): 246, 248, 252, 255</p> |
| <p>C</p> <p>Coase Theory of Transaction Costs, 10 (2): 7</p> | <p>G</p> <p>Gravity Model, 10 (2): 190, 191</p> <p>GTAP, 10 (1): 21, 23, 24, 32, 35, 38, 39, 41; 10 (2): 167, 169, 170, 171, 172</p> |
| <p>D</p> <p>Dampak ASEAN-Hong Kong, 10 (2): 174</p> <p>Dampak Perwakilan Perdagangan Luar Negeri, 10 (2): 207, 218, 220</p> <p>Data Panel, 10 (2): 147, 150, 153</p> <p>Disparitas, 10 (1): 104, 105, 106, 109</p> | <p>I</p> <p>Impor, 10 (1): 106, 108, 109, 122, 123, 124, 125</p> |
| <p>E</p> <p>Ekspor, 10 (1): 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144</p> <p>Ekspor Non Migas, 10 (2): 203, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220</p> <p>Ekuivalen Tarif, 10 (2): 147, 150, 153, 161, 163, 164</p> | <p>K</p> <p>Kausalitas Granger, 10 (2): 234, 238</p> <p>Kebijakan, 10 (1): 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144</p> <p>Kointegrasi, 10 (2): 228, 229, 230, 232, 236</p> |
| | <p>L</p> <p>Liberalisasi perdagangan, 10 (1): 21, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41</p> |

N

Neraca Perdagangan, 10 (1): 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 41

Nilai Tambah, 10 (2): 252

O

Organik, 10 (1): 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 144

Output sektor industri, 10 (1): 37, 38, 39

P

Panel Data, 10 (1): 10, 12, 13

Panel Kausalitas Jangka Panjang, 10 (1): 57

Panel Kausalitas Jangka Pendek, 10 (1): 56

Penentuan Prioritas, 10 (1): 74

Promosi Ekspor, 10 (1): 64, 65

Proyeksi Ekspor, 10 (1): 87, 90, 92, 98, 99, 100

Proyeksi Impor, 10 (1): 87, 90, 92, 100

R

Random Effect Model, 10 (2): 203, 207, 214

S

Structure Equation Modeling (SEM), 10 (2): 246, 250, 255

T

Trade Complementarity Index, 10 (2): 174, 175

Transmisi, 10 (1): 118, 119, 120, 124

U

Unit Root, 10 (1): 48, 55, 59

V

Variabel Eksogen, 10 (1): 92, 94, 98, 99

Variabel Endogen, 10 (1): 92, 93, 94, 98, 99

INDEKS PENGARANG

A

Alpay, Savas., Murat Atlamaz dan Esat Bakimli, 10 (1): 37

Alvarez & Crespi, 10 (2): 204, 207, 208

B

B.T. Carver, 10 (1): 105, 116

C

Coase, R. H, 10 (1): 7

Coyle, et al., 10 (2): 246

E

Enders, W, 10 (2): 229

E.Zafeirioua, 10 (1): 105, 124

F

Fukunaga & Isono, 10 (2): 148, 168

G

Ghani, Ghairuzazmi M, 10 (1): 33

Gujarati, 10 (1): 92; 10 (2): 191, 192, 194

Gurler Oker, 10 (1): 40

H

Habte, Z, 10 (2): 228

Hertel, Thomas W dan Tsigas, Marinos, E, 10 (1): 23

Hill, Griffiths, dan Lim, 10 (1): 95

Hossain Ishtiaq, 10 (1): 22

I

Itakura, 10 (2): 168

K

Kang, K., 10 (1): 65

Kang, 10 (2): 205, 207

Krugman, 10 (1): 131

M

Maharani, P, 10 (1): 65

Martincus, C. V., Carballo, J, 10 (1): 65

Martincus, et al., 10 (2): 204, 207

Mankiw, 10 (2): 194, 195

McNew, K, 10 (2): 227

N

Nachrowi dan Usman (2006) , 10 (1): 92
Nguyen, D. X, 10 (1): 64

P

Pareja, et al., 10 (2): 204, 205, 207
Pearce, 10 (2): 247
Pindyck & Rubinfeld (1998) , 10 (1): 93
Porter, M. E, 10 (2): 247
Pomfret, R., & Sourdin, P, 10 (1): 9

R

Rahmaddi and Ichihashi, 10 (2): 197, 199

S

Saaty, R. W, 10 (1): 68, 69
Sheldon, Mishra, and Thompson, 10 (2): 190
Shepherd dan Marel, 10 (2): 150
Shepherd, B., & Wilson, J. S, 10 (1): 2, 7, 8
Sikdar, Chandrima and Nag, Biswajit, 10 (2): 178
Srofenyoh, F, 10 (2): 228

T

Tinbergen, 10 (2): 150

W

Wilson, J. S., Mann, C. L., & Otsuki, T, 10 (1): 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16

Y

Yustiningsih, 10 (1): 105, 115, 118, 119

INDEKS KATA KUNCI

A

AHP, 10 (1): 63, 66, 68, 69, 70
ASEAN-Hong Kong FTA, 10 (2): 167,
168, 169
Atdag, 10 (1): 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74,
75, 76, 77, 82

B

Bawang Merah, 10 (1): 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126
Beras Organik, 10 (1): 129, 130, 131,
132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144

C

CGE Model, 10 (2): 167, 170, 171

D

Dampak Bagi Perkonomian Indonesia,
10 (1): 21

E

Ekspor, 10 (1): 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 10 (2): 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221
Ekspor Manufaktur, 10 (1): 1, 6, 15, 16,
17
Ekspor Produk Manufaktur, 10 (2):
187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199

F

Fasilitasi Perdagangan, 10 (1): 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
Finansial dan Asuransi, 10 (2): 147, 149,
150, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161,
163
Fungsi Permintaan, 10 (2): 203

G

Gravity Model, 10 (1): 1, 8, 9, 11, 12, 13,
15, 17; 10 (2): 147, 150, 151, 152, 159,
163

H

Hambatan Perdagangan, 10 (2): 147,
150, 161

I

Impor, 10 (1): 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108,
122, 123, 124, 125, 126
Integrasi Pasar, 10 (2): 225, 227, 228,
236
ITPC, 10 (1): 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74,
75, 76, 77, 82

J

Jasa Pergudangan, 10 (2): 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263

K

Kebijakan Pemerintah, 10 (1): 129, 130,
131, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142,
143, 144
Keunggulan Komparatif, 10 (1): 129,

131, 134, 135, 140, 141, 144

Keunggulan Kompetitif, 10 (1): 129, 131, 135, 139, 140, 141, 144

Kriteria, 10 (1): 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

L

Lada Hitam, 10 (2): 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236

Lada Putih, 10 (2): 225, 228, 229, 230, 232, 236, 237, 238, 239

Liberalisasi Ekonomi, 10 (1): 21, 23

Logistik, 10 (2): 243, 244, 248

M

Moda 2, 10 (1): 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59

Moda 3, 10 (1): 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

N

Negara Prioritas, 10 (1): 63, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 79, 82

Nilai Tukar, 10 (2): 187, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 199

O

OKI, 10 (1): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

P

Pariwisata, 10 (1): 45, 48, 54, 59

Perdagangan Indonesia, 10 (2): 167, 169, 173, 179, 182

Perdagangan Jasa, 10 (1): 45, 46, 47; 10 (2): 147, 149, 150, 151, 159, 163, 164

Perilaku Pasar, 10 (1): 103

Perwakilan Perdagangan, 10 (2): 203, 206, 207, 218, 220, 221

Policy Analysis Matrix, 10 (1): 129, 132, 133, 134, 138

Proyeksi, 10 (1): 87, 88, 90, 91, 92, 98, 99, 100

R

Random Effect Model, 10 (2): 187

RCEP, 10 (2): 147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164

Real GDP, 10 (2): 187, 190, 191, 193, 194, 195, 198

Regresi Data Panel, 10 (2): 187, 190, 191, 194, 198

S

SEM dengan PLS, 10 (2): 243, 246, 249, 255, 256

SWOT, 10 (2): 243, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 261

T

Transmisi Asimetris, 10 (1): 103, 105, 106, 107, 108, 119, 125

V

VAR, 10 (1): 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100

VECM, 10 (2): 225, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 239

VECM Granger, 10 (1): 45, 56, 59

KEYWORDS INDEX

A

AHP, 10 (1): 63, 66, 68, 69, 70
ASEAN-Hong Kong FTA, 10 (2): 167, 168, 169
Asymmetric Transmission, 10 (1): 103, 105, 106, 107, 108, 119, 125

B

Black Pepper, 10 (2): 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236

C

CGE Model, 10 (2): 167, 170, 171
Comparative Advantage, 10 (1): 129, 131, 134, 135, 140, 141, 144
Competitive Advantage, 10 (1): 129, 131, 135, 139, 140, 141, 144
Criteria, 10 (1): 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

D

Demand Function, 10 (2): 203

E

Economic Liberalization, 10 (1): 21, 23
Export, 10 (1): 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101; 10 (2): 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221

F

Finance and Insurance, 10 (2): 147, 149, 150, 151, 159, 163, 164

G

Government Policy, 10 (1): 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144
Gravity Model, 10 (1): 1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17; 10 (2): 147, 150, 151, 152, 159, 163

I

Impacts on Indonesia Economy, 10 (1): 21
Import, 10 (1): 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 122, 123, 124, 125, 126
Indonesia Trade Performance, 10 (2): 167, 169, 173, 179, 182
ITPC, 10 (1): 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 82

L

Logistic, 10 (2): 243, 244, 248

M

Manufacturing Export, 10 (1): 1, 6, 15, 16, 17
Manufacturing Export, 10 (2): 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Market Behaviour, 10 (1): 103
Market Integration, 10 (2): 225, 227, 228, 236
Mode 2, 10 (1): 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59

Mode 3, 10 (1): 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

O

OIC, 10 (1): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Organic Rice, 10 (1): 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144

P

Panel Data Regression, 10 (2): 187, 190, 191, 194, 198

Policy Analysis Matrix, 10 (1): 129, 132, 133, 134, 138

Priority Countries, 10 (1): 63, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 79, 82

Projection, 10 (1): 87, 88, 90, 91, 92, 98, 99, 100

R

Random Effects Model, 10 (2): 187

RCEP, 10 (2): 147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164

Real Exchange Rate, 10 (2): 187, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 199

Real GDP, 10 (2): 187, 190, 191, 193, 194, 195, 198

S

SEM With PLS, 10 (2): 243, 246, 249, 255, 256

Shallots, 10 (1): 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

Swot, 10 (2): 243, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 261

T

Tourism, 10 (1): 45, 48, 54, 59

Trade Attache, 10 (1): 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 82

Trade Barriers, 10 (2): 147, 150, 161

Trade Facilitation, 10 (1): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Trade in Sevices, 10 (1): 45, 46, 47; 10 (2): 147, 149, 150, 151, 159, 163, 164

Trade Representative, 10 (2): 203, 206, 207, 218, 220, 221

V

VAR, 10 (1): 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100

VECM 10 (2): 225, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 239

VECM Granger, 10 (1): 45, 56, 59

W

Warehouse Services, 10 (2): 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263

White Pepper, 10 (2): 225, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 239

TEMPLATE NASKAH BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

**JUDUL NASKAH BAHASA INDONESIA SPESIFIK, JELAS, MENGANDUNG
UNSUR KATA KUNCI, MAKSIMAL 15 KATA** (Font 12, bold, center, after 6 pt)

Title in English, Specific, Clear, Contains Key Words , Maximum 15 Words

A. Firstauthor^{1*}, B.C. Secondauthor², D. Thirdauthor^{1,2} (Font 10, bold, center)

¹*First affiliation, Address, City and Postcode, Country, email address* (Font 10, center)

²*Second affiliation, Address, City and Postcode, Country, Email Address* (Font 10, center)

Abstrak (Font 11, bold, center)

Abstrak berisi gambaran singkat keseluruhan artikel mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan. Jumlah kata 150-200 kata dan harus dalam satu paragraf.

(font 11, justify)

(spasi 1, 12 pt)

Kata Kunci: 3-5 kata (font 11, spasi 1)

(spasi 1, 12 pt)

Abstract (Font 11, bold, italic, center)

Abstract contains research problem, aims of the study, research method, results, and policy recommendation. The length of abstract should be between 150-200 words and must be in one paragraph. (font 11, italic)

(spasi 1, 12 pt)

Keywords: 3-5 words (font 11, italic, spasi 1)

(spasi 1, 12 pt)

JEL Classification: F12, F13, F15 (minimal 3)

(spasi 1, 12 pt)

PENDAHULUAN (Font 12, bold)

(spasi 1,5, 6 pt)

Menguraikan latar belakang (signifikansi penelitian), perumusan masalah/pertanyaan penelitian, teori dan penelitian terkait, hipotesa (optional), dan tujuan. Pendahuluan ditulis dengan tanpa sub judul.

METODE (spasi 1,5, before 12 pt, after 6 pt)

Berisi waktu dan tempat penelitian (optional), bahan/cara pengumpulan data, dan metode analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN (spasi 1,5, before 12 pt, after 6 pt)

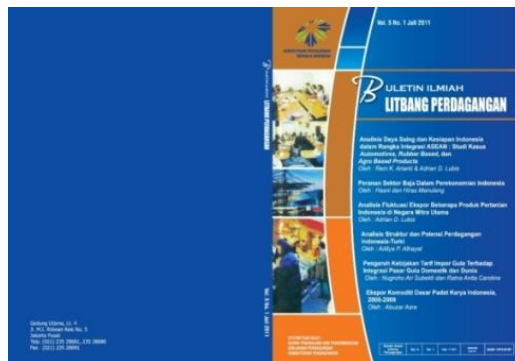
Menyajikan dan menganalisis temuan penelitian. Uraikan di bagian ini hasil yang diperoleh. Penulisan hasil bisa ditambahkan dengan menyajikannya dalam bentuk table/gambar.

Contoh penulisan tabel dan gambar.

Tabel 1. Hasil Yang Diperoleh (font 12, bold, spasi 1,5, after 6 pt)

Sumber: Reference (2012), diolah (Font 10, spasi 1, before 6 pt)

Keterangan: (Font 10, spasi 1)



Gambar 1. Contoh Judul Gambar. (font 12, bold, spasi 1,5, before 6 pt)

Sumber: Reference (2012), diolah (Font 10, spasi 1, before 6 pt)

Keterangan: (Font 10, spasi 1)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN (spasi 1,5, before 12 pt, after 6 pt)

Kesimpulan harus menjawab pertanyaan/permasalahan penelitian. Rekomendasi kebijakan berisi rumusan kebijakan atas temuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA (spasi 1,5, before 12 pt, after 6 pt)

(font 11, 6pt)

- Firdausy, C. M. (2005). *Menapak Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Masyhuri. (2006a). *Landasan Filosofis Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera.
- Masyhuri. (2006b). *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera
- Whitten, J.L., Bentley, L.D., S.K., Steven, Dittman, K.C. (2004). *Systems Analysis and Design Methods*. Indianapolis: McGraw-Hill Education.
- Asra, A. (2012). Trade Pattern and Welfare Impacts. *Journal of ABC*, Vol. 2 (1), pp. 35 – 29.
- Muhri, K., T. Widayanti, dan A. Adang. (2012). Indonesia Competitiveness Among ASEAN Countries. *Journal of XYZ*, Vol. 3 (5), pp.200-225.
- Sabdul, K. (2012). Harga Daging Sapi Menanjak Terus Menjelang Bulan Puasa. *Bisnis Indonesia*, 5 Juni.
- Kompas. (2012, 4 Juni). Harga Gula Makin Meroket.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 2014. Jakarta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2011). *Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah*. Jakarta: LIPI Press.
- Ismail, A. (2007). Perancangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Jurusan Teknik Industri. Skripsi. Padang: Program Sarjana Universitas Andalas.
- Krisnamurthi, B. (2014). Opportunities and Challenges: Regional & Global of CPO within the Context of Aviation Biofuel Implementation and ISPO Standard. Makalah: Disajikan pada Workshop Indonesia Initiatives on Energy Farming & Sustainable Abiation Biofuel and the ISPO/RSPO Standard pada tanggal 26 Agustus 2014 di Kementerian Perhubungan Jakarta.
- Online. (2012). Sumber dari Internet Tentang Perdagangan. Diunduh tanggal 23 April 2012 dari <http://online.com/home/data/trade.php>
- Kompas. (2011, Januari 24). Hadapi Perdagangan Internasional dengan SNI. Diunduh tanggal 30 November 2012 dari <http://www.kompas.com>.

**PETUNJUK PENULISAN NASKAH
BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN**

1. Naskah merupakan hasil penelitian, tidak sedang dikirimkan/telah diterbitkan pada jurnal/terbitan lain.
2. Naskah berisi tentang topik perdagangan maupun yang terkait.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar..
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Sistematika Penulisan: Judul, Keterangan Penulis, Abstrak, Kata Kunci, JEL classification, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan, Ucapan Terima kasih (*optional*), Daftar Pustaka.
7. Teknik Penulisan:
 - a. Naskah diketik pada kertas ukuran A4, 1,5 spasi, dan jenis huruf Arial 12 dengan margin kiri 3 cm, margin atas, kanan dan bawah 2,5 cm serta jumlah halaman 20-25 halaman.
 - b. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
 - c. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, *bold*, *center*, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, *italic*, *bold* dan *center*.
 - d. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (*center*). Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (*center*).
 - e. Abstrak ditulis dalam satu paragraf menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstrak diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Arial 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format *italic*.
 - f. Kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris terletak di bawah abstrak sebanyak 3-5 kata kunci.
 - g. Mencantumkan *JEL Classification* yang dapat diakses melalui http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php.
 - h. Tabel dan gambar diletakkan segera setelah disebutkan didalam naskah pada posisi paling atas atau paling bawah dari setiap halaman dan tidak diapit oleh kalimat.
 - i. Penulisan tabel:
 - Judul tabel menggunakan huruf arial 12, *bold*, diletakkan di atas tabel dan rata kiri.
 - Judul tabel diberi penomoran angka Arab (1, 2, 3,...)

- Sumber tabel diketik sejajar dengan teks dibawah tabel.
- Isi tabel diketik dengan jarak satu spasi
- Garis tabel hanya pada bagian atas (*header*) dan garis bagian bawah (*footer*) tabel, garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan, dan dapat diedit.

j. Penulisan gambar:

- Judul gambar ditulis dengan huruf Arial 12, bold, diletakkan dibawah gambar dan rata kiri.
- Judul gambar diberi penomoran angka Arab (1, 2, 3,...)
- Keterangan gambar diletakkan di bawah judul gambar.
- Penulisan keterangan gambar menggunakan huruf Arial 10, dan diletakkan dibawah sumber.
- Ukuran resolusi gambar paling sedikit 300 dpi, dan dapat diedit.

k. Cara penulisan rumus untuk persamaan–persamaan yang digunakan disusun pada baris terpisah dan diberi nomor secara berurutan dalam parentheses (*justify*), sejajar dengan baris tersebut, dan rata kanan. Contoh :

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \dots\dots\dots(1)$$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \dots\dots\dots(2)$$

l. Keterangan rumus ditulis dalam satu paragraf tanpa menggunakan simbol sama dengan (=), masing-masing keterangan notasi rumus ditulis di bawahnya.

Contoh: x : nilai ekspor
a : nilai impor dsb.

m. Sumber acuan di dalam teks (*body text*) ditulis dengan mencantumkan nama akhir penulis dan tahun, sedangkan untuk karya terjemahan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya.

Contoh:

- Bossche (2012) dalam papernya....
- Fasilitas-fasilitas suatu pelabuhan.....(Suyono, 2005)

8. **ABSTRAK**, berisi gambaran singkat keseluruhan artikel mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
9. **PENDAHULUAN**, menguraikan latar belakang (signifikansi penelitian), perumusan masalah/pertanyaan penelitian, teori dan penelitian terkait, hipotesa (optional), dan tujuan .
10. **METODE** berisi waktu dan tempat penelitian (optional), bahan/cara pengumpulan data, metode analisis. .
11. **HASIL DAN PEMBAHASAN**, menyajikan dan menganalisis temuan penelitian.
12. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**, kesimpulan harus menjawab pertanyaan/permasalahan penelitian. Rekomendasi kebijakan berisi rumusan kebijakan atas temuan penelitian.

13. **UCAPAN TERIMA KASIH**

14. **DAFTAR PUSTAKA**, disusun menurut abjad berdasarkan **APA style**. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% diantaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi.

15. **Tata Cara Penulisan Pustaka Acuan**

Penulisan Pustaka Acuan menggunakan **APA Style** yang dapat diakses melalui <http://www.apastyle.org>

- **Rujukan dari buku:**

Contoh:

Firdausy, C. M. (2005). *Menapak Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor.

Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama, data tahun penerbitan diikuti oleh lambang a, b, c, dan seterusnya yang urutannya ditentukan secara kronologis atau berdasarkan abjad judul buku-bukunya.

Contoh:

Masyhuri. (2006a). *Landasan Filosofis Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera.

Masyhuri. (2006b). *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera

- **Rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel (ada editor). Ditambah dengan ed jika satu editor, eds jika editornya lebih dari satu.**

Contoh:

Masyhuri. (2006). Landasan Filosofis Ekonomi Islam. Dalam Masyhuri (Ed.). *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera.

- **Rujukan dari buku yang ditulis lebih dari satu penulis, dapat ditulis dengan menambahkan nama penulis pertama dengan dkk (dan kawan-kawan) atau et.al (dan lainnya). Penulisan dalam Pustaka Acuan harus ditulis lengkap nama penulis lainnya.**

Contoh:

Whitten, et.al ditulis lengkapnya Whitten, J.L., Bentley, L.D., S.K., Steven, Dittman, K.C. (2004). *Systems Analysis and Design Methods*. Indianapolis: McGraw-Hill Education.

- **Rujukan dari artikel dalam jurnal**

Contoh:

Asra, A. (2012). Trade Pattern and Welfare Impacts. *Journal of ABC*, Vol. 2 (1), pp. 35 – 29.

Muhri, K., T. Widayanti, dan A. Adang. (2012). Indonesia Competitiveness Among ASEAN Countries. *Journal of XYZ*, Vol. 3 (5), pp.200-225.

- **Rujukan dari artikel dalam majalah atau koran**

Contoh:

Sabdul, K. (2012). Harga Daging Sapi Menanjak Terus Menjelang Bulan Puasa. *Bisnis Indonesia*, 5 Juni.

- **Rujukan dari Koran tanpa penulis**

Contoh:

Kompas. (2012, 4 Juni). Harga Gula Makin Meroket.

- **Rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang dan tanpa lembaga**
Contoh:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 2014. Jakarta.
 - **Rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut**
Contoh:
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2011). *Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah*. Jakarta: LIPI Press.
 - **Rujukan berupa skripsi, tesis, atau disertasi**
Contoh:
Ismail, A. (2007). Perancangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Jurusan Teknik Industri. Skripsi. Padang: Program Sarjana Universitas Andalas.
 - **Rujukan berupa makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya**
Contoh:
Krisnamurthi, B. (2014). Opportunities and Challenges: Regional & Global of CPO within the Context of Aviation Biofuel Implementation and ISPO Standard. Makalah: Disajikan pada Workshop Indonesia Initiatives on Energy Farming & Sustainable Aviation Biofuel and the ISPO/RSPO Standard pada tanggal 26 Agustus 2014 di Kementerian Perhubungan Jakarta.
 - **Rujukan dari internet**
Contoh:
Online. (2012). Sumber dari Internet Tentang Perdagangan. Diunduh tanggal 23 April 2012 dari <http://online.com/home/data/trade.php>
 - **Rujukan dari koran/majalah online**
Contoh:
Kompas. (2011, Januari 24). Hadapi Perdagangan Internasional dengan SNI. Diunduh tanggal 30 November 2012 dari <http://www.kompas.com>.
16. Semua naskah yang masuk harus mengikuti format template naskah yang dapat diunduh dari www.jurnal.kemendag.go.id
17. Naskah dikirimkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada:
Redaksi Pelaksana Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan,
Kementerian Perdagangan, Gd. Utama, Lantai 3 dan 4
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat
email: publikasi.bppkp@kemendag.go.id dan evalap-bppkp@kemendag.go.id

Gedung Utama, Lt. 3 dan 4
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5
Jakarta Pusat
Telp. (021) 235 28681, 235 28680
Fax. (021) 235 28691

ISSN 1979-9187



9 771979 918009